

repository.ub.ac.id

EVALUASI KEBIJAKAN SIAP (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN) *ONLINE* DI LEMBAGA PENDIDIKAN

(STUDI KASUS DI KOTA MALANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

LILIK FITRIYANTI

NIM.105030113111009



Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
2. Moch. Shobaruddin, Drs., MA

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

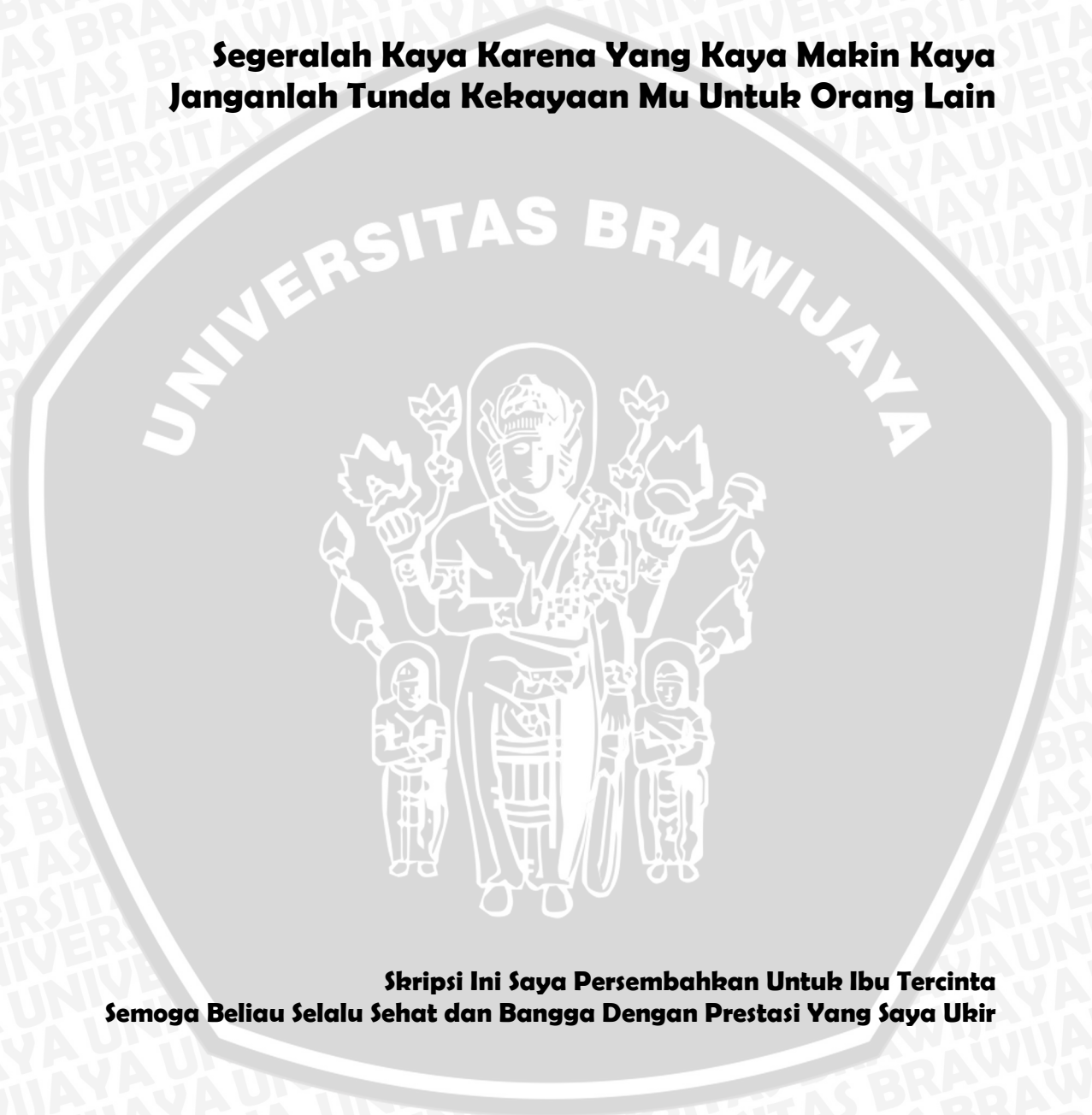
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

MOTTO

**Segeralah Kaya Karena Yang Kaya Makin Kaya
Janganlah Tunda Kekayaan Mu Untuk Orang Lain**



**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk Ibu Tercinta
Semoga Beliau Selalu Sehat dan Bangga Dengan Prestasi Yang Saya Ukir**

TANDA PERSETUNUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) *Online* (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Malang)

Disusun Oleh : Lilik Fitriyanti

NIM : 105030113111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

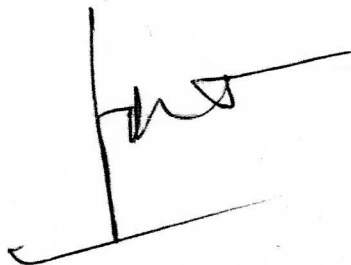
Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, Februari 2014

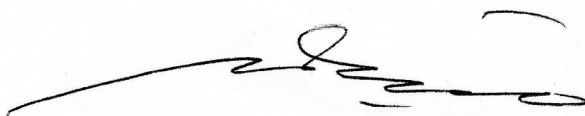
Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

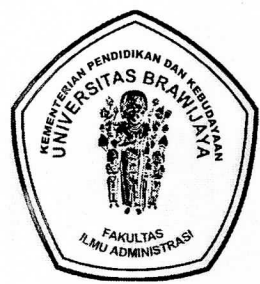


Soesilo Zauhar, Prof. Dr., MS
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota Komisi Pembimbing



Muhammad Shobaruddin, Drs., MA
NIP. 19590219 198601 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
- Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2014
Jam : 13.00 WIB
Judul : **Evaluasi Implementasi Kebijakan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) *Online*(Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Malang)**

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS

NIP 19540306 197903 1 005

Ketua

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP 19690524 200212 2 002

Anggota

Muhammad Shobaruddin, Drs., MA

NIP. 19590219 198601 1 001

Anggota

Drs. Dwi Sulistivo, MPA

NIP. 195905291984031002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini yang disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Februari 2014

Mahasiswa



TID

Nama : Lilik Fitriyanti

NIM : 105030113111009

RINGKASAN

Lilik Fitriyanti, 2014, **EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIAP (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN) ONLINE (STUDY KASUS DI PEMERINTAHAN KOTA MALANG)**, Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, **Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S, (2) Drs. Shobaruddin, MA.**

Pelaksanaan kebijakan yang selama ini dilaksanakan di Lembaga Pendidikan belum mampu memberikan hasil-hasil yang mendukung kinerja Dinas-Dinas Pendidikan untuk mengakomodir kebutuhan administratif pendidikan. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan Kebijakan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) merupakan kebijakan yang diputuskan oleh Kementrian Pendidikan yang bekerjasama dengan PT.TELKOM, yang diperuntukan bagi Dinas Pendidikan dan juga Lembaga Pendidikan dalam rangka mempermudah sistem informasi administrasi antar seluruh sekolah dan Dinas Pendidikan dalam kebutuhan administratif pendidikan yang terintegrasi dan cepat dalam prosesnya. Atas dasar latar belakang tersebut penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) yang tengah berjalan di kota Malang untuk mencari bagian-bagian yang perlu di evaluasi selama proses berjalanya kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian, dilakukan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pemanfaatan data sekunder dan data primer sebagai pendukung informasi. Data sekunder diperoleh dari MOU SIAP *online*, juknis dan prosedur pelaksanaan SIAP *online*. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitan dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan SIAP *online* dibutuhkan evaluasi untuk menilai berjalanya kebijakan SIAP *online*. dan untuk mendapatkan suatu nilai evaluasi untuk mengukur kesesuaian kebijakan tersebut mulai dari proses formulasi sampai proses implementasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh kebijakan SIAP *online*. Adanya kerjasama kementrian pendidikan dengan PT.TELKOM yang bertugas sebagi implementor untuk menciptakan suatu sistem pendukung kinerja Dinas-Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan untuk mengakomodir kebutuhan administratif pendidikan ini menjadikan kebijakan SIAP *online* diputuskan menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Lembaga Pendidikan Nasional tidak terkecuali di kota Malang.

Dalam pelaksanaan kebijakan SIAP *online* maka dibutuhkan dari setiap aktor yang berperan. yaitu Dinas Pendidikan kota Malang, lembaga pendidikan kota Malang dan juga PT.TELKOM agar terjadinya sinergitas koordinasi dalam pelaksanaan SIAP *online* di Kota Malang. Selain itu untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan maka seluruh sekolah-sekolah di Kota Malang maka harus mengikuti aturan dan prosedur pelaksanaan SIAP *online*.

Kata kunci : kebijakan publik, evaluasi implementasi kebijakan, teknologi informasi



SUMMARY

Lili Fitriyanti, 2014, **EVALUATION OF POLICY IMPLEMENTATION OF THE SIAP (EDUCATION ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEM) ONLINE (CASE STUDY IN THE CITY OF MALANG)**, Skripsi. Department of Public Administration, Brawijaya University, **Supervisor: (1) Professor. Dr.. Susilo Zauhar, M.S, (2) Drs. Shobaruddin, MA.**

Implementation of policies that have not been implemented in educational institutions capable of delivering results that support the performance of ministries of education to accommodate the administrative needs of education. For the Ministry of Education issued a policy of SIAP (Educational Administration Information System) is a policy that is decided by the Ministry of Education in cooperation with PT Telkom, which is intended for education authorities and educational institutions in order to facilitate the administration of information systems across the whole school and education authorities the administrative needs and quickly integrated education in the process. On the basis of this background, this study discusses the policy evaluation of SIAP (Educational Administration Information System) is underway in the unfortunate town to find the parts that need to be evaluated during the running of the policy.

In this study the authors use qualitative research with a descriptive approach. To facilitate researchers in conducting the study, conducted data collection methods through interviews, observation and the use of secondary data and primary data as supporting information. Secondary data were obtained from the MOU (*memorandum of understanding*) SIAP online, guidelines and procedures for the implementation of online SIAP. While the primary data obtained from interviews and observations.

From the results of that research are described in the online SIAP policies needed to implement evaluation to assess *berjalanya* SIAP policy online. and to obtain a value of evaluation to measure the suitability of the policy formulation process until the start of the implementation process to achieve the expected goals by SIAP policy online. Cooperation with the education ministry who served as a implementor PT.Telkom to create a support system performance of ministries of education and educational institutions to accommodate the needs of the educational administrative policy making online SIAP decided that the policy should be implemented by all national educational institutions are no exception in the city of Malang. support of his net SIAP policy online , which is also working with the city education office were unfortunate to run the online SIAP policy in educational institutions in the malang city.

In the implementation of the required policies online SIAP of every actor who plays a role. namely the Department of Education in Malang, Malang educational institutions and also PT.TELKOM that the synergy of coordination in the implementation of online SIAP in Malang. In addition to improving the quality of education for the entire school in Malang, it must follow the rules and procedures for implementing the policy SIAP online.

Keywords: public policy, evaluation of policy implementation, information technology

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Implementasi Kebijakan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) Studi Kasus Di Pemerintah kota malang”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir diajukan untuk memnuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Adminitansi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Bambang Supriyono, M.S. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Shobaruddin, MA. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini .
4. Bapak uripan, selaku account manager yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam pelaksanaan penelitian dikantor PT.Telkom malang.
5. Bapak Delrizki Lutfi selaku Manager Marketing & Support Division yang turut membantu dalam pelaksanaan penelitian di PT.Telkom malang.
6. Ibu Tutik Sri Astuti selaku account manager yang turut membantu pengumpulan data di lapangan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	15
1. Pengertian Administrasi	15
2. Pengertian Administrasi Publik	17
3. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	19
B. Kebijakan Publik.....	20
1. Pengertian Kebijakan Publik	20
2. Proses Kebijakan Publik	22
3. Formulasi kebijakan publik	25
4. Implementasi Kebijakan Publik	27
5. Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik	29
6. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik	30
7. Model-Model Evaluasi.....	31
C. Elektronik Government	34
1. Pengertian Elektronik Government	34
2. Tujuan Elektronik Government	36
3. Manfaat Elektronik Government	37
D. Sistem Informasi	38
1. Pengertian Sistem Informasi	38
2. Sistem Informasi Managemen	40
3. Konsep Pokok Sistem Informasi Managemen	41
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	

atau ICT Di Bidang Pendidikan..... 42

E. Pengertian Sistem Administrasi Informasi Pendidikan

(SIAP) *online* 45

1. Sistem Administrasi Informasi Pendidikan (SIAP) *online* 45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian50

B. Fokus Penelitian50

C. Lokasi Dan Situs Penelitian 51

D. Sumber Data Penelitian51

E. Teknik Pengumpulan Data 53

F. Instrumen Penelitian 54

G. Analisis Data 54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PT.Telkom indonesia..... 69

1. Profil Perusahaan..... 73

2. Visi, Misi, Corporate Values (5C), Tata Kelola Perusahaan Program dan Struktur Organisasi PT. TELKOM WILTEL MALANG.....75

3. Layanan TELKOM SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) *Online*.....76

B. Penyajian Data..... 80

1. Evaluasi Formulasi atau pengambilan keputusan kebijakan SIAP *online*..... 80



a.	Masalah-masalah yang dihadapi oleh para aktor kebijakan..80	
b.	proses pengambilan keputusan kebijakan atau formulasi kebijakan SIAP <i>online</i>	84
c.	Evaluasi formulasi atau pengambilan keputusan kebijakan SIAP <i>online</i>	88
2.	Implementasi kebijakan SIAP <i>online</i> di kota Malang.....	92
a.	Proses Proses implentasi kebijakan SIAP <i>online</i> di kota Malang.....	92
b.	Prosedur implementasi kebijakn SIAP <i>online</i> dikota Malang.....	99
3.	Evaluasi implementasi kebijakan SIAP <i>online</i> dikota Malang.....	109
a.	Evaluasi implementasi kebijakan SIAP <i>online</i> terhadap lembaga pendidikan dikota Malang.....	109
b.	Evaluasi implementasi kebijakan SIAP <i>online</i> terhadap PT.TELKOM WILTELMalang.....	115
C.	PEMBAHASAN.....	118
1.	Evaluasi formulasi Pengambilan keputusan atau kebijakan SIAP <i>online</i> di kota Malang.....	118
a.	Masalah-masalah yang di hadapi oleh para aktor kebijakan.....	118
b.	Proses pengambilan keputusan atau formulasi kebijakan SIAP <i>online</i>	121
c.	Evaluasi formulasi atau pengambilan keputusan kebijkan SIAP <i>online</i>	124
2.	Proses implentasi kebijakan SIAP <i>online</i> di kota Malang.....	127
a.	Proses implentasi kebijakan SIAP <i>online</i> di kota Malang.....	127
b.	Prosedur implementasi kebijakan SIAP <i>online</i> di kota Malang.....	129

3. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP <i>online</i> di kota Malang.....	133
a. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP <i>online</i> terhadap lembaga pendidikan kota Malang.....	134
b. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP <i>online</i> terhadap PT.TELKOM WILTEL Malang.....	136

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140

GLOSARI.....	142
---------------------	------------

LAMPIRAN.....	144
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA



Daftar Tabel

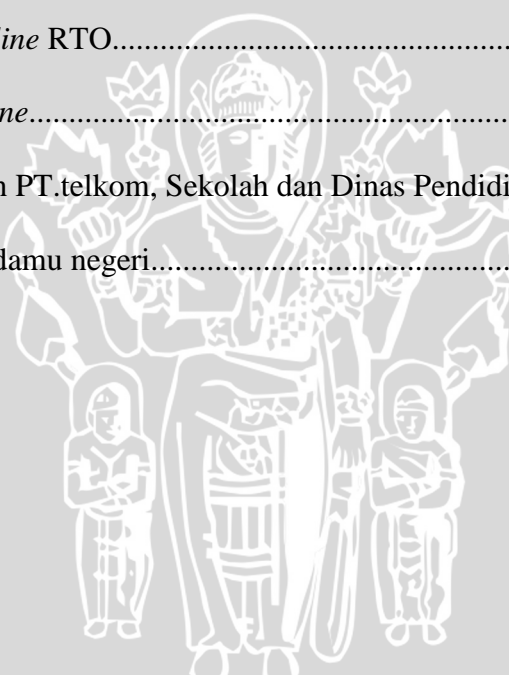
Halaman

Tabel 1. Konsep dan Alur Sumber Data.....	65
---	----



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan	23
Gambar 2. Prioritas perumusan masalah dalam analisis kebijakan	26
Gambar 3. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi.....	36
Gambar 4. Metodologi Penelitian.....	63
Gambar 5. Tabel Paket Layanan Internet Pendidikan.....	78
Gambar 6. Pricing Layanan Internet Pendidikan.....	79
Gambar 7. Alur Sistem PSB <i>online</i> RTO.....	93
Gambar 8. Arsitektur SIAP <i>online</i>	98
Gambar 9. Infrastruktur jaringan PT.telkom, Sekolah dan Dinas Pendidikan.....	103
Gambar 10. Tampilan log in padamu negeri.....	104



DAFTAR LAMPIRAN

Nama	Lampiran
Dokumentasi.....	Lampiran 1
Daftar Panduan Wawancara.....	Lampiran 2
Surat layanan padamu negeri program pemetaan mutu pendidikan.....	Lampiran 3
Surat tugas pelaksanaan layanan untuk pemetaan mutu pendidikan 2013.....	Lampiran 4
Surat balasan penelitian.....	Lampiran 5



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam konteks studi implementasi kebijakan yang dibicarakan disini tentu saja kebijakan selalu dikaitkan dengan kepentingan publik, karena "*Public Policy is what public administration implement*", sebagaimana yang dikatakan oleh Henry (2004:305). Pada konteks publik, kebijakan dalam berbagai literatur dimaknai sebagai "suatu perangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik" atau untuk memecahkan permasalahan publik sebagaimana yang didefinisikan oleh James A. Anderson sebagai "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" Anderson (1994:3), dan Chandler & Plano : "kebijakan Publik adalah pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public dan pemerintahan", serta Peterson "Kebijakan publik secara umum dapat dilihat sebagai tindakan pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap "siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana" Peterson (2003:1030). Oleh karena itu Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk

melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Sebagai *problem solving* maka kebijakan publik merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh para aktor kebijakan ini. Dimana para aktor kebijakan ini memiliki masalah-masalah sendiri yang kemudian dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka akan menjadi *problem solving* dari masalah yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan kebijakan publik menurut hukum adalah sebagai sesuatu yang mengikat dan memaksa demi tercapainya tujuan. Hal ini dapat dielaborasi mulai dari hukum (kebijakan publik) yang paling tinggi yaitu konstitusi/UUD 1945 sampai peraturan yang rendah yaitu peraturan daerah atau PERDA. Pemahaman atas kebijakan publik ini adalah untuk memastikan fungsi dari kebijakan publik itu sendiri yang menurut pendekatan hukum adalah untuk memastikan keefektifan suatu kebijakan publik dalam menjaga HAK warga negaranya untuk tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum. Jadi kebijakan publik menurut pendekatan hukum ini yaitu untuk memastikan keefektifan kebijakan publik dalam menjaga hukum yang berlaku.

Sedangkan kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi

dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nungroho 1-7:2004). Dalam pembuatan kebijakan publik juga terbagi menjadi tahap-tahap seperti yang diungkapkan William Dunn (1998:24) yaitu:

1. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
2. Formulasi kebijakan.
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.
3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan.
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan.
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya dalam tahap evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan

publik. Oleh karena itu evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu "fenomena" di dalamnya terkandung pertimbangan nilai *value judgment* tertentu. (Mustopadidjaja, 2002:45). Kegiatan evaluasi ini dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyelesaian, supervisi, kontrol dan pemantauan (Samodra Wibawa, 1994:8)

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan publik maka evaluasi itu bisa dibagi lagi menjadi dua yaitu: 1. Evaluasi implementasi kebijakan dan 2. Evaluasi dampak kebijakan. evaluasi pada implementasi kebijakan adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk menilai keberhasilan kebijakan pada tahap implementasinya atau pada tahap pelaksanaannya, sedangkan evaluasi dampak kebijakan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai dampak yang ditimbulkan baik dampak yang sudah diprediksikan maupun yang tidak diprediksikan.

Dalam kebijakan SIAP (sistem informasi administrasi pendidikan) *online* ini yang menjadi tema dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan penggunaan teknologi sistem informasi atau ICT *information and communication technology* yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan yang dapat untuk dipergunakan kemudahan administrasi sekolah. Informasi dan komunikasi teknologi memainkan peran penting dalam mendukung kuat manajemen yang efisien dan administrasi di bidang. Teknologi dapat digunakan langsung dari administrasi siswa ke sumber daya administrasi di sebuah Lembaga Pendidikan (Christiana Maki:2008).

Pada era globalisasi ini sistem informasi pendidikan atau ICT memang dianggap sangat dibutuhkan dalam membantu administrasi pendidikan, namun dengan perkembangan zaman maka teknologi informasi pendidikan yang dulunya hanya digunakan untuk kemudahan administrasi pendidikan kini berkembang dan menghasilkan fungsi yang lain. (Ben-Zion Barta et al : 1995) mengungkapkan teknologi biaya efektif dikombinasikan dengan fleksibilitas dalam kegiatan pembelajaran dan administrasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi komputer dapat digunakan secara luas untuk administrasi pendidikan. Berikut adalah beberapa daerah dimana komputer dapat digunakan untuk administrasi pendidikan yang efektif yaitu:

1. Administrasi umum
2. *Payroll* dan akuntansi keuangan
3. Administrasi data siswa
4. *Management* persediaan
5. Personil catatan pemeliharaan
6. Sistem perpustakaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh Lembaga Pendidikan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi dan *management* pendidikan. Selama ini pendidikan Di Indonesia belum mampu menciptakan sistem pendidikan yang baik sehingga pengawasan sistem pendidikan dari Dinas Pendidikan pusat kepada daerah tidak terlaksana dengan baik. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini merupakan sistem yang tidak

mudah diawasi dan di evaluasi sehingga menimbulkan perbedaan atau tidak meratanya sistem pendidikan yang di berikan antar daerah.

Dalam era pembangunan teknologi informasi yang semakin maju integrasi sistem pendidikan bisa diciptakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tekonologi informasi ini bisa digunakan untuk menghubungkan dinas-dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan melakukan pengawasan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi administrasi lembaga pendidikan. Untuk merealisasikan ini maka dibutuhkan operator yang menangani tentang teknologi informasi di sekolah. . Maki (2008) menyatakan bahwa TIK memainkan peran penting dalam manajemen yang efisien dan administrasi di bidang pendidikan teknologi dapat digunakan dari administrasi mahasiswa (yaitu, catatan siswa) ke berbagai sumber daya administrasi di sebuah lembaga pendidikan. Namun tidak hanya di tingkat perguruan tinggi namun pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Voogt dan Knezek (2008) mengamati bahwa perkembangan teknologi komputer dari pengolahan informasi komunikasi pendukung ditambah potensinya untuk pendidikan. Maka masyarakat kita tanpa terkecuali dalam transisi menuju masyarakat informasi karena dampak besar teknologi ini dalam segala aspek kehidupan membutuhkan susatu sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi khususnya dibidang pendidikan. Dengan adanya E-

Administrasi yang menggunakan teknologi informasi dan internet maka kebutuhan akan pembangunan sistem informasi di lembaga pendidikan ini menjadi semakin menuntut pemerintah untuk menciptakan peraturan tentang pemanfaatan teknologi informasi di lembaga pendidikan.

Seperti pemerintah Kenya yang menerapkan sistem *E-government* yang membuka jalan penerapan teknologi informasi di kantor-kantor yang kemudian membuat kebijakan tentang pemanfaatan teknologi informasi ke dalam Lembaga Pendidikan. Dalam penerapan pendidikan ini juga bisa menciptakan pendidikan, dan lembaga pelatihan akan memiliki peran penting dalam menyebarkan keterampilan penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat luas (MOEST,2005).

Penerapan *e-government* merupakan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Hadirnya Inpres No. 3 tahun 2003 menuntut setiap lembaga/instansi publik untuk mengimplementasikan *e-government* dalam tata kelola pemerintah. Di Indonesia E-government ini Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile

computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improve interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management.. penggunaan teknologi informasi oleh aparat pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. TI memberikan banyak manfaat di bidang perbaikan pelayanan pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. (World Bank Group,2001).

Tingkat *urgensi* sistem pendidikan yang mampu menghubungkan daerah dengan pusat agar memungkinkan bagi lembaga- lembaga pendidikan dengan Dinas Pendidikan ini berkomunikasi dan juga melakukan pengawasan ini menjadi prioritas bagi pemerintah daerah Jawa Timur untuk menciptakan kebijakan publik yang mampu mengatasi masalah sistem pendidikan yang dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Pemerintah Jawa Timur dalam menanggapi masalah sistem pendidikan yang belum terciptanya sistem yang memanfaatkan teknologi informasi ini mengeluarkan kebijakan tentang pembangunan sistem pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu kebijakan SIAP *Online* (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) *Online*. SIAP (Sitem Informasi Administrasi Pendidikan) *online* menurut FAQ (*Frequency Ask Question*) dari PT. TELKOM WILTEL Malang Adalah layanan sistem informasi dan aplikasi pendidikan *online* yang dapat menghubungkan komunikasi orang tua, guru, siswa, sekolah dan Dinas Pendidikan secara terpadu dan akuntable yang dapat memajukan dunia

pendidikan di Indonesia. Akses layanan yang ada di dalam SIAP *online* ini terdiri dari:

1. SIAPKU (SIAP Komunitas)
2. SIAP DINAS *Online*
3. SIAP PPDB *Online*
4. SIAP SEKOLAH *Online*
5. SIAP GURU SEKOLAH *Online*
6. SIAP SISWA *Online*
7. SIAP ORTU *Online*

Keuntungan dari kebijakan SIAP *online* adalah Dengan Menggunakan Siap *Online*, para pengguna dapat melakukan komunikasi secara transparan seperti, orang tua bisa memonitoring aktifitas anaknya (siswa), guru bisa berkomunikasi *online* diluar ruang kelas dengan siswa dan orang tua, serta siswa bisa mengakses data dan informasi akademik secara online.

Kebijakan SIAP *online* yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk seluruh Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Timur untuk menggunakan progam SIAP *online* dalam sistem transparansi administrasi sekolah.

Contoh dari salah satu jenis aplikasi dari SIAP *online* yaitu untuk pelaporan dana BOS (biaya operasioanal sekolah), maka Dinas Pendidikan di seluruh

provinsi Jawa Timur menggunakan layanan Telkom SIAP *Online* yang salah satu tujuannya sebagai layanan untuk pelaporan dana BOS di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan Permendikbud Nomor 76 tahun 2012 (Juknis Pelaporan Penggunaan Dana BOS untuk tahun 2013). Sedangkan MOU Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan PT. TELKOM WILTEL Malang ini di buat pada tanggal 22 februari 2013 yang secara keseluruhan berisi tentang TELKOM mendukung Dinas pendidikan Jawa Timur untuk melaksanakan implementasi dan pengembangan sistem informasi manajemen sekolah se – Jawa Timur seperti sistem pelaporan dan monitoring dana BOS, sistem aplikasi PPDB (penerimaan peserta didik baru), dan sistem bahan pembelajaran secara *online* dan juga TELKOM mendukung Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam menyediakan akses internet di seluruh sekolah dasar dan menengah se – Jawa Timur serta TELKOM bersama – sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur mengembangkan dan melaksanakan implementasi bahan pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh entitas sekolah melalui layanan internet.

Dalam perwujudan kebijakan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur ini maka Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mengeluarkan surat edaran yang dibuat pada tanggal 27 maret 2013 untuk disebarkan ke seluruh Dinas Pendidikan di kota maupun kabupaten di Jawa Timur yang berisikan tentang dalam rangka membangun sistem aplikasi pendataan dan pelaporan *online* bidang pendidikan Jawa Timur, perlu progam aplikasi interkoneksi antara Dinas Pendidikan provinsi dengan Dinas Pendidikan kota/kabupaten serta Lembaga Pendidikan

(jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan MTS) maka untuk memenuhi layanan tersebut maka akan dibagikan akun (*username* dan *password*) kepada Dinas Pendidikan kota/kabupaten yang akan di bagikan ke Lembaga Pendidikan dan juga penunjukan administrator sekolah untuk pemegang login dan juga oprator SIAP *online*.

Dalam pengimplementasian kebijakan SIAP *online* ini, pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengajak PT.TELKOM untuk bekerjasama dalam pembangunan server koneksi internet yang nantinya akan digunakan untuk akses SIAP *online*. Karena dalam perwujudan kebijakan SIAP *online* ini semua Lembaga Pendidikan harus mempunyai akses internet melalui *speedy*.

Sebelum kebijakan itu ditetapkan maka terlebih dahulu ada sebuah proses pengambilan kebijakan sehingga kebijakan itu ditetapkan oleh pemerintah. Wibawa (1994:20) Proses pengambilan kebijakan melibatkan berbagai aktor, dan setiap aktor mengusulkan kebijakan yang berusaha memenuhi atau memuaskan kepentingannya, maka kebijakan yang pada akhirnya dibuat adalah salah satu diantara semua usulan dari para aktor tersebut. Menurut Anderson (1979:52-91). tahap-tahap proses pengambilan kebijakan terdiri dari: masalah kebijakan, pengagendaaan dan perencanaan kebijakan dan terakhir penetapan kebijakan.

Selama proses pengimplementasian kebijakan SIAP *online* ini belum ada evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi jalanya kebijakan ini. Evaluasi kebijakan merupakan hal yang penting untuk mengetahui kekurangan

yang ada selama jalannya implementasi kebijakan tersebut atau yang disebut *ongoing* evaluasi. Evaluasi tersebut tidak hanya terjadi pada saat akhir saja, tetapi pada setiap proses, baik formulasi maupun implementasi. Evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik. William N. Dunn (1999:24), Samodra Wibawa (1994:15) Evaluasi kebijakan sering kali diartikan secara sempit sebagai “evaluasi dampak kebijakan”. Sedangkan bagi ilmuwan politik, evaluasi diartikan sebagai memahami proses politik disekitar proses kebijakan. Namun evaluasi pada akhirnya memiliki tujuan ganda yakni: (a) memberikan informasi kepada (para) pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung atau dijalankan dan (b) menunjukkan faktor-faktor yang dapat dimanipulasi (diubah) agar supaya diperoleh pencapaian hasil secara lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.

Evaluasi kebijakan ada dua jenis, yang pertama evaluasi dalam proses implementasi, dan yang kedua yaitu evaluasi dampak kebijakan, Samodra Wibawa (1994:22). Dalam penelitian ini peneliti terfokus pada penelitian evaluasi pada tahap implementasi kebijakan. Evaluasi implementasi kebijakan menurut model Grindle yang menyatakan keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Menurut Grindle dalam Samodra Wibawa (1994:22) , isi kebijakan mencakup; (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang

diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) pelaksana program, (6) sumberdaya yang digunakan.

Selain evaluasi pada tahap implementasi kebijakan SIAP *online*, peneliti akan mengevaluasi pendekatan dan model kebijakan yang digunakan Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam menciptakan kebijakan ini. Samodra Wibawa (1994), menerangkan tentang jenis-jenis pendekatan dan model kebijakan yaitu: (a) pendekatan kelembagaan, (b) pendekatan sistem, (c) model rasioanal, dan (d) model inkremental.

Dengan sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi seperti yang menjadi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini peneliti tertarik untuk meneliti evaluasi dari kebijakan SIAP *online* yang diwajibkan untuk seluruh Lembaga Pendidikan di Jawa Timur khususnya di kota Malang dengan judul “Evaluasi Kebijakan SIAP *online* Di Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Evaluasi Kebijakan SIAP *online* Di Pemerintah Kota Malang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana evaluasi formulasi atau perumusan kebijakan SIAP *online* dalam menjawab permasalahan publik?
2. Bagaimana implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang?
3. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi formulasi atau pengambilan kebijakan SIAP *online* di kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi dari kebijakan SIAP *online* di kota Malang.
3. Untuk menganalisis evaluasi dari implementasi kebijakan SIAP *online* di lembaga pendidikan di kota Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Kontribusi akademis
 - a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi administrasi publik terutama dalam pengembangan kebijakan publik dalam Lembaga Pendidikan di kota Malang sebagai bagian dari administrasi publik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, tambahan wawasan dan memberikan informasi bagi peneliti berikutnya.
2. Kontribusi praktis
 - a. Bagi peneliti sebagai wahana dalam peningkatan pengetahuan dan kreatifitas berfikir dalam menganalisa keadaan dilapangan yang disesuaikan dengan teori-teori yang telah diterima dan dipelajari dalam perkuliahan.
 - b. Bagi pemerintah Jawa Timur yaitu Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur memberikan informasi dan pemikiran dalam pengevaluasian kebijakan SIAP *online* bagi Lembaga Pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ADMINISTRASI PUBLIK

1. Pengertian administrasi

Administrasi memperoleh kekuasaannya dari rakyat melalui perwakilan karena dalam suatu negara yang demokratis rakyatlah yang merupakan sumber dari semua kekuasaan. Pendapat A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991:9) menunjukkan variasi batasan tentang administrasi. Administrasi menurut pendapat A. Dunsire dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Administrasi dalam proses pelaksanaan kegiatannya bermotif pemberiann servis yang efisien, ekonomis, dan efektif kepada setiap warga negara yang harus dialayaninya. Pendapat Trecker yang dikutip juga oleh Donovan dan Jackson (1991:10) bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama-sama oarang dan materil melalui koordinasi dan kerjasama. Adapun tugas-tugas administrasi meliputi

kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan, dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan, mengamankan sumberdaya keuangan, fasilitas, staff dan berbagai bentuk dukungan lainnya, mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur dan prosedur organisasi, menggunakan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan, pengembangan prosedur, dan prinsip-prinsip operasi, mengevaluasi program, dan kepegawaian secara berkesinambungan, dan membuat perencanaan serta melakukan penelitian, dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi pelayanan manusia.

Batasan-batasan diatas tersebut secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan atau yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur file, membuat laporan administratif ke pihak atasan dan lain sebagainya. Dan agar lebih meyakinkan lagi, dapat dilihat definisi administrasi dalam *The Publik Adminitration Dictionary* (chandler dan plano, 1988:3)

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan oragnisasi agar menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien dan ekonomis. Yang didalam pelaksanaan adminitration juga didukung oleh komponen-komponen dalam organisasi.

2. Pengertian administrasi publik

Administrasi publik proses dimana sumber daya dan personel publik yang diorganisirkan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik, serta administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affair* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan (Chandler dan Plano, 1988:29).

Administrasi berkewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama karena warga negara itu dimata hukum berkedudukan yang sama. Tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi “administrasi publik” karena administrasi publik merupakan suatu proses yang kompleks Lemay (2002:10). Menurut Stillman II dalam Yeremias T Keban (2008:45) bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi dan bahkan sulit untuk disepakati, variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Dimock, Dimock dan fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, attau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang barang dan pelayanan publik
- b. Barton dan Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh

- pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan publik.
- c. Starling melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik.
 - d. Nigro dan Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup tiga cabang yaitu, yudikatif, legislatif dan eksekutif, mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.
 - e. Rosenbloom memberi batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi syarat-mandat pemerintah dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif.
 - f. Nicholas Henry memberikan batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungan dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas maka administrasi publik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata kelola pemerintahan. Yang fokus dari ilmu ini adalah bagaimana administrasi publik ini mampu menyelenggarakan

pelayanan masyarakat, selain itu juga administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan dan penyempurnaan dibidang organisasi publik dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan keuangan.

3. Pengertian administrasi pembangunan

Menurut Siagian (1973:13) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai: *“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).”*

Dari definisi pembangunan menurut Siagian tersebut, maka jelas dapat kita lihat pokok-pokok ide yang tersurat, yaitu adanya suatu proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.

Definisi kerja (*working definition*) dari Administrasi Pembangunan menurut Siagian adalah *“seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.”*

Sedangkan menurut Meadows (1968:86) menjelaskan bahwa *“Development administration can be regarded as the*

publicmanagement of economic and social change in term of deliberate public policy. The development administrator is concerned with guiding change.” (Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Administrator pembangunan mempunyai kaitan dengan memandu perubahan yang dimaksud).

Sementara menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1974:9) mengungkapkan Proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.” Maka dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli maka dapat disimpulkan administrasi pembangunan adalah usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah untuk memandu dalam perubahan sosial dalam perwujudan masyarakat perubahan dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan juga kemudahan dalam administrasi.

B. KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian kebijakan publik

Banyak ahli yang meberikan pengertian yang berbeda tentang kebijakan publik, ketidaksamaan ini dikarenakan karena sudut pandang yang dilihat oleh para ahli dalam melihat suatu fenomena dan prespektif yang berbeda dari kondisi disuatu negara. Friedrich (dalam Solichin Abdul Wahab, 1991:13) mengemukakan bahwa kebijakan

adalah sesuatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan arti kebijakan menurut pendapat Graycar, yang dikutip Donovan dan Jackson (dalam Keban, YT, 2004:55), *policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan diapandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat menegtahui apa yang diaharapkan darinya yaitu progam dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Anderson dalam Islamy (2001:19) mendefinisikan kebijakan negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sebagai implikasi turunan yang timbul dari pengertian kebijakan oleh Anderson tersebut diantaranya:

- a. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang

pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukannya.

- d. Bahwa kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan pemerintah, setidaknya-tidaknya adalah arti positif, didasarkan atau selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dari berbagai uraian yang telah diungkapkan dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan produk yang dihasilkan oleh pemerintah untuk menangani masalah tertentu yang bersifat positif, selain itu kebijakan juga merupakan suatu produk yang berupa rekomendasi-rekomendasi dalam menangani suatu problem yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Proses kebijakan publik

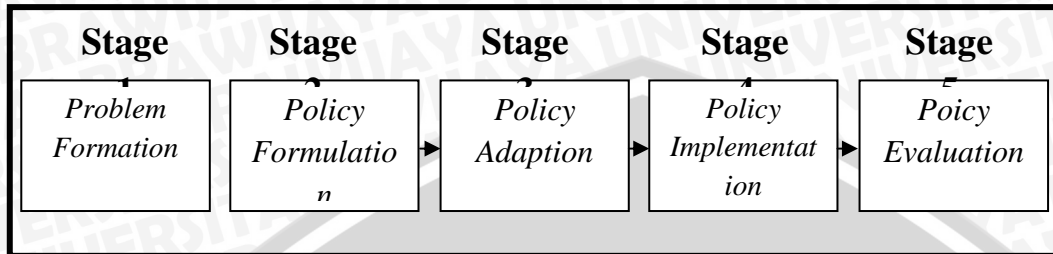
Menurut Kent E. Portney memandang kebijakan publik sebagai suatu proses politik yang terangkai dari beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut yakni:

1. Permunculan dan pembentukan masalah kebijakan (*problem formulation*).
2. Perumusan kebijakan (*policy formulation*).
3. Penerimaan dan pengadopsian kebijakan (*policy adaption*).
4. Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*).
5. Penilaian dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik tersebut digambarkan seperti gambar 1 Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan.

Gambar 1.

Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan



Sumber: Portney (1986:5)

Keterangan:

Tahap 1. *Problem formulation*

Pada tahap ini para perumus kebijakan menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Tahap 2. *Policy formulaion*

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. masalah-maslah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan maslash terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan masalah untuk masuk ke dalam *problem formation*, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan

masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Tahap 3. *Policy adaption*

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas perumus kebijakan.

Tahap 4. *Policy implementation*

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain ditentang oleh para pelaksana.

Tahap 5. *Policy evaluation*

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki

masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

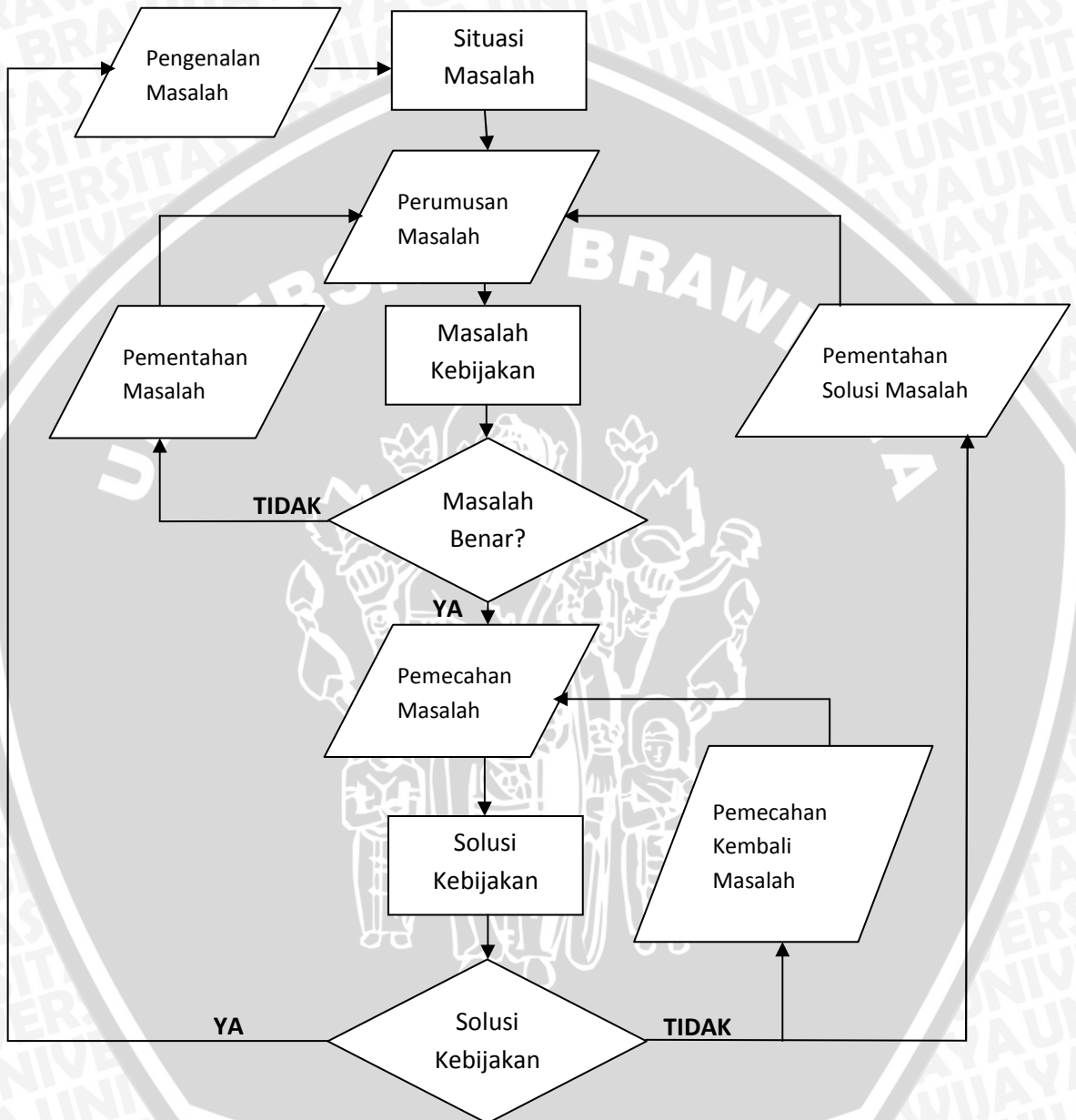
Proses kebijakan publik memang merupakan tahap dimana kebijakan itu dirumuskan sampai pada kebijakan itu dievaluasi. Sepanjang perjalanan proses kebijakan tersebut terdapat tahap-tahap yang sangat menentukan hasil kebijakan yang akan dihasilkan. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa dalam pembuatan kebijakan publik syarat akan nilai-nilai kepentingan yang dimasukkan dalam rekomendasi-rekomendasi kebijakan. namun dengan proses kebijakan publik ini akan mampu merumuskan kebijakan yang mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi publik.

3. Formulasi kebijakan publik

Perumusan masalah atau formulasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses pembuatan kebijakan, karena pada tahap ini para aktor pelaku kebijakan dituntut untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendapatkan formulasi yang tepat untuk memecahkan masalah. Seperti yang William N. Dunn (1998:210) perumusan masalah merupakan sistem petunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua fase kebijakan. memahami masalah kebijakan adalah sangat penting, karena para analisis kebijakan kelihatanya lebih sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah daripada karena memperoleh solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.

GAMBAR 2

Prioritas perumusan masalah dalam analisis kebijakan



(sumber william N. Dunn 1998:12)

Masalah-masalah kebijakan adalah produk pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi ini oleh para analisis. Dengan begitu, apa

yang kita alami merupakan situasi masalah, bukan masalah itu sendiri, yang seperti atom atau sel, merupakan suatu konstruksi koseptual.

Dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan publik merupakan fase dimana para pembuat kebijakan harus mengetahui masalah-masalah publik bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagaian dari seluruh ketidakpuasan masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu formulasi kebijakan merupakan perumusan *problem solving* dari masalah publik.

4. Implementasi kebijakan publik

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. implementasi tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Sedangkan menurut Islamy (1994:102), kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis undang-undang itu, sehingga memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output). Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan

dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan ini tidak serta merta ketika kebijakan dijalankan maka yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang menjalankan atau melaksanakan kebijakan maka kebijakan itu akan mampu mencapai apa yang diinginkan atau yang menjadi tujuan. Padahal Grindle (1980) yang dikutip Wahab (2005:59) menyebutkan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Selain itu Pressman dan Wildavsky yang dikutip Wahab (2005:65) mengingatkan bahwa proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapatkan perhatian seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut berlangsung mulus tanpa hambatan. Bahkan Udoji (1981) dalam Wahab (2005:59) dengan tegas mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file folders unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Dari beberapa pendapat dari para ahli di atas maka implementasi kebijakan adalah sebuah aspek penting dari serangkaian proses kebijakan. Implementasi kebijakan juga bisa berupa pertauran-pertauran serta perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya juga kebijakan publik ini bukan hanya sekedar permujudan yang riil tapi juga diharapkan yaitu dampak dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan juga menyangkut kepentingan-kepentingan dan keputusan-keputusan politik maka dari itu implementasi juga sering menjadi bahan untuk apa dan siapa mendapat apa.

5. Evaluasi formulasi kebijakan

Pembuatan keputusan (*Decision Making*) berada diantara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. akan tetapi kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain. Pembuatan keputusan mempengaruhi pada implementasi kebijakan dan implementasi kebijakan pada tahap awal akan mempengaruhi implementasi berikutnya. Proses pembuatan keputusan kebijakan itu adalah sebuah proses. Keputusan adalah suatu proses dan keputusan merupakan petunjuk arah atau percobaan awal yang akan mengalami revisi yang lebih spesifikasi pada tahap berikutnya.

Perumusan kebijakan merupakan proses yang rumit, beberapa metode untuk mempelajarinya telah dikembangkan oleh para ilmuwan yang menaruh minat terhadap kebijakan publik suatu metode yang populer membagi perumusan kebijakan kedalam tahap-tahap dan kemudian menganalisa masing-masing tahap tersebut. Pertama-tama dipelajari bagaimana masalah timbul dan masuk kedalam agenda pemerintah, kemudian bagaimana

masyarakat merumuskan masalah tersebut untuk mengambil tindakan, kemudian sikap apa yang diambil oleh badan legislatif atau lembaga lainnya, kemudian bagaimana para pemimpin menerapkan kebijakan itu, dan akhirnya bagaimana kebijakan tersebut di evaluasi. (Winarno, 2002. h.67)

6. Evaluasi implementasi kebijakan publik

Meskipun kebijakan dirancang dengan sangat memperhatikan proses pembuatan kebijakan sampai implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan yaitu untuk bisa memecahkan masalah-masalah, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya kebijakan bisa berjalan tidak sesuai yang telah direncanakan, oleh karena itu kegiatan evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi sepanjang proses implementasi kebijakan.

Wibawa (1994:8) kegiatan evaluasi ini dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyeliaan, supervisi, kontrol dan pemantauan. Pelaku utama sudah jelas adalah pemerintah. Akan tetapi seringkali pelaku yang lain seperti lembaga penelitian yang independen, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan evaluasi.

Dunn (1984:358) dipihak lain, evaluasi dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan, keduanya disebut evaluasi summatif dan formatif. Lebih lanjut, evaluasi terhadap aspek kedua tadi disebut sebagai evaluasi implementasi dan evaluasi dampak kebijakan. seperti juga yang dikutip oleh Nugroho, evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut timing evaluasi,

yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi sebelum pelaksanaan disebut sebagai sumatif. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan atau evaluasi *impact* atau pengaruh (*outcome*) kebijakan. Nugroho (2004.b. h.194)

ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Isi kebijakannya mencakup 1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) kedudukan pembuat kebijakan, 5) siapa pelaksana program dan, 6) sumber daya yang dikerahkan. (Grindle, 1980 dalam Samodra Wibawa, 1994:22)

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa meskipun dalam proses formulasi kebijakan telah dirumuskan dengan sebaik-baiknya namun tidak dapat dipungkiri ketika dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini bisa datang dari kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, kedudukan pembuat kebijakan maupun dari sumberdaya pelaksana kebijakan.

7. Model-model evaluasi

Ada beberapa model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang telah berjalan. Meskipun memiliki perbedaan antar model-model tersebut namun ada persamaan antara model-model tersebut dalam mengumpulkan data dan informasi untuk

mengevaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. menurut Stephen Isaac dan William B. Michael (1984:7) model-model evaluasi dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu:

1. *Goal Oriented Evaluation*

Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian yang terus-menerus ini menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta program serta efektifitas temuan-temuan yang dicapai oleh sebuah program. Salah satu model yang bisa mewakili model ini adalah *discrepancy* model yang dikembangkan oleh Provus. Model ini melihat lebih jauh tentang adanya kesenjangan (*Discrepancy*) yang ada dalam setiap komponen yakni apa yang seharusnya dan apa yang secara riil telah dicapai.

2. *Decision Oriented Evaluation*

Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa informasi- informasi yang akurat dan obyektif bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program. Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh stufflebeam merupakan salah satu contoh model evaluasi ini. Model CIPP merupakan salah satu model yang paling sering dipakai oleh evaluator. Model ini terdiri dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang merupakan singkatan dari *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*. Evaluasi konteks (*context evaluation*) merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (*rationale*) dalam penentuan tujuan (Baline R. Worthern & James R Sanders : 1979) Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan (*goal*). Evaluasi input (*input evaluation*) merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi proses (*process evaluation*) diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan balik (*feedback*) bagi orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program tersebut Evaluasi Produk (*product evaluation*) merupakan bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input. Dalam proses ini, evaluasi produk

menyediakan informasi apakah program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan akan dihentikan.

3. *Transactional Evaluation*

Dalam model ini, evaluasi berusaha melukiskan proses sebuah program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat dalam program tersebut.

4. *Evaluation Research*

Sebagaimana disebutkan diatas, penelitian evaluasi memfokuskan kegiatannya pada penjelasan dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan strategi instruksional.

5. *Goal Free Evaluation*

Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini yakni *Goal Free Evaluation Model* justru tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan program sebagaimana model *goal oriented evaluation*. Yang harus diperhatikan justru adalah bagaimana proses pelaksanaan program, dengan jalan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaannya, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif.

6 *Adversary Evaluation*

Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh lembaga hukum. Dalam prakteknya, *model adversary* terdiri atas empat tahapan yaitu :

1. Mengungkapkan rentangan isu yang luas dengan cara melakukan *survey* berbagai kelompok yang terlibat dalam satu program untuk menentukan kepercayaan itu sebagai isu yang relevan.
2. Mengurangi jumlah isu yang dapat diukur.
3. Membentuk dua tim evaluasi yang berlawanan dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk berargumentasi.
4. Melakukan sebuah dengar pendapat yang formal. Tim evaluasi ini kemudian mengemukakan argument-argument dan bukti sebelum mengambil keputusan.

Dari uraian tersebut telah di jelaskan bahwa dalam mengevaluasi sebuah kebijakan itu terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk menentukan arah perbaikan suatu kebijakan. dan juga untuk melihat perkembangan kebijakan dalam proses berjalanya suatu kebijakan.

C. ELEKTRONIK GOVERNMENT

1. Pengertian *elektronik government*

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.

Sementara pemerintah federal Amerika Serikat dalam Indrajit (2002:3) mencoba memberikan definisi e-government secara ringkas, jelas, dan padat, yaitu: “*E-government refers to the delivery of government information and service online through the internet or other digital means*” (E-government berkenaan dengan penyampaian informasi dan pelayanan pemerintah secara online atau melalui internet atau media digital lainnya).

Sedangkan pemerintah Selandia baru seperti yang dikutip oleh Indrajit (2002:4) melihat *E-government* sebagai sebuah fenomena sebagai berikut: “*E-Government is a way for government information and service, to improve the quality of the service and to provide greater opportunities to participate in our democratic and processes*” (*E-Government* adalah suatu cara bagi instansi pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyediakan akses masyarakat yang lebih nyaman terhadap informasi dan pelayanan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk

memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi di dalam institusi dan proses demokrasi).

Sedangkan negara Italia mendefinisikan *E-Government* dalam Indrajit (2002:4), dimana *E-Government* digambarkan sebagai berikut: *The use of modern ICT in the modernization of our administration, which compromise the following classes of action.* (penggunaan ICT modern dalam memodernisasikan sistem administrasi terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut) :

1. *Computerization designed to enhance operational efficiency within individual departments and agencies* (komputerisasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan antar departemen dan badan);
2. *Computerization of services to citizens and firms, often implying integration among the service of different departments and agencies* (komputerisasi pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha meliputi integrasi pelayanan dari beberapa departemen dan badan yang berbeda);
3. *Provision of ICT acces to final users of government services and information* (penyediaan akses ICT kepada para pengguna layanan dan informasi pemerintah).

Dari beberapa pengertian tentang *E-Government* maka bisa disimpulkan bahwa *E-Government* adalah suatu konsep interaksi pemintah dengan kalangan usaha dan juga dengan masyarakat yang mendayagunakan teknologi informasi komunikasi atau ICT yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

2. Tujuan *Elektronik Government*

Menurut Indarjit (2005:105) paling tidak ada lima hal yang menjadi tujuan diterapkannya *E-Government*, yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan yang terintegrasi kepada setiap warga negara;
2. Mempelancar proses bisnis dan mendayagunakan sumber daya sebaik-baiknya;
3. Menyediakan semua layanan secara elektronik;
4. Memberikan keterampilan dan alat yang memadai bagi staf dan pegawai untuk bekerja secara efisien;
5. Membantu komunitas dalam menggunakan teknologi baru.

Sedangkan menurut Inpres No. 3 tahun 2003, untuk melaksanakan pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai 4 tujuan yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau diseluruh wilayah indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembag pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Pada dasarnya tujuan *E-Government* adalah untuk palaksanaan organisasi yang lebih baik yaitu agar administrasi pemerintahan dapat dijalankan secara efisien. Serta dengan melaksanakan *E-Government* akan mempermudah saluran komunikasi antar

lembaga serta memperlancar transaksi pelayanan publik yang transparan.

3. Manfaat *Electronik Government*

Beberapa manfaat yang diperoleh dalam penerapan *E-Government* pada pemerintah menurut Inpres no 3 tahun 2003 dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut :

1. *E-Leadership*; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara didalam mengantisipasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi .
2. Infrastruktur jaringan informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
3. Pengelolaan informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengolahan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
4. Lingkungan bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
5. Masyarakat dan sumber daya masyarakat, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Sementara itu Amerika Serikat dan Inggris melalui Gore dan Blair dalam Indrajit (2005:5) telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep *E-Government* bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholdernya*;

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penenrapan konsep *Good Corporate Governance*;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada;
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain dalam proses pengambilan keputusan.

Dari berbagai pendapat tentang pemanfaatan *E-Government* terdapat banyak manfaat dalam pengelolaan organisasi yaitu berkaitan dengan kualitas dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi baik dalam pengolahan data, penyimpanan data sampai penyaluran data untuk masyarakat. Selaian itu juga memberikan kemudahan dalam aspek sumberdaya masyarakat yaitu dengan berkembangnya teknologi informasi maka dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang mampu beradaptasi dalam era globalisasi.

D. SISTEM INFORMASI

1. Pengertian Sistem Informasi

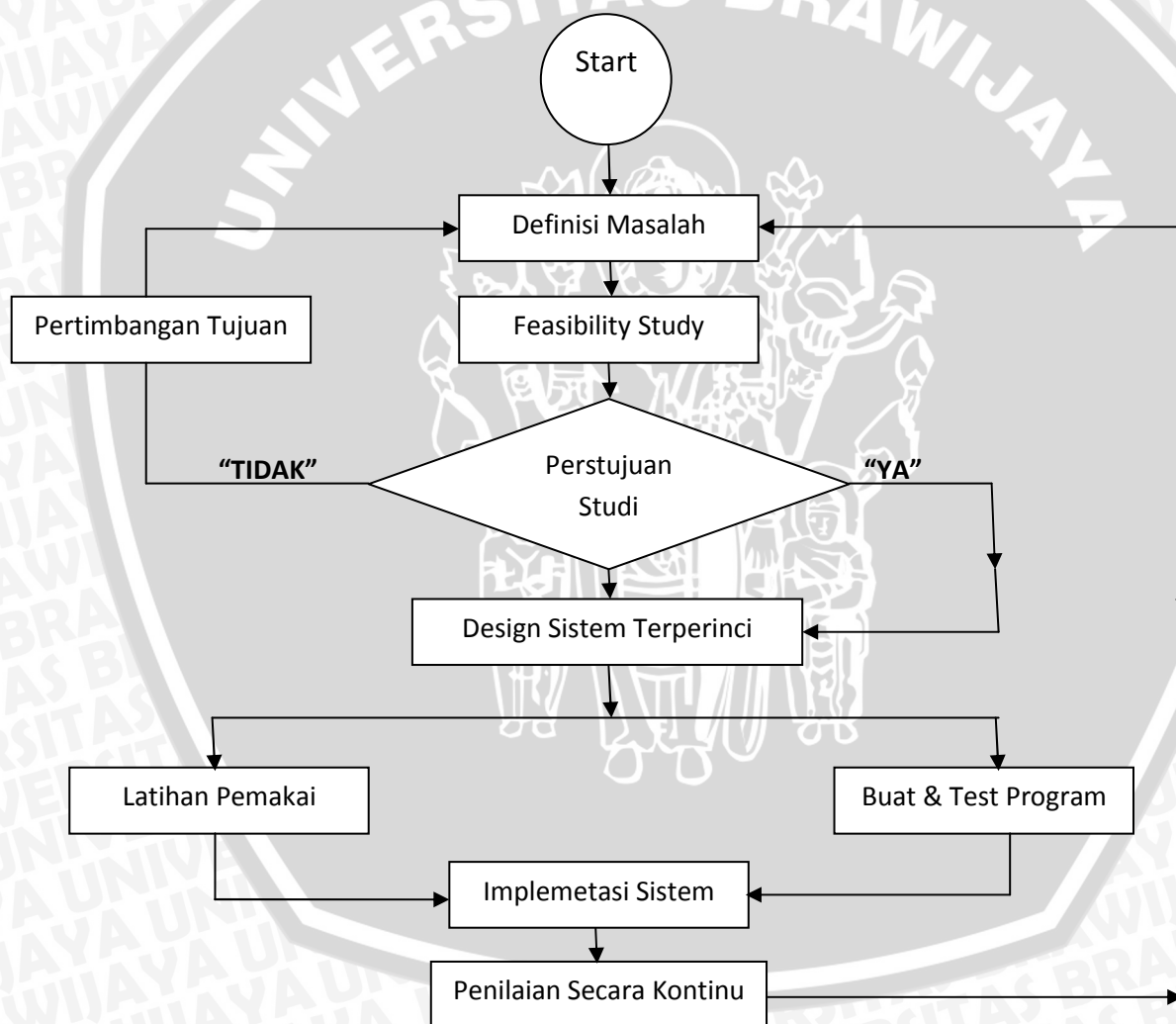
Menurut Siagian (2006), ada enam langkah yang perlu diambil dalam pengembangan Sistem informasi, adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah dalam arti bahwa hakekat daripada masalah informasi dalam organisasi harus disadari pentingnya;
2. Melakukan *feasibility study*. Artinya suatu studi perlu dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana pengembangan sistem informasi itu mungkin dilaksanakan ditinjau dari semua segi permasalahan seperti tenaga kerja, timing yang tepat, penggunaan informasi yang dihasilkan dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan;
3. Hasil *feasibility study* disampaikan kepada pimpinan organisasi untuk diterima atau ditolak. Jika ditolak berarti tujuan sistem informasi itu harus ditinjau kembali. Jika *feasibility study* itu diterima, kegiatan selanjutnya dapat dilakukan.
4. Dengan diterimanya hasil *feasibility study*, langkah selanjutnya ialah menyelesaikan “*system design*” yang terperinci;
5. Diterimanya “*system design*” yang terperinci segera memerlukan pembinaan suatu sistem apresiasi bagi para pemakai bersamaan dengan penyusunan program-program pelaksanaan;

6. Jika langkah kelima telah diambil dengan berhasil, barulah sistem informasi dilaksanakan diikuti oleh suatu penialian yang berkelanjutan supaya sistem informasi itu dapat disempurnakan terus.

Gambar 3.

Kegiatan pengembangan sistem informasi



Sumber: Siagian (2006)

Sistem informasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam organisasi yang mengolah data menjadi bentuk yang lebih

bermanfaat untuk mencapai suatu tujuan. Peranan informasi dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi sangat penting dan strategis. Karena itu pengembangan sistem informasi bisa dikatakan mempunyai peranan yang strategis karena dengan sistem pengembangan informasi akan menentukan berhasil tidaknya sistem informasi dalam suatu organisasi untuk membantu kegiatan-kegiatan managerial.

2. Sistem Informasi Manajemen

Ada beberapa pengertian dan definisi tentang sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut:

Menerut Gordon B. Davis, terjemahan dari Ariwardana (2002), SIM atau sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung bukan hanya operasi tetapi juga mendukung bukannya operasi tetapi juga mendukung proses-proses manajemen.

Selanjutnya Davis menjelaskan lebih terperinci, bahwa setiap SIM akan melaksanakan pengolahan transaksi sebagai salah satu unsurnya, maka sebuah sistem pengolahan data yang agak biasa dapat disebut sebagai SIM bila disertai suatu database sederhana, kemampuan menemukan kemabali (*retrival capabilities*), dan satu atau dua model perencanaan atau keputusan.

Dalam *encyclopedia of management* dijelaskan bahwa: “*management information system are planned, and organized*

approaches to supplying executives with intelligence aids that facilitate the managerial process”.

Sementara Burt Scanlan & J. Bernard Keys mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai berikut: “A MIS (management information system) is a formal system of reporting, classifying, and disseminating information to the appropriate station in organization”.

3. Konsep pokok sistem informasi manajemen

Sistem informasi management berhubungan dengan organisasi dengan manusia sebagai pengolahnya. Oleh sebab itu pemahaman secara komprehensif terhadap sistem keorganisasian berdasarkan komputer harus disertai pula pemahaman terhadap konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian dan nilai informasi.

Menurut Davis (2002), ada beberapa konsep pokok sistem informasi manajemen, yaitu:

1. Konsep informasi
Informasi menambahkan sesuatu pada penyajiannya, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu.
2. Konsep manusia sebagai pengolah informasi
Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar mereka.
3. Konsep sistem
Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang pada pengembangan sistem informasi.
4. Konsep organisasi dan manajemen
Sistem informasi berada didalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam keorganisasian.
5. Konsep pengambilan keputusan
Rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan rasionalitas terhadap potimasi, tetapi juga teori perilaku pengambilan keputusan dalam organisasi.
6. Konsep nilai informasi

Informasi mengubah keputusan dan perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi.

Selanjutnya Davis menjelaskan lebih mendalam, sebuah anggapan yang mendasar menyatakan bahwa sistem informasi menambah nilai suatu organisasi. Informasi dipandang sebagai suatu sumberdaya seperti halnya dengan tanah, buruh, dan modal. Informasi bukan barang bebas, ia harus diperoleh, diolah, disimpan, diambil kembali, dimanipulasi dan dianalisis, didistribusikan dan sebagainya. Sebuah organisasi yang memiliki sistem informasi yang dirancang baik secara umum akan memiliki keunggulan posisi dalam persaingan atas organisasi yang sistemnya lebih lemah.

4. Pemanfaatan teknologi informasi atau ICT atau TIK di bidang pendidikan

Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi atau TIK semakin nyata dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan TIK dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berkualitas yang memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan secara mudah.

Voogt dan Knezek (2008) mengamati bahwa perkembangan teknologi komputer dari pengolahan informasi komunikasi pendukung ditambah potensinya untuk pendidikan Masyarakat kita tanpa kecuali adalah transisi menuju masyarakat informasi, karena dampak besar teknologi ini dalam segala aspek kehidupan. Namun, pentingnya dan

penggunaan TIK di sekolah-sekolah di Kenya berbeda dari satu kabupaten ke yang lain karena sejumlah faktor termasuk tingkat akademik, ekonomi, politik, dan budaya pembangunan.

Bernhardt (2000), Partisipasi Administrator dalam pengembangan profesional sangat penting untuk setiap perubahan yang berarti terjadi karena mereka memiliki peran penting untuk bermain. Data digunakan di sekolah administrasi saat ini berkisar lebih dari beberapa daerah, menginformasikan administrator tentang demografi, proses sekolah, belajar siswa, serta persepsi dan proyeksi.

Sejak pertengahan 1980-an, ruang lingkup dan kecepatan perubahan di seluruh dunia telah dipercepat secara dramatis. Kerja administrator telah berubah dalam organisasi, termasuk sekolah, dari manual dan mekanik untuk pengolahan data elektronik, penyimpanan, output, dan komunikasi semua dilakukan menggunakan teknologi informasi komunikasi atau TIK. Taylor dan Hogenbirk (2001) menunjukkan bahwa tingkat perubahan transformasional mungkin menemukan profesional yang usang dalam profesi mereka sendiri, sehingga negara-negara yang tidak mengintegrasikan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan komponen pendidikan akan tertinggal.

Saiti dan Prokopiadou (2009), dalam penelitian mereka mengenai dampak ICT terhadap administrasi sekolah, menunjukkan bahwa ICT di lingkungan sekolah dapat dianggap sebagai persamaan untuk modernisasi semua organisasi, termasuk sekolah, karena mereka

menyediakan alat bantu teknologi canggih dan aplikasi . Di Yunani, penerapan teknologi baru dalam pendidikan menengah telah meningkat pesat. Ini penerapan ICT memperkuat proses pembelajaran, namun juga memfasilitasi transaksi administrasi.

Selain itu menurut MOEST, (2005), Penggunaan ICT di lingkungan sekolah dianggap menjadi bagian dari modernisasi teknologi luas administrasi dan pendidikan, serta *electronic government (e-government)* dan pembelajaran elektronik (*e-Learning*). Pengenalan aplikasi teknologi inovatif di sekolah terhubung dengan perubahan, bukan hanya pada tingkat belajar mengajar, tetapi juga dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi di sekolah.

Kebijakan dalam pemanfaatan teknologi informasi komunikasi memang harus didukung oleh administrator yang baik, yaitu baik dari Departemen pendidikan, kepala sekolah sampai guru dan administrator atau staff tata usaha disekolah yang mengoperasikan administrasi sekolah. Seperti yang disampaikan oleh . Hallinger (1995:1-4) dalam penelitiannya di Kenya Afrika mengatakan Peningkatan akses internasional untuk TIK juga telah berdampak pada administrasi organisasi sehingga pemahaman tentang bagaimana bentuk budaya baik sifat kepemimpinan dan portabilitas pengetahuan semakin penting untuk kedua akademisi dan profesional di seluruh dunia. Penelitian ini berupaya untuk membangun persepsi pendidikan tentang pentingnya dan sejauh mana administrator menggunakan ICT,

yang sebelumnya tidak pernah dieksplorasi di daerah ini. Temuan akan digunakan untuk merekomendasikan langkah-langkah yang mungkin akan diambil oleh Departemen Pendidikan, manajer sekolah, administrator sekolah dan pemangku kepentingan lainnya untuk administrasi sekolah yang efektif.

E. PENGERTIAN SIAP (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN) *ONLINE*

1. Sistem Administrasi Informasi Pendidikan (SIAP) *online*

Sistem Adminitrasi Informasi Pendidikan (SIAP) *online* adalah layanan sistem informasi dan aplikasi pendidikan *online* yang dapat menghubungkan komunikasi orang tua, guru, siswa, sekolah dan dinas pendidikan secara terpadu dan akuntable yang dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Manfaat yang diperoleh dalam SIAP *online* adalah Dengan Menggunakan SIAP *online*, para user dapat melakukan komunikasi secara transparan seperti, orang tua bisa memonitoring aktifitas anaknya(siswa), guru bisa berkomunikasi *online* diluar ruang kelas dengn siswa dan orang tua, siswa bisa mengakses data dan informasi akademik secara *online*. Yang dimaksud dengan user adalah siswa, guru, dan juga orang tua yang dapat secara cepat mengakses SIAP *online*.

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur yang bekerja sama dengan PT. TELKOM WILTEL MALANG sesuai dengan MOU

(*memorandum of understanding*) dari pihak PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA ,Tbk dengan DINAS PENDIDIKAN provinsi Jawa Timur nomor **HK.840/DBS-A1000000/2012** tanggal 22 februari 2013.

Fitur layanan yang ada di SIAP *online* ini meliputi:

1. Portal sekolah yaitu dalam portal sekolah ini memberikan informasi tentang peta sekolah-sekolah yang terdapat diseluruh wilayah Indonesia
2. Profil sekolah yaitu dalam profil sekolah ini memberikan informasi tentang profil lengkap dari setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan yang sudah menggunakan SIAP *online*
3. SIAP sekolah yaitu dalam layanan ini siap sekolah lebih spesifik dalam memberikan informasi yaitu seperti jadwal sekolah, kelas, absensi siswa, kurikulum sekolah, penilaian siswa serta sarana dan prasarana di masing-masing sekolah yang sudah menggunakan layanan SIAP *online*
4. Manajemen dana BOS (dana operasional sekolah) yaitu Penggunaan Layanan Telkom SIAP *online* sebagai layanan untuk pelaporan dana BOS ditingkat Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan Permendikbud 76 tahun 2012, maka berguna dan bermanfaat sebagai:

a. Kendali

Mengendalikan penggunaan dana BOS yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lembaga dan kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan serta pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana.

b. Distribusi

Mempermudah alur distribusi dan monitoring pelaporan penggunaan dana BOS dari masing-masing sekolah ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan selanjutnya ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Dari semua fitur layanan yang dijelaskan diatas sudah terangkum dalam layanan yang terkategoriikan yaitu:

1. SIAPKU (SIAP Komunitas) adalah Jejaring Sosial Pendidikan Indonesia sebagai media berbagi beragam informasi tugas, berita, pengumuman, kegiatan hingga berkas (file) antara Sekolah, Siswa, Guru dan para Ortu/Wali Siswa.
2. SIAP DINAS *Online* merupakan layanan *online* yang ditujukan untuk memudahkan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, Propinsi hingga Depdiknas Pusat dalam mengelola, memonitor dan mengakses data-data pendidikan di tingkat sekolah, guru dan siswa sesuai wilayah kerja masing-masing.

3. SIAP PPDB *Online*, adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*).
4. SIAP SEKOLAH adalah sebuah layanan *online* yang dirancang khusus untuk memudahkan pengguna dalam mengelola dan mengakses administrasi akademik sekolah secara *online* seperti absensi siswa, penjadwalan mata pelajaran, laporan hasil belajar (raport), pengelolaan data guru, dan laporan sekolah yang sesuai dengan standar nasional.
5. SIAP GURU *Online* memahami permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam melakukan administrasi dan memonitoring prestasi akademik siswa. Untuk mengatasi hal itu, kami memberikan sebuah solusi yang memberikan kemudahan bagi guru melalui sebuah aplikasi yang disebut SIAP GURU.
6. SIAP SISWA dirancang khusus untuk memudahkan para siswa mengakses data dan informasi akademik mereka secara *online*, seperti: absensi siswa, penilaian (rapor), tes ujian *online*, hingga jejaring sosial.
7. SIAP ORTU (Orang Tua) dirancang untuk memudahkan para orangtua/wali siswa mengakses data dan informasi akademik para putra-putri mereka secara *online*, seperti: absensi siswa, penilaian (rapor) siswa, laporan pekerjaan rumah, dll.

8. SIAP Web Sekolah dirancang untuk memudahkan sekolah/Dinas memiliki situs yang terintegrasi dengan SIAP Sekolah/SIAP Dinas secara *online*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga mampu menggambarkan fenomena-fenomena dan menganalisa hubungan-hubungan yang terjadi antar fenomena tersebut. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moelong (2010:9) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dan juga untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan status objek penelitian saat ini. Selain itu Bogdan dan Taylor juga mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. FOKUS PENELITIAN

Adapaun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi formulasi Pengambilan keputusan atau kebijakan SIAP *online* di kota Malang dapat diukur dari:
 - a. Masalah-masalah yang di hadapi oleh para aktor kebijakan
 - b. Proses pengambilan keputusan atau formulasi kebijakan SIAP *online*
 - c. Evaluasi formulasi atau pengambilan keputusan kebijakan SIAP *online*

2. Implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang, dapat diukur dari:
 - a. Proses implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang
 - b. Prosedur implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang.
3. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang, dapat diukur dari:
 - a. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* terhadap lembaga pendidikan kota Malang
 - b. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* terhadap PT. TELKOM WILTEL Malang

C. LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian sedangkan situs penelitian adalah letak dimana peneliti melakukan penelitian secara benar-benar agar mendapatkan data yang benar-benar akurat, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Lokasi penelitian ini adalah kota Malang. Sedangkan situsya terdapat pada PT. TELKOM Jawa Timur selatan wilayah Malang.

D. SUMBER DATA PENELITIAN

Pada dasarnya ada 2 (dua) klasifikasi data, yaitu data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, data primer di penelitian ini berasalakan dari wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan.

Sedangkan menurut Silalahi, (2009:289) data primer ialah suatu objek atau dokumen original ataupun material mentah dari pelaku yang disebut *first hand information* data yang berasal dari sumber asli atau yang pertama, data tersebut dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun bentuk file-file.

Wawancara dilakukan dengan sumber yang bersal dari:

1. Ibu Tutik Sri Astutik selaku *account manager* marketing SIAP *online* 2013.
2. Bapak Uripan selaku *account manager* marketing SIAP *online* 2014.
3. Bapak Delrizki Lutfi selaku *manager* marketing dan *support division* SIAP *online*.
4. Ibu Heni Purwanto selaku admin operator SIAP *online* dari SMA 9 Malang.
5. Bapak Agung Prasetya selaku operator SIAP *online* dari SDN sumbersari 2 Malang.
6. Bapak Ari Wiji Utomo selaku peserta pelatihan *software* untuk interkoneksi *database* informan pendidikan dari Dinas Pendidikan kota Malang.
7. Bapak Suhatono selaku orang tua dari Arya Irfan Hanif a.n. siswa dari SMPN 2 kota Malang.
8. Bima Indah Purnama Jaya selaku siswa dari SMAN 8 Malang kelas X-IPS3.

2. Data skunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data skunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia (Sarwono, 2006:123). Jadi Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain. Artinya melewati satu pihak atau lebih yang bukan dilakukan sendiri oleh peneliti. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, peraturan-peraturan yang ada di PT. TELKOM WILTEL Malang.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Yang dimaksud dengan langkah ini ialah pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka pengukuran dan pengujian hipotesa (Surakhmad, 2004:109). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Menurut Singarimbun (1985:145) bahwa wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

2. Observasi (pengamatan)

Kata lain dari metode observasi ini menurut Narbuko (1997:70) yaitu pengamatan. Istilah dari pengamatan itu sendiri adalah

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (1996:148) metode dokumentasi ini berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis yang ada.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Menurut Arikunto (2006:5) “instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, serta sistematis dan mudah diolah”. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti sendiri
2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*)
3. Catatan Lapangan (*Field Note*)

G. ANALISIS DATA

Spradley (1980), dan Glaser dan Strauss (1967) bisa dipakai sebagai pedoman. Kendati tidak baku, artinya setiap peneliti kualitatif bisa mengembangkannya sendiri, seperti yang ditulis Mudjiaraharjo, secara garis besar model analisis itu diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis domain
2. Analisis taksonomi
3. Analisis komponensial

4. Analisis tema kultural
5. Analisis komparasi konstan

Analisis Domain (*Domain analysis*). Analisis domain pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami data secara rinci dan detail karena targetnya hanya untuk memperoleh domain atau ranah. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat “permukaan” tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir. Terdapat 3 elemen dasar domain yaitu *Cover term*, *Included term* dan *Semantic relationship*. Ada enam tahap yang dilakukan dalam analisis domain yaitu: (a) Memilih salah satu hubungan semantik untuk memulai dari sembilan hubungan semantik yang tersedia; (b) Menyiapkan lembar analisis domain; (c) Memilih salah satu sampel catatan lapangan yang dibuat terakhir, untuk memulainya; (d) Mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok dengan hubungan semantik dari catatan lapangan; (e) Mengulangi usaha pencarian domain sampai semua hubungan semantik ; (f) Membuat daftar domain yang ditemukan (teridentifikasi).

Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*). Pada tahap analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai

dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub-domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa, alias habis (*exhausted*). Pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain dan sub-domain yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam.

Analisis Komponensial (*Componential Analysis*). Pada tahap ini peneliti mencoba mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Unsur-unsur yang kontras dipilah-pilah dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang relevan. Kedalaman pemahaman tercermin dalam kemampuan untuk mengelompokkan dan merinci anggota sesuatu ranah, juga memahami karakteristik tertentu yang berasosiasi. Dengan mengetahui warga suatu ranah, memahami kesamaan dan hubungan internal, dan perbedaan antar warga dari suatu ranah, dapat diperoleh pengertian menyeluruh dan mendalam serta rinci mengenai pokok permasalahan.

Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes*). Analisis Tema Kultural adalah analisis dengan memahami gejala-gejala yang khas dari analisis sebelumnya. Analisis ini mencoba mengumpulkan sekian banyak tema, fokus budaya, nilai, dan simbol-simbol budaya yang ada dalam setiap domain. Selain itu, analisis ini berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain yang dianalisis, sehingga akan membentuk satu kesatuan yang holistik, yang akhirnya menampakkan tema yang dominan dan mana yang kurang dominan. Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah: (1) membaca secara cermat

keseluruhan catatan penting, (2) memberikan kode pada topik-topik penting, (3) menyusun tipologi, (4) membaca pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks penelitian. Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi. Sekali lagi di sini diperlukan kepekaan, kecerdasan, kejelian peneliti untuk bisa menarik kesimpulan secara umum sesuai sasaran penelitian.

Analisa Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*). Dalam pendekatan teori *grounded* ini, peneliti mengkonsentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat/ ciri dari data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum. Di saat telah memadainya rekaman cadangan deskripsi yang akurat tentang fenomena sosial yang relevan, barulah peneliti dapat mulai menghipotesiskan jalinan hubungan di antara fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Tiga aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Menulis catatan atau *note writing*.
2. Mengidentifikasi konsep-konsep atau *discovery or identification of concepts*.
3. Mengembangkan batasan konsep dan teori atau *development of concept definition and the elaboration of theory*

Menurut metode penelitian yang diungkapkan dari Spradley (1980), dan Glaser dan Strauss (1967), maka langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis evaluasi kebijakan SIAP

online (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) adalah menganalisis dengan menggunakan analisis domain yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Yaitu dengan mencari data melalui data primer dan data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari teori-teori yang digunakan untuk evaluasi kebijakan SIAP *online* yaitu teori kebijakan publik, teori evaluasi kebijakan publik, teori proses kebijakan publik dan teori Manajemen sistem informasi. Selain data dari teori-teori data sekunder juga dapat diperoleh dari literatur tentang peraturan kebijakan SIAP *online*. Selain data sekunder, untuk memperoleh gambaran umum tentang fokus penelitian juga bisa didapatkan dari data primer yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam tahap ini juga peneliti belum menspesifikan data sekunder dan primer yang didapat di mana data tersebut masih dalam ranah umum atau sekedar konsep belum dianalisis ke kasus yang ada. Dalam tahap analisis domain ini maka domain yang dapat dibagi dari penelitian evaluasi kebijakan SIAP *online* menjadi 3 bagian yaitu: 1) PT. TELKOM WILTEL Malang, 2) Dinas Pendidikan kota Malang dan ke 3) Lembaga pendidikan kota Malang. Setelah membagi menjadi 3 domain yang akan diteliti maka tahap selanjutnya adalah mencari hubungan semantik di antara ketiga domain yang sudah ditentukan terhadap evaluasi kebijakan SIAP *online* yaitu hubungan PT. TELKOM WILTEL Malang dengan Dinas Pendidikan kota Malang dan juga lembaga pendidikan kota Malang dalam proses implementasi kebijakan SIAP *online*.

Setelah tahap analisis domain selesai maka diltahap selanjutnya adalah analisis taksonomi, dalam tahap ini peneliti membagi data-data yang sudah didapatkan menjadi domain-domain secara mendalam. Mengklasifikasikan domain-domain secara khusus menjadi sub domain. Pada tahap ini peneliti mendalami domain-domain dengan pustaka atau teori-teori yang ada. Setelah menentukan domain-domain yang akan dijadikan objek penelitian maka tahap selanjutnya adalah memilih domain yang lebih besar atau yang lebih banyak terlibat didalam penelitian evaluasi kebijakan SIAP *online* yaitu PT.TELKOM WILTEL Malang, yang kemudian dibagi lagi menjadi sub domain yaitu PT.TELKOM WILTEL Malang bagian divisi *business service* yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan kebijakan SIAP *online* yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur. setelah menentukan sub domain penelitian maka kemudian mendalami dengan teori yang digunakan yaitu teori evaluasi kebijakan publik pada bagian evaluasi implementasi dan teori proses pengambilan kebijakan. yaitu tentang bagaimana para aktor berpengaruh dalam pengambilan kebijakan SIAP *online* dan apa sajakah alternatif-alternatif kebijakan yang diberikan oleh para aktor sebagai *problem solving* dari permasalahan yang dihadapi.

Tahap selanjutnya adalah Analisis Komponensial (*Componential Analysis*). Dalam tahap ini peneliti menghubungkan peran dari aktor-aktor yang berperan dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan SIAP *online*, memahami perbedaan karakter-karakter aktor pengambil kebijakan dan hubungan internal dari aktor-aktor pengambil kebijakan

sehingga dapat memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang berbeda-beda dari setiap aktor kebijakan sebagai pemecahan dari masalah yang dihadapi para kator kebijakan yang tergantung dari latar belakang setiap aktor kebijakan ini sehingga kemudian dapat diperoleh secara rinci mengenai fokus permasalahan. Aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan SIAP *online* ini adalah Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur, PT.TELKOM WILTEL Malang divisi *business service* dan admin atau operator Lembaga Pendidikan kota Malang. Kemudian memahami karakter-karakter setiap aktor yang terlibat dalam kebijakan SIAP *online* dan mengkajinya sehingga diperoleh pengertian yang menyeluruh dalam fokus permasalahannya yaitu evaluasi kebijakan SIAP *online*.

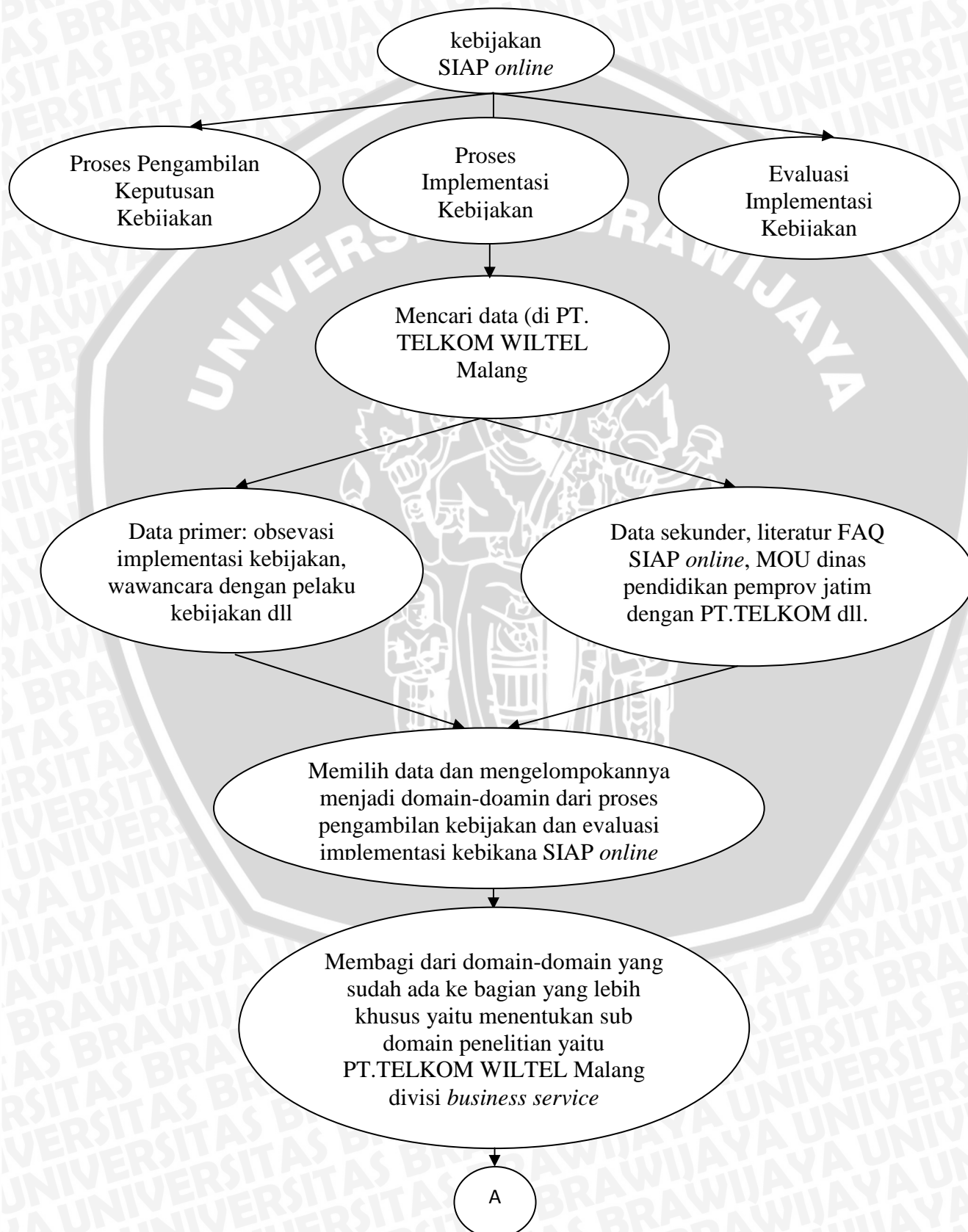
Selanjutnya adalah tahap Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes*), pada tahap ini peneliti menyatukan hubungan-hubungan pada domain-domain yang dianalisis sehingga membentuk hubungan yang holistik yang akan membentuk hubungan-hubungan yang menyeluruh dari semua domain dalam penelitian sehingga akan menampakkan pemecahan masalah dari fokus masalah evaluasi kebijakan SIAP *online* sehingga mampu memberikan gambaran deskriptif dari kesimpulan evaluasi kebijakan SIAP *online* di Lembaga Pendidikan (studi kasus di pemerintah kota Malang). Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah: (1) membaca secara cermat keseluruhan catatan penting, yaitu berupa data sekunder dan data primer (2) memberikan kode pada topik-topik penting, yaitu dengan menentukan domain-domain dalam penelitian, domain penelitiannya adalah a) PT.TELKOM WILTEL Malang

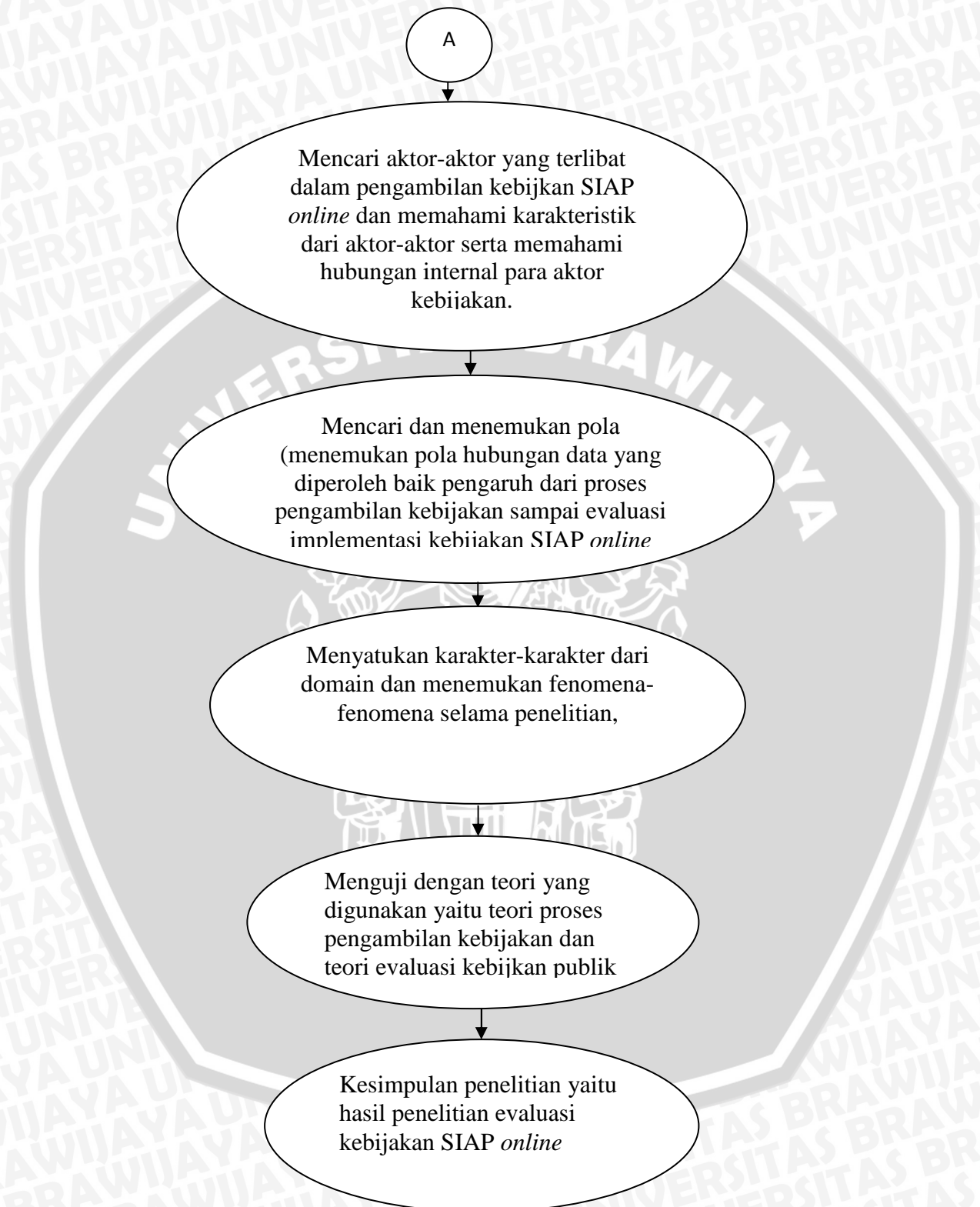
sebagai penyusun teknis implementasi kebijakan SIAP *online*, b) Dinas Pendidikan kota Malang sebagai organisasi yang mengkoordinir dan membrikan pelatihan untuk setiap operator dan admin lembaga pendidikan dan c) Lembaga pendidikan kota Malang sebagai sasaran atau objek kebijakan SIAP *online*. (3) menyusun tipologi yaitu dilihat dari etnografi yaitu tentang karakteristik masyarakat yang menjadi tempat atau lokasi penelitian yaitu dikota malang lebih khususnya karakteristik masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan SIAP *online* yaitu bisa dilihat dari bagaimanakah karakteristik masyarakat Malang khususnya admin atau operator di Lembaga Pendidikan kota Malang dan pegawai Dinas Pendidikan kota Malang sebagai pengkoordinir dari semua Lembaga Pendidikan dalam menjalankan kebijakan SIAP *online*, kemudian klasifikasi data yang sudah diperoleh sehingga diklasifikasikan menjadi fenomena yang ditemukan dalam penelitian, studi kasus yang diambil untuk tempat penelitian, *grounded teory* yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan studi kritis yaitu sikap kritis yang biberikan oleh peneliti yaitu berupa rumusan masalah yang digunakan untuk memberikan pikiran kritis terhadap penelitian evaluasi kebijakan SIAP *online*. (4) membaca pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks penelitian yaitu teori evaluasi kebijakan publik bagian evaluasi implementasi kebijakan, teori proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan teori sistem manajemen informasi publik. Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi. Sehingga pada akhirnya dapat menarik kesimpulan dari fokus penelitian.

Tahap terakhir adalah analisis Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*), pada tahap ini peneliti akan fokus pada pendeskripsian yang rinci dari data-data yang diperoleh yaitu berupa karakter-karakter dari aktor yang berpengaruh yaitu PT.TELKOM WILTEL Malang divisi *business service* sebagai penyusun teknis implementasi dan yang terlibat langsung dengan pengambilan keputusan kebijakan SIAP *online*, Dinas Pendidikan kota Malang sebagai organisasi yang mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan SIAP *online* di Lembaga Pendidikan kota Malang dan yang terakhir Lembaga Pendidikan kota Malang sebagai pelaksana dan sasaran implementasi kebijakan SIAP *online*, menyusun pertanyaan teoritis terkait evaluasi kebijakan SIAP *online* seperti bagaimana proses pengambilan kebijakan SIAP *online* dan bagaimana evaluasi kebijakan SIAP *online* yang mengacu pada terori yang digunakan untuk penelitian ini kemudian mengumpulkan fenomena-fenomena yang ada selama penelitian dan selanjutnya peneliti akan menghubungkan fenomena-fenomena yang ada terkait tentang evaluasi kebijakan SIAP *online*.

GAMBAR 4

Metode penelitian





Atau dapat peneliti terjemahkan dalam tabel 1

Tabel 1

Konsep dan Alur Sumber Data

No	Data	Jenis Data	Sumber	Informan	Lokasi
1	Formulasi SIAP <i>ONLINE</i>	Primer	Wawancara	Ibu Tutik Sri Astuti (<i>Account Manager SIAP online 2013</i>), Bapak Uripan (<i>Account Manager, SIAP online 2014</i>), Bapak Delrizki Lutfi (<i>Manager Marketing dan Suport Division SIAP Online</i>)	PT. TELKOM WILTEL MALANG, , Jl. Ahmad Yani No.11 Malang, <i>Hidden office Developer TELKOM</i>
		Sekunder	Dokumenter	Data Sejarah TELKOM, Sejarah dan Konsep SIAP <i>online</i> , Website SIAP <i>online</i> (www.siap-online.com), Payung Hukum SIAP <i>online</i> (MOU, dan surat edaran),	PT. TELKOM WILTEL MALANG, , Jl. Ahmad Yani No.11 Malang, <i>Hidden office Developer TELKOM</i>

No	Data	Jenis Data	Sumber	Informan	Lokasi
2	Implementasi SIAP ONLINE	Primer	Wawancara, Observasi	Ibu Tutik Sri Astuti (<i>Account Manager SIAP online 2013</i>), Bapak Uripan (<i>Account Manager, SIAP online 2014</i>), Bapak Delrizki Lutfi (<i>Manager Marketing dan Suport Division SIAP Online</i>)	PT. TELKOM WILTEL MALANG, Jl. Ahmad Yani No.11 Malang, <i>Hidden office Developer</i> TELKOM, Dinas Pendidikan Kota Malang, Kota Malang Yang sudah konfirmasi <i>pasSword</i> dan id SIAP online
		Sekunder	Dokumenter	Juknis (Petunjuk Teknis), Alur Pelaksanaan, Prosedur Pelaksanaan	PT. TELKOM WILTEL MALANG, , Jl. Ahmad Yani No.11 Malang, <i>Hidden office Developer</i> TELKOM
3	Evaluasi SIAP ONLINE	Primer	Wawancara	Heni Purwanto (operator SIAP online SMPN 9 Malang). Agung Prasetya (operator SIAP online SDN sembersari 2 Malang). Ari Wiji Utomo (petugas SIAP online Dinas pendidikan kota Malang).	Kantor sekolah SMPN 9 Malang. Kantor sekolah SDN Sumbersari 2 Malang. Kantor Dinas Pendidikan kota Malang.

Keterangan tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data formulasi kebijakan SIAP *online*, data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Tutik Sri Astuti (*Account Manager SIAP online* 2013), Bapak Uripan (*Account Manager, SIAP online* 2014), Bapak Delrizki Lutfi (*Manager Marketing dan Suport Division SIAP online*) karena informan tersebut menangani marketing SIAP *online* yaitu yang mengetahui tentang sejarah SIAP *online* dari awal ditetapkannya SIAP *online* dan juga yang memberikan sosialisasi tentang MOU antara Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan PT.TELKOM dalam kerjasama untuk kebijakan SIAP *online*. Data sekunder didapatkan dari dokumenter yang diperoleh dari PT.TELKOM WILTEL Malang yaitu berupa Data Sejarah TELKOM, Sejarah dan Konsep SIAP *online*, Website SIAP *online* (www.siap-online.com), Payung Hukum SIAP *online* (MOU, dan surat edaran).
2. Data implementasi kebijakan SIAP *online*: data yang diperoleh berupa data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Ibu Tutik Sri Astuti (*Account Manager SIAP online* 2013), Bapak Uripan (*Account Manager, SIAP online* 2014), Bapak Delrizki Lutfi (*Manager Marketing dan Suport Division SIAP online*) karena informan merupakan implementor kebijakan SIAP *online* sesuai dengan MOU dan pihak mereka yang melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di kota Malang terkait pelaksanaan kebijakan SIAP *online*. Data sekunder didapatkan dari dokumenter yang diperoleh dari

PT.TELKOM WILTEL Malang yang berupa Juknis (Petunjuk Teknis), Alur Pelaksanaan, Prosedur Pelaksanaan SIAP *online*.

3. Data evaluasi kebijakan SIAP *online*: Data yang diperoleh berupa data primer. Data primer diperoleh dari wawancara dengan bapak Heni Purwanto (operator SIAP *online* dari SMPN 9 Malang), Bapak Agung Prasetya (operator SIAP *online* dari SDN Sumbersari 2 Malang), Bapak Ari Wiji Utomo (pertugas SIAP *online* dari Dinas Pendidikan kota Malang), Bapak Suhartono selaku orang tua dari Arya Irfan Hanif a.n. siswa dari SMPN 2 Malang, dan Bima Indah Purnama Jaya selaku siswa dari SMAN 8 Malang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PT.Telkom indonesia

1. Sejarah PT.Telekomunikasi indonesia

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. PT. Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Pada masa pemerintahan colonial Belanda tahun 1882 peneyelenggaraan layanan pos dan telegraf diselenggarakan oleh pihak swasta. Bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi, yang pada tahun 1906 diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan *Staatsblad* No. 395 tahun 1906. Pada saat itulah pemerintahan colonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (*Post, Telegraph en Telephone Dienst/P.T.T*). jawatan usaha inilah yang menjadi asal mula TELKOM.P.T.T Dienst ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan *Staatsblad* No. 419 tahun 1927 tentang Indonesia *Bedrijvenwet* (I.B.W., Undang-undang Perusahaan Negara).

Selanjutnya pada tahun 1961 status jawatan P.T.T *Dienst* berakhir setelah diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi oleh Pemerintahan



Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.19 tahun 1960. Tahun 1965 pemerintah memandang perlu memecah Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (Perusahaan Negara Postel), tersebut menjasi Perusahaan Negara Pos & Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pendirian PN Pos dan Giro Postel dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, sedangkan PN Postel didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965.

Dalam perkembangan selanjutnya Perusahaan Negara Telekomunikasi yang disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional pada tahun 1974. Jasa Telekomunikasi internasional saat itu juga diselenggarakan oleh P.T. *Indonesian Satelite Corporation* (Indosat) yang masih berstatus perusahaan asing, yaitu dari *American Cable and Radio Corporation*, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian *Delaware*, Amerika Serikat.

Pada tahun 1980 pemerintah membeli seluruh saham PT. Indosat dari *American Cable and Radio Corporation*. PT. Indosat tetap menyelenggarakan jasa Telekomunikasi internasional namun terpisah dari Perumtel. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 22

tahun 1974. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi untuk umum Internasional.

Kemudian dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas usaha jasa telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991 Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Hal ini dilakukan karena pemerintah merasa bentuk perusahaan dapat memicu manajemen yang lebih cepat. Dengan percepatan pembangunan telekomunikasi diharapkan dapat memacu pembangunan sector lainnya. Sejak itulah berdiri Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM seperti yang kita kenal saat ini.

Pada tahun 1995 penawaran umum perdana saham Telkom di lakukan pada tanggal 14 November 1995. *Initial Public Offering* adalah keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara menjual saham TELKOM yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52 tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH. TELKOM tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), *New York Stock Exchange* (NYSE) dan *London Stock Exchange* (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (*Public Offering Without Listing/POWL*) di *Tokyo Stock Exchange*.

Telkom membeli 35% saham telkomsel dari indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dengan Indosat pada tahun 2001. Adanya transaksi tersebut Telkom menguasai 72,27% saham telkomsel. Telkom membeli 90,32% saham PT. Dayamitra dan mengkonsolidasikan laporan keuangan pada tahun 2002, Telkom membeli seluruh saham PT. Pramindo melalui 3 tahap yaitu 30% saham pada tanggal 15 Agustus 2002 dan ditandatanganinya perjanjian jual beli 15% pada tanggal 30 September 2003 dan sisanya 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. Telkom menjual 12,72% saham telkomsel kepada Singapore Telecom. Dengan demikian Telkom memiliki 65% saham telkomsel.

Sejalan dengan visi TELKOM untuk menjadi perusahaan *Info Communication* termuka di kawasan regional serta mewujudkan TELKOM Goal 2010 maka berbagai upaya telah dilakukan TELKOM untuk tetap unggul dan Leading pada seluruh produk layanan. Upaya tersebut tercermin dari *market share* produk dan layanan unggul diantara para pemain telekomunikasi. Selama tahun 2006 TELKOM telah menerima beberapa penghargaan baik dari dalam maupun dari luar negeri, diantaranya *The Best Value Creator, The Best Of Performance Excellence Achievement, Asia's Best Companies 2006* award dari majalah Finance Asia.

Pencapaian dan pengakuan yang diperoleh PT. telekomunikasi Indonesia secara resmi pada tanggal 23 Oktober 2009 melakukan informasi bisnis.

Transformasi bisnis yang dilakukan PT. Telkom kali ini adalah yang tersebar sepanjang sejarah PT. Telkom karena bersifat fundamental, menyeluruh dan terintegrasi. Ruang lingkup wilayah PT. Telkom terlebih dibagi menjadi ke dalam tujuh Divisi Regional (DIVRE) yang kantor perwakilannya di tempatkan di kota-kota besar. Ketujuh Divisi Regional itu adalah : Sumatra (Medan), DKI (Jakarta), Jawa Barat dan Banten (Bandung), Jawa Tengah dan Yogyakarta (Semarang), Jawa Timur (Surabaya), Kalimantan (Balikpapan), Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Irian (Ujung Pandang). Kemudian setiap Divisi Regional itu dibagi kembali menjadi Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) yang kantor perwakilannya di tunjuk berdasarkan ukuran luas daerah dan pengungsinya.

1. Profil Perusahaan

Kemajuan teknologi berbasis pita lebar (broadband) semakin mempersempit jarak antara penggunanya. Teknologi broadband memberikan pilihan luas bagi end user untuk membangun komunikasi dengan mitranya di daerah atau negara lain dengan sangat efektif dan biaya yang sangat efisien dibandingkan dengan menghubunginya via layanan telekomunikasi biasa. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat infrastruktur berbasis broadband untuk mendukung inovasi layanan dan produknya menuju Information, Media & Edutainment, dan Services (“IMES”). Tak hanya membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi Perusahaan, fokus Telkom pada penyelenggaraan IMES juga merupakan

sumbangsih Telkom pada kemajuan ekonomi dan kecerdasan bangsa. Berikut ini adalah definisi mengenai layanan TIMES secara satu per satu:

a. TELECOMMUNICATION

Telekomunikasi merupakan bagian bisnis legacy Telkom. Sebagai ikon bisnis perusahaan, Telkom melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak *Plain Ordinary Telephone Service* ("POTS"), telepon nirkabel tidak bergerak, layanan komunikasi data, broadband, satelit, penyewaan jaringan dan interkoneksi, serta telepon seluler yang dilayani oleh Anak Perusahaan Telkomsel. Layanan telekomunikasi Telkom telah menjangkau beragam segmen pasar mulai dari pelanggan individu sampai dengan Usaha Kecil dan Menengah ("UKM") sertakorporasi.

b. INFORMATION

Layanan informasi merupakan model bisnis yang dikembangkan Telkom dalam ranah *New Economy Business* ("NEB"). Layanan ini memiliki karakteristik sebagai layanan terintegrasi bagi kemudahan proses kerja dan transaksi yang mencakup *Value Added Services* ("VAS") dan *Managed Application/IT Outsourcing* ("ITO"), *e-Payment* dan *IT enabler Services* ("ITeS").

c. MEDIA

Media merupakan salah satu model bisnis Telkom yang dikembangkan sebagai bagian dari NEB. Layanan media ini menawarkan *Free To Air* ("FTA") dan *Pay TV* untuk gaya hidup digital yang modern.

d. EDUTAINMENT

Edutainment menjadi salah satu layanan andalan dalam model bisnis NEB Telkom dengan menargetkan segmen pasar anak muda. Telkom menawarkan beragam layanan di antaranya *Ring Back Tone* (“RBT”), SMS Content, portal dan lain-lain.

e. SERVICES

Servis menjadi salah satu model bisnis Telkom yang berorientasi kepada pelanggan. Ini sejalan dengan Customer Portfolio Telkom kepada pelanggan Personal, Consumer/Home, SME, Enterprise, Wholesale, dan Internasional.

2. Visi, Misi, Corporate Values (5C), Tata Kelola Perusahaan, Program dan Struktur Organisasi PT. TELKOM WILTEL MALANG**a. Visi**

Untuk menjadi pelopor dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Asia

b. Misi

1. Mengambil peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas melalui pendidikan teknologi InfoComm;
2. Mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan masyarakat;
3. Mengambil peran aktif dalam memelihara keseimbangan alam.

3. Layanan TELKOM SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pendidikan) *Online*

SIAP merupakan kependekan dari Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan, yaitu layanan yang disediakan oleh TELKOM untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan data dan informasi kependidikan mulai dari data siswa, guru, dan sekolah. Layanan SIAP memberikan kemudahan bagi sekolah dalam mengelola proses bisnis kependidikan yang melibatkan stakeholder pendidikan seperti siswa, guru, orang tua, dan Dinas Pendidikan. Proses bisnis yang dimaksud adalah mulai dari proses penerimaan siswa baru (PSB), proses belajar-mengajar, absensi siswa dan guru, pembayaran biaya sekolah, monitoring nilai siswa oleh orang tua melalui SMS dan web, dan kenaikan kelas sampai dengan kelulusan siswa.

Layanan SIAP terdiri dari modul-modul sebagai berikut:

1. SIAP *Passport* untuk pusat otentikasi dan otorisasi akses penggunaannya (orang tua, siswa, guru) serta pihak lainnya (dinas pendidikan).
2. SIAP PSB/PPDB *Online* untuk memberikan solusi bagi sekolah untuk menyelenggarakan PSB/PPDB secara *online* sehingga dapat perkembangan proses penerimaan siswa dapat diketahui secara *real time* baik melalui web maupun SMS.

3. SIAP Sekolah untuk memberikan solusi pengelolaan biodata siswa, kegiatan belajar, kurikulum data, hasil pelajaran.
4. SIAP Dinas untuk mengintegrasikan perkembangan data sekolah dengan pengelolaan data di Dinas Pendidikan, baik tingkat kota/kabupaten, propinsi, dan pusat.
5. SIAP Siswa untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk memperoleh materi ajar, tes ujian, konsultasi dengan guru, dan memperoleh hasil ujian secara *online*.
6. SIAP Guru untuk memungkinkan guru memberikan materi ajar, bahan ujian, dan nilai hasil ujian kepada siswa, serta monitoring perkembangan pembelajaran siswa.
7. SIAP Ortu untuk memberikan kemudahan bagi orang tua untuk memonitor perkembangan siswa, seperti absensi siswa, pembayaran biaya pendidikan, dan nilai siswa.

Berlangganan SIAP dapat dilakukan melalui portal www.siap-online.com dengan paket Standar sebesar Rp. 250.000,- per bulan dan paket Premium sebesar Rp. 375.000,- per bulan. Cara pembayaran SIAP adalah menjadi satu dengan tagihan TelkomSpeedy untuk konektivitas internet, sedangkan layanan SIAP *online* ini bersifat gratis atau edisi gratis yang bisa diakses dengan mudah dan tidak berbayar.

Sedangkan edisi berbayar untuk SIAP *online* ini dinamakan internet pendidikan yang merupakan edisi lengkap dari layanan SIAP *online* itu sendiri. Internet Pendidikan memiliki modul-modul layanan yang sama dengan internet pendidikan akan tetapi lebih lengkap dengan modul tambahan untuk manajemen pelaporan dana BOS dan modul tambahan dari SIAP *online* ini yang dapat mengakomodir kebutuhan aplikasi pelaporan dana bos yang terintegrasi *by system* dan dapat dimonitor secara *real time* oleh dinas pendidikan. Paket internet pendidikan akan mengakomodir 2 jenis *connectivity*, yaitu Telkom Speedy dan Telkomsel Flash.

Gambar 5

Tabel paket layanan internet pendidikan

No	Kondisi Lokasi	Internet Pendidikan Speedy	Internet Pendidikan Flash	Internet Pendidikan Add-on
A	Tercover Speedy			
	- Sudah Pasang Speedy			v
	- Belum Pasang Speedy	v		
B	Tidak Terlayani Speedy			
	- Tidak ada jaringan		v	v

Keterangan dari gambar 5 sebagai berikut:

Jenis Paket yg akan ditawarkan disesuaikan dgn kondisi jaringan di lokasi pelanggan :

1. Lokasi yang tercover speedy (area DP)

2 Lokasi yang tidak terlayani speedy

> Tidak tercover area DP

> Port penuh

Gambar 6

Pricing layanan internet pendidikan

No	Deskripsi Paket	Harga / bln (sblm PPN)	Speedy 512kbps	Speedy Mail	Speedy Chat	Flash Unlimited 4gb**	Siap Online Standar
1	Internet Pendidikan Speedy	220,000	120,000	-		-	100,000
2	Internet Pendidikan Flash	220,000	-	40,000		80,000	100,000
3	Internet Pendidikan Add-on non Telkom Group	200,000	-		100,000	-	100,000
4	Internet Pendidikan Add-on Speedy eksisting*	180,000	-	-		80,000	100,000
	*speedy tetap pakai tarif eksisting						
	**Include modem						

Keterangan dari gambar 6 adalah sebagai berikut:

1. Maksimal harga 220rb / bulan sebelum PPN, disesuaikan dgn juknis Permendikbud ttg BOS tahun 2012
2. Paket Internet Pendidikan add on non Telkom Group ditujukan untuk pelanggan internet non Telkomgroup, namun tidak menjadi prioritas

paket yang ditawarkan ke pelanggan diarahkan untuk paket Internet Pendidikan Speedy dan Internet Pendidikan Flash.

A. Penyajian Data

1. Evaluasi Formulasi atau pengambilan keputusan kebijakan SIAP *online*

a. Masalah-masalah yang dihadapi oleh para aktor kebijakan

Dalam perumusan Kebijakan SIAP *online*, dibutuhkan susunan masalah-masalah terlebih dahulu yang kemudian keluarlah kebijakan yang mampu menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan SIAP *online* yang saat ini tengah dijalankan oleh kota Malang, pada dasarnya adalah solusi layanan di bidang pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aplikasi-aplikasi pendukung proses pembelajaran dan pengelolaan data-data kependidikan bagi masyarakat berbasis layanan teknologi informasi. Kebijakan SIAP *online* ini diciptakan untuk memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dan juga Dinas-Dinas Pendidikan. Menurut pada hasil observasi maka masalah-masalah yang terjadi di Lembaga Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan kota Malang ini adalah belum adanya layanan yang diberikan untuk mengakomodir kebutuhan administratif yang lengkap, cepat dan berbasis teknologi informasi sehingga Dinas Pendidikan Jawa Timur merasa perlu adanya sistem baru di Lembaga Pendidikan dan Dinas

pendidikan yang mampu mengatasi *problem* tersebut. Sehingga ketika Kemendikbud mengeluarkan kebijakan SIAP *online* maka Dinas Pendidikan Jawa Timur menyambut dengan baik. Kebijakan SIAP *online* tercipta berawal dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin mengkomodir kebutuhan-kebutuhan sistem administrasi sekolah yang masih sangat lambat dalam proses pengerjaannya seperti pada contohnya adalah pelaporan maupun pengajuan dana BOS (bantuan operasional sekolah), pendataan NUPTK guru, Nomor Induk Siswa Nasional (NISM), dan lain-lain yang bersifat administrasi sekolah maupun pendidikan yang harus melewati prosedur yang sangat panjang dan lambat. Hasil observasi ini juga didukung oleh wawancara dengan Delrizki Lutfi selaku *manager marketing & support division* sebagai berikut:

“..Memang pada dasarnya kebijakan SIAP *online* ini diwajibkan oleh Kemendikbud adalah demi kebaikan dan kemudahan administrasi pendidikan sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan agar lebih cepat diproses karena bisa dilakukan secara *online*.” (wawancara dengan Bapak Rizki, tanggal 8 januari 2014, kantor PT.TELKOM Malang).

Dari hasil wawancara ini, tampak jelas bahwa dengan dikeluarkan kebijakan SIAP *online* oleh Kemendikbud ini adalah untuk kebaikan dan kemudahan bagi masalah kebutuhan-kebutuhan aplikasi-aplikasi pendukung proses pembelajaran dan pengelolaan data-data kependidikan bagi sekolah dan Dinas Pendidikan bersifat administratif yang berbasis layanan teknologi informasi.

Selain Masalah-masalah tersebut menurut hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Pendidikan kota Malang terdapat pula masalah lainnya yaitu belum tersedianya layanan teknologi informasi di kota Malang yang mampu memberikan informasi dan mengakomodir kebutuhan informasi administrasi untuk Dinas Pendidikan maupun untuk Lembaga-Lembaga dikota Malang, hal tersebut juga didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Tutik Sri Astuti selaku *account manager* divisi *business service* PT. TELKOM sebagai berikut:

“....di Malang ini belum ada aplikasi yang menggunakan internet untuk bisa mengelola data dan informasi pendidikan secara cepat dan mudah karena yang ada seperti di webnya hanya bersifat informatif yang memberikan info kegiantan Dinas Pendidikan atau kegiatan sekolah-sekolah saja belum ada yang selengkap SIAP *online*.” (wawancara dengan Ibu Tutik, tanggal 23 desember 2013, kantor PT.TELKOM Malang).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tutik tersebut maka masalah lainnya yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan juga sekolah-sekolah dikota Malang adalah tidak semua sekolah dan dinas memiliki aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi pendidikan dengan lebih cepat, mudah, akurat, terpadu dan berkesinambungan dari mulai tingkat sekolah, Dinas Pendidikan kota, kabupaten, propinsi hingga pusat (Kemendikbud).

Sehingga Kemendikbud merealisasikan keinginannya memiliki sistem untuk mengakomodir kebutuhan administrasi pendidikan yang diturunkan ke Dinas Provinsi agar dapat diteruskan ke tingkat kota

Malang dengan membuat MOU yang bekerjasama dengan PT.TELKOM. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tutik Sri Astuti selaku *account manager* divisi *business service* PT. TELKOM sebagai berikut:

“...Kemendikbud merealisasikan keinginannya yang diturunkan ke Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur dengan membuat MOU antara PT.TELKOM dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. dalam MOU itu juga diatur apa tugas dan fungsi dari PT.TELKOM dalam hubungan kerjasama antara lain untuk koneksi internet dan pembuatan modul SIAP *online* itu sendiri. (wawancara dengan Ibu Tutik, tanggal 23 desember 2013, kantor PT.TELKOM Malang).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tutik tersebut maka sesuai dengan MOU antara Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur dengan PT.TELKOM yang menunjuk PT.TELKOM sebagai implementor dalam melaksanakan kebijakan SIAP *online* dan juga sebagai pembuat modul-modul aplikasi yang ada dalam SIAP *online* menyediakan koneksi internet disekolah-sekolah maupun di Dinas Pendidikan kota Malang agar dapat dengan mudah menggunakan layanan SIAP *online*, namun banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki koneksi internet sehingga tidak menggunakan internet sehingga PT.TELKOM dibantu Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisai dalam penggunaan internet dan pembangunan koneksi internet agar dapat mengakses layanan SIAP *online*.

Seperti hasil observasi dan wawancara yang peneliti paparkan maka Kebijakan SIAP *online* merupakan suatu jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh Kemendikbud yang ingin mengakomodir

kebutuhan-kebutuhan sistem administrasi sekolah yang masih sangat lambat dalam proses pengerjaannya yang ada pada daerah-daerah. Sehingga Kemendikbud bekerjasama dengan PT.TELKOM untuk mengembangkan suatu sistem aplikasi administrasi sekolah yang dilakukan secara *online* dan terintegrasi agar dapat memudahkan permasalahan administrasi sekolah yang lambat dan tidak terintegrasi agar lebih cepat dan mampu dilakukan secara *online* dan terintegrasi dari pusat sampai ke daerah-daerah.

b. Proses pengambilan keputusan kebijakan atau formulasi kebijakan SIAP *online*

Tahap pengambilan keputusan dalam proses formulasi kebijakan SIAP *online* adalah tahap dimana *problem solving* yang telah ada kemudian di ditinjau sebelum diputuskan menjadi sebuah kebijakan. dari hasil observasi yang telah dilakukan dalam formulasi atau pengambilan keputusan kebijakan SIAP *online* berawal dari keinginan “Kemendikbud”(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) pada awal 2008 untuk bisa membuat suatu sistem pendidikan secara terintegrasi dan bisa dilakukan secara *online* yang awalnya masih berbentuk PSB (penerimaan siswa baru). Berdasarkan komitmen dari Kemendikbud tersebut maka Kemendikbud mengajak PT.TELKOM untuk bekerjasama dalam pembuatan sistem PSB yang terintegrasi dan secara *online*, Kemendikbud mengajak PT.TELKOM karena sejak tahun 2003 PT.

TELKOM sudah mempunyai layanan yang memberikan layanan konektivitas untuk PSB *online* di daerah-daerah di Indonesia dan bekerjasama sendiri dengan pemerintah daerah. Didukung dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Delrizki Lutfi selaku *manager marketing & support division* sebagai berikut:

“...dulu masih berbentuk PSB *online* RTO (penerimaan siswa baru *real time online*) itu dulu PT.TELKOM sebelumnya sudah punya program itu yang kerjasama dengan kota-kota dan daerah-daerah, karena Kemendikbud juga ingin punya aplikasi yang seperti PSB *online* maka Kemendikbud membuat kebijakan dan meminta PT.TELKOM untuk kerjasama.” (wawancara dengan Bapak Rizki, tanggal 8 januari 2014 dikantor PT.TELKOM Malang).

Dari penjelasan bapak Rizki ini tampak jelas Kemendikbud meminta PT.TELKOM untuk kerjasama dalam menciptakan suatu aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan administrasi sekolah dan pendidikan, sehingga Kemendikbud mengeluarkan kebijakan SIAP *online* dan diturunkan ke tingkat provinsi kemudian daerah kota dan kabupaten.

Melihat layanan dari PT. TELKOM yang berhasil dalam pelaksanaan PSB *online* maka Kemendikbud pada tahun 2008 resmi mengajak PT.TELKOM dalam membuat suatu sistem pendidikan secara *online*. Kemudian diturunkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan PT.TELKOM menandatangani MOU pada tanggal 22 februari 2012.

Dalam pembuatan sistem pendidikan yang terintegrasi PT.TELKOM kemudian menambahkan nilai tambah dari layanan yang

awalnya hanya fokus pada PSB *online* kemudian memiliki berbagai macam modul pendidikan kedalam sistem tersebut yang bersifat administratif pendidikan, sehingga PT.TELKOM menyatukan berbagai modul-modul yang antara lain adalah: padamu negeri, PPDB (penerimaan peserta didik baru), manajemen pelaporan dana BOS, WEB sekolah, dll. Tersebut sedalam sebuah layanan TELKOM SIAP *online*.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti bahwa ada kerjasama antara PT.TELKOM dengan Kemendikbud dalam pembuatan sistem pendidikan *online*, PT.TELKOM memang menjadi perancang modul-modul dari layanan TELKOM SIAP *online* sekaligus menjadi implementor dari layanan SIAP *online* tersebut. Dan setelah PT. TELKOM membuat modul-modul dari layanan SIAP *online*, kemendikbud memerintahkan penggunaan layanan SIAP *online* ini menjadi kebijakan yang digunakan dalam pendidikan. Hasil observasi ini juga didukung dengan pernyataan Delrizki Lutfi selaku *manager marketing & support division* sebagai berikut:

“...ya memang bentuk kerjasama dalam pembuatan sistem pendidikan atau SIAP *online* ini kapasitas PT.TELKOM adalah sebagai perancang modul-modul dari layanan TELKOM SIAP *online* yang sekaligus menjadi implementornya. (wawancara dengan Bapak Rizki, tanggal 8 januari 2014 dikantor PT.TELKOM Malang).

Kebijakan penggunaan layanan SIAP *online* dari Kemendikbud kemudian diturunkan pada tingkat Provinsi juga pada tingkat kota dan

kabupaten. Di kota Malang kebijakan penggunaan layanan telkom SIAP *online* ini berawal dari MOU PT. TELKOM dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang bekerjasama dalam pengimplementasian dan juga pengaturan pelaksanaan dan pengenalan layanan SIAP *online* di sekolah-sekolah di Jawa Timur, kemudian kebijakan layanan SIAP *online* ini di teruskan oleh surat edaran dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan pada tanggal 29 juli 2013 yang mewajibkan penggunaan modul padamu negeri yang ada dalam layanan SIAP *online* untuk mendata Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)guru, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dan layanan evaluasi diri sekolah (EDS) untuk semua sekolah, yang kemudian turun di kota dan kabupaten PT. TELKOM bekerjasama dengan pemerintah kota Malang dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan layanan SIAP *online* dalam pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Uripan selaku *account manager* divisi *business service marketing* SIAP *online* sebagai berikut:

“mulai dari MOU antara Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan PT.TELKOM maka itu yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan kebijakan SIAP *online* termasuk dikota Malang, karena SIAP *online* ini bagus ya banyak dukungan termasuk dari LPMP ada juga dari DEPAG karena modul padamu negeri ini kan ada dalam layanan SIAP *online*.” (wawancara dengan Bapak Uripan tanggal 28 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang).

Pengambilan keputusan kebijakan atau formulasi SIAP *online* ini memang berawal dari Kemendikbud sehingga dalam formulasinya Kemendikbud memberikan instruksi kepada PT.TELKOM untuk membuat aplikasi SIAP *online* dan menyempurnakannya dengan penambahan modul-modul yang menjadikan penggunaan SIAP *online* itu wajib digunakan. Sehingga dalam formulasi kebijakan SIAP *online* ini melibatkan dua aktor yaitu kemendikbud dan PT.TELKOM Indonesia.

c. Evaluasi formulasi atau pengambilan keputusan kebijakan SIAP *online*

Formulasi kebijakan SIAP *online* pada awalnya memang merupakan keinginan dari Kemendikbud yang kemudian diwujudkan dengan kerjasama antara Kemendikbud dengan PT.TELKOM. dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa dalam proses formulasi dari penyusunan kebijakan sampai kebijakan SIAP *online* diputuskan untuk menjadi kebijakan nasional yang kemudian diturunkan ke tingkat provinsi lewat Dinas Pendidikan Jawa Timur semua dilakukan hanya antara Kemendikbud kemudian di turunkan ke Dinas Pendidikan Jawa Timur dan pihak PT.TELKOM yang kemudian menghasilkan MOU kerja sama dengan PT.TELKOM. didukung dengan pernyataan yang di ungkapakan oleh Bapak Delrizki Lutfi *selaku account manager & support division* sebagai berikut:

“...Ya memang bisa dikatakan kebijakan ini dibuat hanya ada dua aktor yaitu Kemendikbud yang diturunkan ke Dinas Pendidikan

Jawa Timur dan PT.TELKOM itu sendiri. Tidak ada proses tender yang melibatkan pihak lain karena PT.TELKOM langsung diminta secara resmi pada saat itu”. (wawancara dengan Bapak Rizki tanggal 8 januari 2014 di kantor PT.TELKOM Malang)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rizki tersebut telah menjelaskan bahwa dalam formulasi atau pengambilan keputusan kebijakan SIAP *online* ini hanya melibatkan dua aktor yaitu Kemendikbud yang kemudian diturunkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang memiliki kepentingan untuk memudahkan penyediaan informasi tentang administrasi pendidikan dan dengan PT.TELKOM yang memiliki kepentingan untuk mengenalkan produk PSB *online* kepada Dinas Pendidikan dalam penggunaannya untuk kemudahan aktivitas pengelolaan administrasi pendidikan di Lembaga Pendidikan.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan maka dalam perumusan kebijakan SIAP *online* pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur yang mendapat instruksi dari Kemendikbud untuk menjalankan kebijakan SIAP *online* bersama dengan PT.TELKOM. dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak ikut dalam pembuatan modul-modul yang ada dalam layanan SIAP *online* karena semua modul-modul dalam layanan SIAP *online* ini dirancang oleh PT.TELKOM. dengan kerjasama antara Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan PT.TELKOM dalam proses perumusan kebijakan ini Dinas Pendidikan hanya melihat keberhasilan yang telah dicapai oleh PT.TELKOM dalam PSB *online* yang telah lama dilaksanakandan sukses mempermudah urusan administratif penerimaan

siswa baru di daerah-daerah. Hasil observasi ini juga didukung dengan hasil wawancara diungkapkan oleh Bapak Delrizki Lutfi selaku *account manager & support division* sebagai berikut:

“...Rancangan isi dari kebijakannya itu dari PT.TELKOM. dari pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur waktu membuat MOU itu hanya ingin mendukung pengembangan dari produk PSB *online* milik PT.TELKOM tapi dengan modul lain yang lebih banyak namun tidak merinci modul apa saja jadi semua diserahkan pada PT.TELKOM, padahal ya harusnya tidak hanya PT.TELKOM yang merumuskan isi kebijakan itu tapi bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur”. (wawancara dengan Bapak Rizki tanggal 8 januari 2014 di kantor PT.TELKOM Malang)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rizki di tersebut telah mendukung hasil observasi yang menjelaskan bahwa rumusan kebijakan SIAP *online* ini merupakan hasil dari PT.TELKOM untuk memberikan nilai tambah dalam layanan SIAP *online* dengan berbagai modul-modul seperti PPDB, Padamu Negeri, Manajemen dana BOS, Web Sekolah dll. maka dari hasil observasi tentang formulasi kebijakan SIAP *online*, evaluasi yang bisa dilihat dari tahap formulasi atau pengambilan keputusan dari kebijakan SIAP *online* ini terletak pada peran aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan isi kebijakan. dari pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan dari produk PSB *online* yang menjadi awal dari kebijakan SIAP *online* pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur hanya mengeluarkan MOU kerjasama dengan PT.TELKOM yang kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan SIAP *online*. Dari hasil observasi

yang telah dilakukan juga dapat disimpulkan Seharusnya Dinas Pendidikan dalam perumusan isi kebijakan SIAP *online* ini bisa lebih berkontribusi dengan melihat permasalahan yang ada di lapangan yaitu yang dialami oleh Lembaga Pendidikan di seluruh Jawa Timur dengan memonitoring lewat Dinas Pendidikan di setiap kota dan kabupaten sehingga dapat memberikan tambahan modul yang tepat sasaran dalam memecahkan masalah administratif yang di alami oleh baik Lembaga Pendidikan dan Dinas Pendidikan di setiap kota atau kabupaten di Jawa Timur. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Uripan selaku *account manager marketing SIAP online* sebagai berikut:

“...Jadi bisa dilihat kontribusi dari Dinas Pendidikan Jawa Timur disini itu hanya dari sisi hukumnya saja dengan mengeluarkan MOU dan juga surat edaran-edaran untuk setiap Dinas Pendidikan di Jawa Timur termasuk kota Malang agar menggunakan kebijakan SIAP *online* ini untuk mempermudah urusan yang bersifat administratif yang ada di Lembaga Pendidikan, tidak pada formulasi jadi kebijakan SIAP *online* ini dirancang untuk apa dan modul apa saja yang perlu ditambahkan itu Dinas Pendidikan Jawa Timur dan langsung dari perintah Kemendikbud menyerahkannya kepada TELKOM.” (wawancara dengan Bapak Uripan tanggal 28 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Uripan tersebut telah menjelaskan dari hasil observasi bahwa aktor yang lebih berkontribusi dalam formulasi kebijakan SIAP *online* ini yaitu pihak PT.TELKOM. Namun untuk evaluasi terkait dengan ketepatan dalam formulasi kebijakan SIAP *online* untuk memecahkan masalah publik yaitu untuk mempermudah dalam urusan administratif pendidikan yang terintegrasi

dapat tercapai dengan adanya layanan SIAP *online* yang mampu mengintegrasikan seluruh portal sekolah dalam satu layanan yang dapat dilakukan dengan *online*. Namun di sisi lain evaluasi bisa diarahkan kepada keterlibatan setiap aktor untuk berkontribusi penuh dalam perumusan formulasi kebijakan SIAP *online*.

2. Implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang

a. Proses Proses implentasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan menunjukkan perjalanan kerjasama PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan kota Malang itu sudah mulai sejak tahun 2003 yaitu dalam pelaksanaan SIAP *online*. Namun kerjasama tersebut masih terbatas pada pelaksanaan SIAP PSB *online* saja yaitu dimana PT.TELKOM sebagai penyedia konektivitas internet dan yang membuat sistem PSB *online* untuk kota Malang juga memberi pelatihan kepada admin atau operator sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan surat tugas resmi untuk menjalankan PSB *online* untuk tingkat SMP dan SMA. Hal ini didukung dengan yang diungkapkan oleh Bapak Delrizki Lutfi selaku *account manager & support division* sebagai berikut:

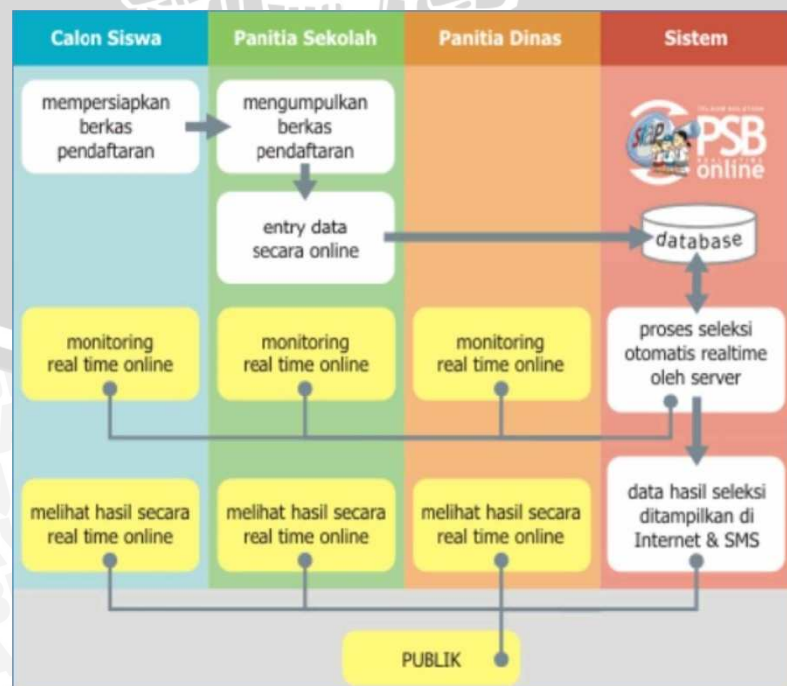
“...Jadi PT.TELKOM itu sejak tahun 2003 sudah melaksanakan PSB *online* dikota Malang ini, yang menyediakan koneksi internetnya dan memberikan sosialisasi ke admin-admin yang sudah ditunjuk oleh sekolah-sekolah.” (wawancara dengan Bapak Rizki tanggal 8 januari 2014 di kantor PT.TELKOM Malang)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rizki tersebut telah menjelaskan bahwa awal kerjasama Dinas Pendidikan kota Malang dengan PT.TELKOM dalam penggunaan layanan SIAP *online* sebelum adanya kewajiban kebijakan SIAP *online* dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kerjasama antara PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan Kota Malang memang merupakan komitmen kota Malang sendiri dalam pelaksanaan PSB *online* sebelum kebijakan SIAP *online* menjadi kebijakan dari Provinsi Jawa Timur. pada awal pelaksanaan PSB *online* dikota Malang ini bernama PSB *online* RTO (*Real Time Online*) yang merupakan serangkain dari proses yang meliputi:

1. Proses pendaftaran
2. Proses seleksi
3. Proses pengumuman hasil seleksi
4. Proses pendaftaran ulang
5. Proses penerimaan

Gambar 7.

Alur sistem PSB *online* RTO



Keterangan dari gambar 7 adalah sebagai berikut:

Calon siswa mengumpulkan berkas pendaftaran ke panitia sekolah kemudian panitia sekolah *entry* data secara *online* yang secara otomatis masuk *database* PT. TELKOM, selanjutnya PT. TELKOM yang menjalankan program PSB secara *online* yang bisa dimonitoring oleh panitia Dinas, panitia sekolah dan juga calon siswa kemudian hasil dari PSB *online* di tampilkan di internet dan juga sms oleh PT.TELKOM dan kemudian bisa di lihat oleh publik hasil dari PSB *online*.

Setelah sukses dalam beberapa tahun kerjasama antara PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan kota Malang dalam pelaksanaan SIAP PSB *online* RTO, pelaksanaan SIAP *online* dikota Malang setelah dikeluarkan kebijakan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur ini semakin beragam, yaitu dengan mulai digunakannya modul padamu negeri yang terdapat dalam layanan SIAP *online*.

Modul padamu negeri merupakan modul yang digunakan untuk pendataan NUPTK guru, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dan layanan evaluasi diri sekolah (EDS) untuk semua sekolah. Penggunaan modul padamu negeri ini yang menjadikan layanan SIAP *online* ini harus dilaksanakan oleh setiap sekolah. Karena sebelum ada kebijakan dari Kemendikbud yang

bekerjsama dengan PT.TELKOM layanan SIAP *online* itu tidak wajib untuk dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan maupun sekolah yang ada di Indonesia.

Setelah adanya nilai tambah dari layanan SIAP *online* yaitu dengan adanya modul padamu negeri, layanan SIAP *online* ini menjadi wajib untuk digunakan. Kewajiban penggunaan modul padamu negeri ini sesuai dengan surat keputusan dari Kemendikbud dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan juga surat edaran dari kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam yang secara garis besar berisikan tentang kewajiban setiap sekolah untuk berkoordinasi dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) untuk mendaftarkan NUPTK guru dalam rangka pendataan secara terintegrasi seluruh Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Uripan selaku *account manager* divisi *business service* marketing SIAP *online* sebagai berikut:

“...Jadi ya SIAP *online* ini menjadi wajib digunakan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan kerana ada modul padamu negeri itu, jadi kan sekolah harus menggunakan padamu negeri untuk mempermudah dalam urusan pendataan guru supaya lebih cepat dan sekolah langsung cepat mau menggunakan padamu negeri ini karena lebih mudah. Dan sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak” (hasil wawancara dengan Bapak Uripan tanggal 28 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang)

Namun hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan NUPTK guru lewat modul padamu negeri dalam layanan SIAP *online* di kota Malang ini masih banyak kendala yaitu karena adanya kebijakan dari Direktorat Jendral Pendidikan yang juga mewajibkan sekolah dalam pendataan NUPTK guru, NISN siswa, NPSN sekolah dan EDS sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini melalui DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang dilakukan secara *online*. Kebijakan dapodik ini sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jendral Pendidikan. Pada dasarnya dapodik bukanlah progam pengganti padamu negeri, Layanan padamu negeri dikelola oleh BPSDMPK-PMP Kemedikbud bekerjasama dengan PT. TELKOM secara legal dalam rangka pelaksanaan tupoksi Penjaminan Mutu Pendidikan melalui program EDS dan VerVal NUPTK yang telah berlangsung setiap tahun sejak tahun 2006 hingga saat ini. Dari kerjasama tersebut Sistem padamu negeri dibangun diatas “Platform” Aplikasi SIAP *Online* Edisi Gratis (Bebas Biaya) milik PT. TELKOM. Didukung dengan wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Tutik selaku *account manager* divisi *business service marketing* SIAP *online* sebagai berikut:

“...Jadi sekarang ini ada dua yang harus dikerjakan oleh admin dan operator sekolah dalam pengisian NUPTK, NISN dan NPSN lewat padamu negeri dan DAPODIK, dan masalahnya itu admin dan operatornya itu tidak mengerti mana yang harus di isi padahal keduanya itu wajib kan sudah ada surat edarannya juga, dampaknya ya pelaksanaan SIAP *online* ini agak lambat lah dikota Malang ini.”

(hasil wawancara dengan Ibu Tutik Sri Astutik tanggal 13 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tutik mendukung hasil observasi yang telah dilakukan bahwa hal yang menghambat pelaksanaan layanan SIAP *online* dikota Malang ini kerana adanya dua kebijakan yang harus digunakan dalam pendataan NUPTK,NISN dan NPSN yang keduanya harus dilaksanakan karena sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh masing-masing lembaga yang menerangkan kegunaan dari progam DAPODIK dan juga modul padamu negeri.

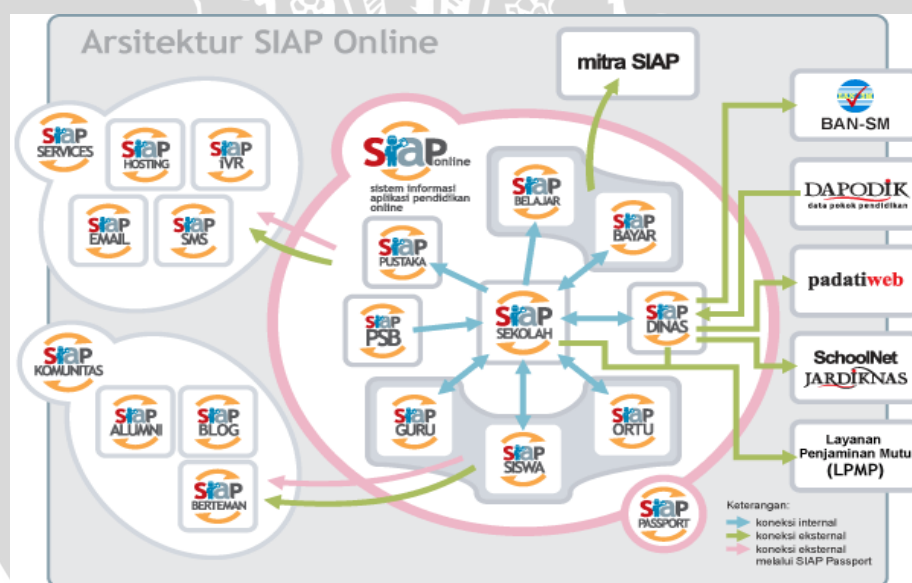
Padamu Negeri terbuka untuk menunggu hasil DAPODIK secara menyeluruh agar bisa segera berbagi data yang akurat melalui Pendidikan Dasar Sikap dan Profesi (PDSP) sehingga layak menjadi sumber referensi data utama bagi unit kerja lainnya yang membutuhkan termasuk Padamu Negeri BPSDMPK-PMP. Jika nantinya hasil DAPODIK telah siap dan terbuka akses datanya melalui PDSP maka Padamu Negeri tentu akan menyesuaikan di periode selanjutnya. DAPODIK juga digunakan untuk penyaringan penerimaan dana bantuan BOS, tunjangan guru, rehabilitasi sekolah dan bantuan sarana dan prasarana sekolah.

Hasil observasi menunjukkan Pelaksanaan kedua kebijakan yang harus dilaksanakan oleh semua sekolah inilah yang menjadikan pelaksanaan kebijakan SIAP *online* menjadi terhambat. Keterhambatan pelaksanaannya ini dikarenakan banyak dari operator dan admin sekolah-

sekolah yang ada di kota Malang ini bingung dan belum mengerti apa kegunaan padamu negeri dan juga DAPODIK. Sehingga jangka waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan pendataan baik NUPTK, NISN dan NPSN menjadi terlambat. Padahal kebijakan DAPODIK merupakan program pendukung yang digunakan sebagai referensi dalam pendataan NUPTK, NISN dan NPSN secara terintegrasi dalam modul padamu negeri dalam layanan SIAP *online*.

Gambar 8.

Arsitektur SIAP *online*



Keterangan dari gambar 8 adalah sebagai berikut:

Pada layanan SIAP *online* dalam SIAP Dinas terdapat modul padamu negeri kemudian garis panah hijau menandakan koneksi eksternal yang menunjuk pada program DAPODIK yang artinya adalah

adanya hubungan antara padamu negeri dengan DAPODIK namun tidak termasuk dalam layanan SIAP *online*. Sedangkan garis panah biru menunjukkan koneksi internal yang berarti termasuk dalam layanan SIAP *online*. Hasil observasi ini juga didukung dengan pernyataan bapak oleh Bapak Uripan selaku *account manager* divisi *business service* marketing SIAP *online* sebagai berikut:

“...Ya memang pada kenyataannya pelaksanaan kedua kebijakan ini membuat banyak admin disekolah-sekolah itu bingung untuk apa dijalankan keduanya, padahal SIAP *online* dengan DAPODIK itu merupakan kebijakan yang berkesinambungan karena kebijakan DAPODIK merupakan program pendukung yang digunakan sebagai referensi dalam pendaatan NUPTK, NISN dan NPSN yang nantinya bakal dikesinambungkan dengan data yang dari SIAP *online*”. (hasil wawancara dengan Bapak Uripan tanggal 28 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang)

Sehingga pada pelaksanaan SIAP *online* di kota Malang ini masih belum dapat sempurna yaitu masih harus adanya banyak sosialisasi antara PT.TELKOM selaku pelaksana kebijakan ini kepada sekolah-sekolah yang ada di kota Malang agar mengerti penggunaan modul-modul dalam layanan SIAP *online*.

b. Prosedur implementasi kebijakn SIAP *online* dikota Malang

Dari hasil obeservasi yang telah dilakukan berkaitan dengan pemasangan layanan SIAP *online* bahwa tahap pemasangan layanan SIAP *online* memiliki prosedur yang diawali dengan pengisian *user name* dan *password* oleh admin atau operator masing-masing sekolah, ID dan *password* diberikan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur kepada Dinas

Pendidikan kota Malang yang kemudian diberikan secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada dikota Malang. Tahap berikutnya adalah dengan membuka web www.siap-online.com dan mengisi SIAP ID dan juga *password* sesuai dengan ID dan *password* dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Setelah terdaftar dalam SIAP *online* maka akan langsung masuk dalam layanan SIAP *online*. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Delrizki Lutfi selaku *account manager & support division* sebagai berikut:

“...jadi pada awalnya Dinas Pendidikan kota Malang itu diberikan *password* dan ID dari Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk dibagikan ke admin atau operator di masing-masing sekolah yang kemudian itu nantinya digunakan untuk mendaftar *siap online* atau untuk masuk ke webnya SIAP *online* tahap awalnya seperti itu kemudian mereka tinggal buka webnya SIAP *online* dan tinggal di isi saja *password* dan ID nya.” (wawancara dengan Bapak Rizki tanggal 8 januari 2014 dikantor PT.TELKOM Malang)

Dari hasil observasi juga menemukan bahwa didalam layanan SIAP *online* terdapat banyak modul-modul yang berbeda prosedur dalam penggunaannya. Ada dua modul dalam layanan SIAP *online* yang memiliki prosedur yang berbeda dalam penggunaannya. Yaitu modul PPDB *online* dan modul Padamu negeri. selain kedua modul tersebut modul-modul yang lain lain dalam SIAP *online* dapat di secara langsung didapat dan dijalankan oleh admin dan operator sekolah sendiri seperti profil sekolah dll. hal ini juga didukung dengan yang diungkapkan oleh Bapak Uripan selaku *account manager* divisi *business service* marketing SIAP *online* sebagai berikut:

“... prosedur awalnya admin atau operator dari masing-masing sekolah itu mendaftar dengan memasukkan ID dan *password* yang sudah diberikan kalau sudah itu langsung bisa mengoperasikan SIAP *online* tapi tidak untuk modul Padamu negeri dan PPDB *online* karena itu da prosedur tersendiri dan itu prosedurnya agak lebih panjang dan melibatkan pihak TELKOM dan Dinas Pendidikan kota Malang.” (hasil wawancara dengan bapak Uripan tanggal 28 desember 2013 dikantor TELKOM Malang).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Uripan tersebut telah menjelaskan bahwa ada prosedur tersendiri dalam pelaksanaan modul PPDB *online* dan modul Padamu negeri dan itu tidak langsung dijalankan sendiri oleh admin atau operator sekolah. Dalam modul PPDB *online* dan modul Padamu negeri terdapat keterlibatan pihak PT.TELKOM dan juga Dinas Pendidikan kota Malang untuk dapat menggunakan modul-modul tersebut.

Pada prosedur pendaftaran SIAP *online* itu dapat secara langsung secara *online* dan ketika sudah mendaftar maka akan secara otomatis data sekolah akan masuk dalam *database* layanan TELKOM SIAP *online* yang dikelola oleh PT.TELKOM. prosedur dalam petunjuk teknis (juknis) pendaftaran modul PPDB *online* dalam layanan SIAP *online* diawali dengan kesepakatan Pihak PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan kota Malang yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan PPDB *online* kemudian Sistem akan dikonfigurasi atau disetting menyesuaikan dengan Juknis atau Aturan dan Prosedur resmi yang telah ditetapkan (jaminan *Rules by System*).

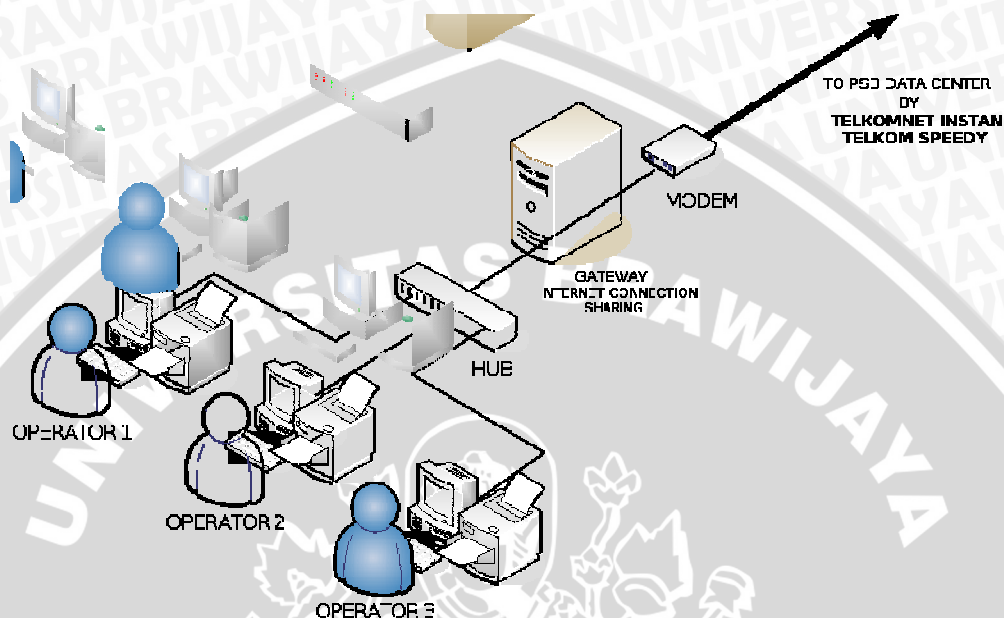
Setelah adanya kesepakatan antara pihak PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan kota Malang maka PT.TELKOM akan mengumpulkan semua admin atau operator seluruh sekolah dan juga petugas Dinas Pendidikan untuk membentuk panitia dalam PPDB *online* dalam pemeriksaan berkas-berkas siswa. setelah kepanitiaan terbentuk maka PT.TELKOM selaku pengelola *database* modul PPDB *online* dalam layanan SIAP *online* memberikan sosialisasi dan juga berita acara siap operasi (BASO) yang berisikan tentang kesepakatan kerjasama seluruh sekolah di Malang tingkat SMP dan SMA dalam pelaksanaan PPDB *online*. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Uripan selaku *account manager* divisin *business service* marketing SIAP *online* sebagai berikut:

“...dalam juknis itu ada kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan juga PT.TELKOM dalam prosedur pelaksanaan PPDB *online*, pihak kami mengumpulkan semua admin atau operator dan juga petugas Dinas Pendidikan kota Malang untuk jadi panitia yang melakukan pemeriksaan berkas atau formulir pendaftaran calon siswa.” (hasil wawancara dengan Bapak Uripan tanggal 28 januari 2013 dikantor PT.TELKOM Malang)

Dalam wawancara diatas menjelaskan prosedur PPDB *online* yang dipimpin diarahkan oleh PT.TELKOM. hal ini juga didukung dari hasil observasi bahwa dalam prosedurnya PPDB *online* yang melibatkan banyak kepanitiaan ini juga memiliki alur yang saling berhubungan yaitu baik antara pihak PT.TELKOM, Dinas Pendidikan maupun dengan admin atau operator masing-masing sekolah. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 9.

Gambar. 9

Infrastruktur jaringan PT.TELKOM, Sekolah dan Dinas Pendidikan



Keterangan dari gambar 9 adalah sebagai berikut:

1. Pada operator pertama bagian pusat layanan informasi yang bertugas dalam pusat informasi pelaksanaan PPDB dan pembinaan konseling masyarakat
2. Pada operator kedua bagian admin sistem (operator Dinas) yang bertugas Melaksanakan proses approval koreksi, mengatur jadwal, mengatur daya tampung, monitoring, user manajemen dan laporan data.
3. Pada operator ke tiga bagian pendataan (operator khusus) yang bertugas Melakukan penerimaan berkas, verifikasi berkas, entri data dan pengelolaan berkas tanda bukti pendataan.

Hasil obervasi lainya adalah pada prosedur pelaksanaan modul padamu negeri ini diawali dengan pendaftaran ID dan *password* admin dan oprator sekolah untuk dapat menjalankan modul padamu negeri ini seperti pada gambar 10.

Gambar 10.

Gambar tampilan log in padamu negeri



Keterangan gambar 10 adalah sebagai berikut:

1. Untuk aktivasi NISN dan NPSN memulai log in padamu negeri maka admin atau opertor harus memasukan *password* dan ID pada kolom log in sekolah
2. Untuk aktivasi NUPTK tenaga kependidikan atau PTK log in pada kolom log in PTK
3. Dan untuk Dinas Pendidikan kota Malang klik log in DISDIK kabbupaten atau kota.

Setelah aktivasi ID dan *password* maka admin atau operator dapat mengunduh formulir untuk mengisi data-data untuk pendataan NUPTK, NISN dan NPSN. Prosedur pelaksanaan padamu ini terdiri dari beberapa tahap yang panjang sebagai berikut:

1. PENGAMBILAN & PENYERAHAN FORMULIR A01 / A02 / A03 / A04

- Unduh Formulir di Situs Padamu Negeri Kemdikbud.
- Formulir yang diunduh tergantung kondisi NUPTK. Jika NUPTK berada di sekolah induk dan sudah tercatat aktif di sekolah induk, maka yang diunduh secara otomatis adalah Formulir NUPTK-A01. Isi data dengan lengkap sesuai petunjuk dilampiri Foto Berwarna 4x6 1 lembar, 1 lembar Foto Copy Akte Kelahiran, 1 lembar Fotocopy

Ijazah SD, 1 lembar fotocopy ijazah terakhir, 1 lembar fotocopy SK Pengangkatan Kepegawaian.

- Formulir yang sudah diisi diserahkan kepada Admin/Operator Sekolah.
- Setelah berkas divalidasi Admin/Operator Sekolah, PTK akan mendapatkan Tanda Bukti VerVal Lv.1

2. AKTIVASI AKUN & PENGISIAN FORMULIR ONLINE

- Setelah mendapatkan Tanda Bukti VerVal Level 1 dari Admin/Operator Sekolah. PTK harus mengaktifasi akun-nya secara mandiri lewat internet, dilanjutkan dengan melakukan pengisian data rinci pada situs <http://padamu.siap.web.id>. Akun untuk login dan mengakses formulir online tersebut tertera didalam Tanda Bukti VerVal Lv.1
- Data yang harus diisikan adalah :
 - o Melengkapi Formulir Isian EDS (Evaluasi Diri Sekolah).
 - o Melengkapi Data Rinci NUPTK.
- Setelah semua data diisi, PTK kemudian mencetak lembar pengajuan VerVal lv.2.
- Serahkan berkas dan Kode Pengajuan VerVal lv. 2 ke Admin/Operator Sekolah. Setelah divalidasi, PTK akan mendapatkan Tanda Bukti VerVal Lv.2 yang menyatakan bahwa NUPTK yang bersangkutan telah permanen aktif tahun 2013.

- Selesai.

3. VERIFIKASI & VALIDASI (VerVal) FORMULIR A02 / A03 / A04

- 1) Alur ini dijalani oleh PTK yang ketika Unduh Formulir ternyata mendapatkan Formulir NUPTK-02 atau Formulir NUPTK-03. Formulir 03 adalah NUPTK berada pada sekolah yang belum verifikasi. Sedangkan Formulir 02 adalah NUPTK dinyatakan tidak aktif pada sekolah induk. Khusus Formulir 04 adalah untuk Pengawas Sekolah.
- 2) Isi data pada Formulir 02/03/04 sesuai petunjuk. Setelah itu, Formulir diserahkan kepada Admin/Operator Disdik Kabupaten. Setelah formulir diverifikasi, petugas akan memberikan Formulir A01 untuk PTK yang menyerahkan Formulir A02 & A03, sedangkan untuk PTK yang menyerahkan Formulir A04 (Pengawas Sekolah), petugas memberikan Tanda Bukti VerVal lv.1

4. ALUR 04 - VERIFIKASI & VALIDASI (VerVal) FORMULIR A01

- Alur ini dijalani oleh Petugas di lokasi Sekolah setelah menerima Formulir A01 dari PTK.

- Setelah formulir diverifikasi, petugas memberikan Tanda Bukti VerVal lv.1 kepada PTK. PTK kemudian melakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam alur 01-alur 02 sampai kemudian NUPTK menjadi permanen aktif.
- Jika data PTK tidak ditemukan dalam sistem, maka petugas memberikan Formulir A02 kepada PTK. PTK menyerahkan kembali kepada Operator Disdik kota.

5. ALUR 05 - VERIFIKASI & VALIDASI (VerVal) FORMULIR ONLINE & BERKAS

- Alur ini dijalani oleh Petugas di lokasi Sekolah maupun di lokasi Dinas Pendidikan, setelah menerima Pengajuan VerVal berupa KODE VerVal dari PTK.
- Setelah melakukan verifikasi dan validasi hasil isian PTK, petugas memberikan Tanda Bukti VerVal Lv. 2 kepada PTK. Maka PTK yang bersangkutan dinyatakan permanen aktif.

Pada prosedur pelaksanaan modul padamu negeri ini PT.Telkom bertugas pada pengelolaan *database* dari data seluruh NUPTK, NISN dan NPNS seluruh sekolah yang ada di kota Malang, untuk verifikasi data dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota Malang dan diserahkan oleh operator untuk di input kedalam web padamu negeri pada layanan SIAP *online*. Untuk formulir hanya dapat diunduh oleh operator dan sudah ada

di dalam web padamu negeri. Hasil observasi tersebut juga didukung dengan seperti yang dijelaskan Bapak Delrizki Lutfi *selaku manager marketing & support division* sebagai berikut:

“...Kalo prosedurnya Padamu Negeri itu lebih panjang daripada yang lain, tidak bisa langsung bisa mengunakanya, awalnya memang sama harus log in dulu ID dan *password*nya setela itu harus unduh formulir, mengisi formulir lalu verifikasi formulir Dan itu dilakukan secara *online*.” (wawancara dengan Bapak Rizki tanggal 8 januari 2014 dikantor PT.TELKOM Malang)

Dari wawancara dengan Bapak Rizki tersebut telah menjelaskan bahwa prosedur penggunaan modul Padamu Negeri ini lebih panjang daripada modul yang lain yang ada di dalam layanan SIAP *online*. Karena harus melewati validasi data dari Dinas Pendidikan kota Malang, namun semua rangkain prosedur penggunaan modul Padamu negeri ini bisa cepat prosesnya karena dilaksanakan secara *online*.

3. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* dikota Malang

a. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* terhadap Lembaga pendidikan dikota Malang

Hasil obervasi yang telah dilakukan menunjukkan perjalanan implementasi kebijikaan SIAP *online* dikota Malang yang dimulai tahun 2012 sampai tahun 2014 masih belum terlaksana secara optimal. Dalam pelaksanaannya di Lembaga pendidikan kota Malang masih belum menyeluruh dan masih ada yang tidak mengerti tentang SIAP *online*. juga masih ada beberapa lembaga pendidikan kota Malang yang belum

bisa memanfaatkan layanan SIAP *online* dan modul-modul yang ada dalam layanan SIAP *online*. Hasil observasi ini juga didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Uripan selaku *account manager* marketing SIAP *online* sebagai berikut:

“...dikota Malang ini masih banyak yang belum kenal SIAP *online* saya juga heran padahal sudah ada sosialisasi tapi itu bisa terjadi ternyata karena tidak ada jaringan internet juga dan banyak guru yang tidak *update* informasi tentang dunia pendidikan”. (wawancara dengan Bapak Uripan tanggal 28 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang)

Didukung juga dengan pernyataan hasil wawancara dengan Heni Purwanto selaku operator SIAP *online* dari SMPN 9 Malang sebagai berikut:

“...Kalau di SMPN 9 Malang itu sudah tau karena sudah ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan kota Malang, tetapi waktu saya ikut sosialisasi yang dikumpulkan semua di Dinas Pendidikan kota Malang ternyata tidak semua sekolah-sekolah tahu tentang SIAP *online*. karena masih banyak guru-guru yang juga kurang aktif mencari tahu tentang SIAP *online* ini”. (hasil wawancara dengan Bapak Heni Purwanto tanggal 29 desember 2013 dikantor sekolah SMPN 9 Malang)

Dari hasil observasi juga menunjukkan bahwa di Lembaga pendidikan kota Malang masih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang tidak bisa menggunakan layanan SIAP *online* ini secara optimal. Karena yang terjadi dilapangan adalah adanya kendala-kendala sehingga pelaksanaan layanan SIAP *online* ini terhambat. Kendala dalam pelaksanaan SIAP *online* di lembaga pendidikan dikota Malang disebabkan oleh ketidak sesuaian prosedur yang harus dilakukan oleh

setiap sekolah-sekolah di kota Malang untuk dapat menjalankan layanan SIAP *online*. Hal ini didukung dengan wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Uripan selaku *account manager* marketing SIAP *online* sebagai berikut:

“...Sekolah-sekolah yang ada di kota Malang ini masih belum semuanya menggunakan layanan SIAP *online* secara penuh, karena mereka itu tidak mau mengikuti prosedur yang ada dan hanya mau menggunakan SIAP *online* ini hanya untuk modul padamu negeri untuk yang sekolah tingkat dasar kalau yang tingkat SMP dan SMA ya lumayan sudah banyak yang mengerti lah.” (wawancara dengan Bapak Uripan tanggal 28 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Uripan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Agung Prasetya selaku operator SIAP *online* dari SDN Sumpersari 2 Malang sebagai berikut:

“...kalau penggunaan SIAP *online* di tingkat SD itu kan Cuma modul padamu negeri dan pelaporan dana BOS yang paling sering, tapi kalau PPDB *online* kan SD tidak pakai. Jadi mungkin itu juga alasan mengapa paling banyak dari sekolah SD yang tidak mengikuti secara penuh kebijakan SIAP ini”. (wawancara dengan Bapak Agung Prasetya tanggal 29 desember 2013 dikantor sekolah SDN Sumpersari 2 Malang)

Didukung juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Suhartono selaku orang tua dari Arya irfan hanif a.n. siswa dari SMPN 2 kota Malang sebagai berikut:

Saya merasa penggunaan SIAP *online* ini sudah lumayan lancar ya karena waktu mengantar anak saya ke sekolah untuk daftar ke tingkat SMP sudah lumayan banyak orang tua yang mengerti penggunaan SIAP *online* tapi kalau ditingkat SD mungkin banyak yang belum tahu ya karena kan untuk daftar ke tingkat SD tidak menggunakan SIAP PPDB *online*.”. (hasil wawancara dengan Bapak Suhartono selaku orang tua dari Arya irfan a.n. siswa SMPN 2 kota Malang tanggal 29 desember di sekolah SMPN 2 Malang).

Dari ketiga hasil wawancara tersebut telah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan layanan SIAP *online* di beberapa sekolah tingkat SD dikota Malang masih ada yang belum mengikuti prosedur namun untuk yang SMP dan SMA lebih banyak yang sesuai dengan prosedur. Yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan layanan SIAP *online* ini masih banyak yang harus dievaluasi, selama proses berjalannya kebijakan SIAP *online* ini khususnya dilembaga pendidikan yang sebagai sasaran kebijakan SIAP *online* ini masih tidak patuh terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur dan juga surat edaran Dinas Pendidikan kota Malang dalam penggunaan layanan SIAP *online*.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagai sasaran kebijakan SIAP *online* lembaga pendidikan diharuskan mengikuti prosedur dalam pelaksanaan SIAP *online*. Seperti masing-masing sekolah harus menunjuk admin dan juga operator yang tugasnya khusus menjalankan SIAP *online* di masing-masing sekolah agar dapat memperbarui informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan terkait tentang progam pendidikan dll. namun pada kenyataanya masih ada beberapa sekolah yang belum mengikuti prosedur hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Tutik selaku *account manager* marketing SIAP *online* sebagai berikut:

“...Ada beberapa pihak sekolah yang tidak punya admin atau operator dan kepala sekolahnya itu tidak bisa menunjuk orang untuk jadi admin atau operator karena pegawainya atau guru di sekolah itu tidak bisa menggunakan komputer dengan baik bahkan yang kenal dengan internet saja masih sedikit jadi untuk menggunakan SIAP *online* dan *update* data untuk sekolahnya sendiri saja masih banyak yang tidak bisa karena tidak ada operator dan guru yang lainnya tidak mau karena menambah beban kerja.” (wawancara dengan Ibu Tutik tanggal 23 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang)

Didukung juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Ari Wiji Utomo selaku petugas server dari Dinas Pendidikan kota Malang sebagai berikut:

“...kalau saya lihat ini permasalahan yang ada di Lembaga pendidikan itu karena tidak adanya pihak yang khusus bertugas sebagai operator atau admin untuk setiap sekolah, padahal dari Dinas Pendidikan sudah menginformasikan pentingnya peran admin atau operator dalam pelaksanaan SIAP *online* disekolah karena itu yang menjalankan semua progam SIAP *online* untuk tingkat sekolah”. (hasil wawancara dengan Bapak Ari Wiji Utomo tanggal 30 desember 2013 dikantor Dinas Pendidikan Kota Malang).

Kemudian didukung juga dengan hasil wawancara dengan Bima Indah Purnama Jaya selaku siswa dari SMAN 8 Malang dari kelas X-IPS 3 sebagai berikut:

“...kalau dari pengalaman saya dulu waktu daftar SIAP PPDB *online* dulu itu lumayan lama karena saya kan harus melengkapi daftar biodata sama berkas-berkas yang lain kemudian diserahkan ke panitia sekolah yaitu operato SIAP *onlinenya* itu nah tapi lama waktunya sampai saya dapat hasil pengumumanya, saya juga sampai bolak-balik tanya ternyata pihak operatornya yang kuwalahan untuk memasukan data satu persatu calon siswa”. (hasil wawancara dengan Bima Indah Purnama Jaya selaku siswa dari SMAN 8 Malang dari kelas X-IPS 3 tanggal 28 desember 2013 di SMAN 8 Malang).

Dari hasil wawancara tersebut telah menjelaskan bahwa ada beberapa sekolah yang tidak mengikuti prosedur dalam proses pelaksanaan kebijakan SIAP *online* karena tidak memiliki operator atau admin untuk mengoperasikan SIAP *online* untuk masing-masing sekolah. Dan disamping itu pihak sekolah juga dalam memilih admin atau operator tidak memiliki kemampuan yang baik sehingga dapat menghambat proses berjalanya SIAP *online* di lembaga pendidikan di kota Malang, Padahal dalam surat edaran yang telah diterbitkan dari Dinas Pendidikan kota Malang dan Departemen Pendidikan Agama telah memberikan instruksi untuk menunjuk admin dan operator untuk masing-masing sekolah dan mengirimkan untuk mengoperasikan SIAP *online* di masing-masing sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak mengikuti prosedur SIAP *online* banyak dari tingkat SD.

Dengan tidak adanya admin atau operator di masing-masing sekolah maka akan berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan SIAP *online*. Banyak urusan administratif sekolah yang dapat dilaksanakan dalam satu layanan SIAP *online* ini tidak berjalan. Jika menurut formulasi kebijakan SIAP *online* ini adalah untuk mempermudah masalah administratif Lembaga pendidikan agar lebih cepat dan efisien sehingga data dapat langsung diterima oleh pusat namun karena adanya bagian prosedur yang tidak dilakukan maka akan menghambat ke efisienan dan ke efektifan seperti keinginan dari

Kemendikbud dalam fomulasi kebijakan SIAP *online* adalah untuk mempermudah dan mempercepat layanan administratif lembaga pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* terhadap PT.TELKOM WILTEL Malang

Sesuai dalam MOU anantara PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur bahwa PT.TELKOM adalah pelaksanaan dan juga yang membuat aplikasi kebijakan layanan SIAP *online* maka mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 PT.TELKOM mengimplementasikan kebijakan SIAP *online* sesuai dengan juknis kesepakatan yang ada didalam MOU. Selama pelaksanaan kebijakan SIAP *online* PT.TELKOM bertanggung jawab untuk melaksanakan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan kota Malang untuk menjalankan kebijakan SIAP *online*.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan bahawa petunjuk teknis pelaksanaan SIAP *online* PT.TELKOM memiliki *timeline* untuk pengenalan dan sosialisasi kebijakan SIAP *online* ke lembaga-lembaga pendidikan dikota Malang dengan dikumpulkan di Dinas Pendidikan kota Malang. Dan juga untuk melakukan koordiansi dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kota Malang untuk melaksanakan kebijakan SIAP *online* namun tanggung jawab PT.TELKOM lebih banyak dalam menjalankan kebijakan ini. *Timeline* untuk berkoordinasi dengan

Lembaga pendidikan dan Dinas Pendidikan kota Malang untuk pengenalan dan sosialisasi SIAP *online* mulai dari bulan maret dan berakhir bulan mei 2013. Namun yang terjadi dilapangan tenggang waktu tersebut tidak bisa dijalankan dengan sesuai. Hasil observasi ini juga Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Delrizki Lutfi selaku *manager marketing & support division* SIAP *online* sebagai berikut:

“...*Timelinenya* sebenarnya mulai melakukan pengenalan itu bulan maret sampe mei 2013 tapi sampai sekarang kita masih melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kota Malang karena banyak hambatan yang terjadi.” (wawancara dengan Bapak Rizki tanggal 8 januari 2014 dikantor PT.TELKOM Malang)

Dari wawancara dengan Bapak Rizki tersebut telah menjelaskan bahwa ada hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan *timeline* sosialisasi dan koordiansi SIAP *online* ini tidak sesuai. Hambatannya adalah persiapan PT.TELKOM dalam membuat proposal SIAP *online* untuk diberikan kepada Dinas Pendidikan kota Malang untuk di tindaklanjuti. Evaluasi dalam implentasi SIAP *online* untuk PT.TELKOM adalah persiapan yang kurang rapi dan cepat dalam persiapan proposal presentasi SIAP *online* sehingga mundur dari *timeline* yang ditargetkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tutik selaku *account manager marketing* SIAP *online* sebagi berikut:

“...Jadi memang setelah PT.TELKOM tandatangan MOU Telkom membuat proposal presentasi yang nanti akan diberikan ke Dinas Pendidikan kota Malang agar mengeluarkan surat edaran untuk sekolah-sekolah di Malang, mungkin pihak kami kurang cepat dalam mempersiapkan proposalnya sehingga pihak Dinas juga

lambat responya.” (wawancara dengan Ibu Tutik Sri Astutik tanggal 23 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang)

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan maka Evaluasi selama proses pelaksanaan kebijakan SIAP *online* untuk PT.TELKOM selain lebih teratur dengan *timeline* juga sesuai dengan prosedur yaitu harus lebih berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendukung program SIAP *online* seperti LPMP dan UPTD (unit pelaksana teknis daerah) dan juga LPMP sehingga tercipta koordinasi dengan baik. Karena dalam hal ini masih belum optimalnya pelaksanaan SIAP *online* ini karena juga ada beberapa progam yang juga wajib digunakan oleh Lembaga-Lembaga pendidikan seperti DAPODIK yang seberbarbya adalah progam pendukung dari SIAP *online* untuk pelengkap pendataan pendidikan. Sehingga aktor-aktor kebijakan dapat saling bersinergi dan menjalankan kebijakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis. hasil observasi ini juga didukung dengan yang diungkapkan oleh Ibu Tutik selaku *account manager* marketing SIAP *online* sebagai berikut:

“...koordinasi dan kesefahaman bersama itu yang masih kurang optimal kami dan Dinas Pendidikan kota Malang berusaha memberikan pengertian bahwa SIAP *online* ini dibuat untuk kebaikan bersama antara dinas dan juga sekolah-sekolah jadi wajib dipakai.” (wawancara dengan Ibu Tutik Sri Astutik tanggal 23 desember 2013 dikantor PT.TELKOM Malang)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tutik telah menjelaskan bahwa evaluasi hal yang bisa dijadikan evaluasi untuk PT.TELKOM adalah untuk meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kota Malang

agar dapat menjalankan SIAP *online* ini sesuai dengan cita-cita kebijakan ini yang ada dalam fomulasi yaitu dapat menciptakan kemudahan bagi Lembaga pendidikan maupun Dinas Pendidikan kota Malang dalam tugas pendataan guru yang ada dalam modul padamu negeri dan juga kemudahan dalam penerimaan siswa baru dalam modul PPDB *online* dalam layanan SIAP *online*.

B. pembahasan

1. Evaluasi formulasi Pengambilan keputusan atau kebijakan SIAP *online* di kota Malang

a. Masalah-masalah yang di hadapi oleh para aktor kebijakan

Kebijakan SIAP *online* merupakan suatu jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh Kemendikbud yang ingin mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sistem administrasi sekolah yang masih sangat lambat dalam proses pengerjaanya yang ada pada daerah-daerah. Sehingga Kemendikbud bekerjasama dengan PT.TELKOM untuk mengembangkan suatu sistem aplikasi administrasi sekolah yang dilakukan secara *online* dan terintegrasi agar dapat memudahkan permasalahan administrasi sekolah yang lambat dan tidak terintegrasi agar lebih cepat dan mampu dilakakukan secara *online* dan terintegrasi dari pusat sampai ke daerah-daerah. Begitu juga dengan kota Malang yang memiliki masalah tentang pendataan administrasi pendidikan yaitu mulai dari pengintegrasian data dan juga pendataan bagi guru dan siswa yang

tiap tahun bertambah jumlahnya sehingga membutuhkan sistem baru yang lebih cepat dan mudah untuk proses pendataan administrasi pendidikan.

Jika dilihat dari teori William N.Dunn menyebutkan setidaknya ada empat tahap dalam perumusan masalah, antara lain: *problem search* (pencarian masalah), *problem definition* (pendefinisian masalah), *problem specification* (menspesifikasi masalah), dan *problem sensing* (pengenalan masalah) Dunn (1999:226) maka permasalahan kebijakan ini bisa dinilai dengan mengacu pada teori tersebut yaitu:

Pada fase pencarian masalah, harus membedakan antara masalah publik dan masalah privat. Maka dalam kebijakan siap online ini masalah yang dihadapi adalah pengakomodiran kebutuhan-kebutuhan sistem administrasi sekolah yang masih sangat lambat dalam proses pengerjaannya yang ada pada daerah-daerah yang berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengelola data dan informasi pendidikan dengan lebih cepat, mudah, akurat, terpadu dan berkesinambungan dari mulai tingkat sekolah, dinas pendidikan kota, kabupaten, propinsi hingga pusat (Kemdikbud). Maka masalah kebijakan adalah masalah publik kerana dirasakan oleh seluruh Dinas Pendidikan mulai dari tingkat kabupaten atau kota sampai pusat dan juga menyangkut kepentingan Lembaga Pendidikan dan Dinas Pendidikan

agar dapat bekerja lebih cepat, mudah, akurat, terpadu dan berkesinambungan.

Tahap pendefinisian masalah dalam kebijakan SIAP *online* ini terjadi pengkategorian masalah-masalah yang bersifat dasar dan umum. Masalah yang bersifat dasar dari kebijakan SIAP *online* adalah dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sistem administrasi sekolah dengan cepat dan mudah berbasis teknologi informasi. Masalah umum dari kebijakan SIAP *online* ini adalah dari keinginan Kemendikbud untuk menciptakan suatu sistem administrasi pendidikan yang mampu mengintegrasikan seluruh Lembaga Pendidikan mulai dari tingkat kabupaten atau kota sampai ke tingkat pusat.

Pada tahap spesifikasi masalah adalah tahap untuk merumuskan masalah formal yang lebih rinci dan spesifik. Dalam kebijakan SIAP *online* bisa dispesifikasikan lebih rinci permasalahannya yaitu: kebutuhan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sistem administrasi sekolah dengan cepat dan mudah, pembuatan sistem berbasis teknologi informasi untuk pengintegrasian data administrasi pendidikan dari tingkat daerah sampai pusat, dan kebutuhan-kebutuhan aplikasi-aplikasi pendukung proses pembelajaran dan pengelolaan data-data kependidikan bagi sekolah dan dinas pendidikan bersifat administratif yang berbasis layanan teknologi informasi.

Tahap pengenalan masalah pada tahap ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara masalah substantif dan masalah formal. Dan pada kebijakan SIAP *online* antara masalah substansif dan masalah formal terdapat kesamaan yaitu dibutuhkan suatu sistem untuk dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sistem administrasi sekolah dengan cepat dan mudah yang dapat digunakan dengan menggunakan teknologi informasi.

Dari pembahasan diatas maka tujuan dari perumusan masalah publik ini adalah untuk memformulasikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh aktor-aktor kebijakan agar didapatkan masalah yang benar-benar menjadi masalah kebijakan yang akan di dirumuskan *problem solving* yang terbaik dalam kebijakan publik.

b. Proses pengambilan keputusan atau formulasi kebijakan SIAP *online*

Proses formulasi kebijakan merupakan proses dimana menjawab dari masalah kebijakan yang dihadapi oleh aktor dengan memberikan *problem solving* dan kemudian disusun dan dipilih untuk mendapatkan formulasi yang terbaik. untuk suatu kebijakan. tahap ini digunakan untuk mencari *problem solving* yang paling baik agar nanti kebijakan tersebut mampu mengani masalah publik dengan tepat.

Masalah-masalah kebijakan adalah produk pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi ini oleh para analisis. Dengan begitu, apa yang kita alami merupakan situasi masalah, bukan masalah itu sendiri, yang seperti atom atau sel, merupakan suatu konstruksi koseptual (William N. Dunn 1998:12)

Sama halnya dengan masalah yang ada dalam kebijakan SIAP *online* seperti jika William Dunn mengatakan maka masalah kebijakan adalah meruapakan hasil pemikiran dari Kemendikbud yang melihat kekurangan dalam sisitem pendataan administrasi pendidikan yang kemudian di analisis sehingga permasalahnya menjadi kebutuhan untuk membuat sistem baru di lingkungan pendidikan agar data dapat terorganisir dengan baik dalam suatu *database* yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi.

Kemudian dalam tahap formulasinya Menurut Anderson (2006:122-127), terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yakni: teori rasional-komprehensif; teori inkremental; serta teori *mixed scanning*. Teori rasional-komprehensif adalah teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai. Sementara itu, teori inkremental adalah teori yang intinya tidak

melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Adapun teori *mixed scanning* adalah teori yang intinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori inkremental.

Dari uraian tersebut maka, formulasi kebijakan SIAP *online* ini termasuk menggunakan teori rasional-komprehensif dalam perumusan kebijakannya. Karena Kemendikbud sebelum memutuskan untuk meresmikan kebijakan SIAP *online* dengan menurunkannya ke Dinas Pendidikan Jawa Timur, kemendikbud telah menganalisis bahwa adanya kekurangan dari sistem yang ada karena belum mampu mengakomodir kebutuhan administratif pendidikan padahal kebutuhan administratif pendidikan semakin beragam. Kemudian Kemendikbud menilai produk SIAP RTO dari PT.TELKOM yang berjalan bagus di banyak kota termasuk di kota Malang. Maka Kemendikbud mengajak kerjasama dengan PT.TELKOM untuk membuat sistem yang lebih bagus dan sempurna dari SIAP *online* RTO dengan penambahan modul-modul sesuai dengan kebutuhan administratif pendidikan seperti untuk pendataan NUPTK guru, pelaporan dana BOS dan juga PPDB *online*. Yang memanfaatkan teknologi informasi agar lebih mudah dan cepat dalam pendataan administratif pendidikan dana mampu terintegrasi dari tingkat daerah sampai tingkat pusat.

Dengan analisis yang komperhensif maka *problem solving* yang didapatkan akan lebih baik karena penilaian dari masalah kebijakan SIAP *online* dilakukan secara mendalam dan rasional. Karena memang dibutuhkan suatu sistem yang berbasis teknologi informasi agar dalam urusan administratif pendidikan bisa di integrasiakan dari pusat sampai daerah agar tidak ada data yang hilang atau rancu dan juga dapat memudahkan dalam proses pengerjaanya.

c. Evaluasi formulasi atau pengambilan keputusan kebijakan SIAP *online*

untuk dapat mengevaluasi formulasi atau pengambilan keputusan dari kebijakan publik dapat dilihat dari Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan / kebijakan menurut Nigro and Nigro dalam buku karya M. Irfan Islamy yang berjudul Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konsevatisme*)
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

(Dalam Islamy, 1986:25-26)

Melihat dari prinsip-prinsip perumusan kebijakan maka untuk mengevaluasi formulasi kebijakan SIAP *online* maka sesuai prinsip yang pertama yaitu melihat adanya pengaruh tekanan dari luar. Pada

proses formulasi kebijakan SIAP *online* melibatkan dua aktor yaitu Kemendikbud dengan PT.TELKOM yang dalam proses perumusannya tidak ada tekanan dari pihak luar atau aktor lain karena menurut MOU yang telah ditandatangani oleh kedua pihak untuk perumusan kebijakan dilakukan oleh dua pihak yaitu hanya dari pihak kemendikbud dan pihak PT.TELKOM sedangkan untuk urusan pembuatan modul dari SIAP *online* dan penyediaan koneksi internet dilakukan oleh PT.TELKOM.

Prinsip pengaruh kebiasaan lama, pada prinsip ini peneliti melihat dari kebijakan terdahulu sebelum SIAP *online* yaitu kebijakan DAPODIK dari Dirjen Pendidikan yang tidak melihat kebutuhan dari Lembaga Pendidikan sehingga tidak ada modul-modul pendukung untuk kebijakan yang lebih lengkap serta dalam tahap formulasinya hanya pada tingkat pusat dan dari Dirjen Pendidikan sendiri. Namun dalam kebijakan SIAP *online* tidak ada pengaruh dari kebiasaan lama dari kebijakan DAPODIK karena pada kebijakan SIAP *online* ini tidak terpengaruh dari model formulasi pada kebijakan DAPODIK yang hanya pada tingkat dirjen saja tanpa ada *sharing* dengan pihak lain untuk kerjasama dalam penyempurnaan kebijakan. serta pada kebijakan SIAP *online* juga Kemendikbud melihat tidak hanya dari kebutuhan kementrianya saja tapi juga kebutuhan Lembaga Pendidikan.

Prinsip pengaruh sifat-sifat pribadi. Menurut MOU dan FAQ dari kebijakan SIAP *online* tidak ditemukan adanya pengaruh sifat-sifat pribadi dari aktor kebijakan baik dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan Jawa Timur dan juga PT.TELKOM. hal ini terbukti dengan pembagian tugas antara kedua aktor yaitu pihak Kemendikbud terlibat dalam formulasi kebijakan dan juga meneruskannya ke Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan bentuk MOU dan juga surat edaran untuk payung hukum dari kebijakan SIAP *online*. Sedangkan PT.TELKOM juga selain terlibat dalam formulasi kebijakan juga mendukung dengan menangani pembuatan modul-modul SIAP *online* dan koneksi internet.

Prinsip pengaruh dari luar. Pada tahap formulasi kebijakan SIAP *online* tidak adanya pengaruh dari luar karena pada tahap formulasinya hanya dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan dua pihak yaitu kemendikbud dan juga PT.TELKOM yang memiliki peran besar dalam kebijakan SIAP *online*.

Prinsip pengaruh keadaan masa lalu. Formulasi kebijakan SIAP *online* memang merupakan penyempurnaan dari kebijakan terdahulu yang masih belum sempurna dalam proses implementasinya. Kebijakan terdahulu yaitu kebijakan DAPODIK hanya tidak dapat sepenuhnya dilakukan dengan *online* dan hanya sebatas untuk

pendataan guru. Sehingga prinsip adanya pengaruh keadaan masa lalu menjadi nilai positif untuk lebih mengembangkan sistem baru yang lebih lengkap.

2. Proses implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang

a. Proses implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang

Tahap implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan yang telah diputuskan kemudian dijalankan sesuai dengan isi kebijakan dan cita-cita dari formulasi kebijakan. Kamus Webster dalam Wahab (2005:64) merumuskan secara pendek bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

Kebijakan SIAP *online* ini dalam proses implementasinya dimulai dari dikeluarkannya ketapan dari Kemendikbud untuk menggunakan modul-modul padamu negeri, manajemen pelaporan dana BOS yang ada dalam layanan SIAP *online*. Ketetapan itu merupakan sarana yang diberikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kebijakan SIAP *online*. Ketetapan itu berdasarkan dari surat keputusan dari Kemendikbud dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan juga surat edaran dari kementerian Agama

Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam yang secara garis besar berisikan tentang kewajiban setiap sekolah untuk berkoordinasi dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) untuk mendaftarkan NUPTK guru dalam rangka pendataan secara terintegrasi seluruh Indonesia yang ada dalam layanan SIAP *online*.

Sehingga dengan adanya surat dari Kemendikbud dan juga Kemenag tersebut merupakan sarana hukum yang diberikan untuk mendukung pengimplementasian dari modul padamu negeri yang ada dalam kebijakan layanan SIAP *online* yang menjadikan wajib dilaksanakan. Selain sarana dalam bentuk payung hukum terdapat pula sarana yang melibatkan PT.TELKOM sebagai aktor yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan layanan SIAP *online* ini berupa teknologi informasi dan juga pengelolaan data base untuk modul padamu negeri yang ada dalam layanan SIAP *online* secara keseluruhan sehingga dapat terintegrasi.

Seperti yang juga diungkapkan oleh (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Maka dalam proses implementasi kebijakan layanan SIAP *online* ini merupakan pelaksanaan dari proses formulasi yang kemudian diwujudkan secara nyata untuk memngakomodir pendataan dan

administratif pendidikan sehingga memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan kebijakan dan mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan dan juga masyarakat.

b. Prosedur implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang

Prosedur pelaksanaan kebijakan SIAP *online* ini terdiri berupa bagian.yaitu untuk prosedur penggunaan SIAP *online* itu sendiri dan juga prosedur untuk penggunaan modul-modul yang ada dalam SIAP *online* yaitu modul padamu negeri dan juga modul PPDB *online*. Untuk prosedur penggunaan SIAP *online* ini diawali dengan pengisian *user name* dan *password* oleh admin atau operator masing-masing sekolah, ID dan *password* diberikan dari Dinas pendidikan Jawa Timur kepada Dinas Pendidikan kota Malang yang kemudian diberikan secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada dikota Malang. Tahap berikutnya adalah dengan membuka web www.siap-online.com dan mengisi SIAP ID dan juga *password* sesuai dengan ID dan *password* dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Setelah terdaftar dalam SIAP *online* maka akan langsung masuk dalam layanan SIAP *online*. Registrasi pengisian ID dan *user name* ini hanya dilakukan oleh admin atau opertaor yang ditunjuk untuk menjalankan akun SIAP *online* untuk masig-masing sekolah. Namun faktanya butuh waktu yang lama untuk setiap sekolah mengaktifkan status SIAP *online* yang sejak bulan Juni 2012 diberikan sampai bulan juli tahun 2013 masih banyak status sekolah yang belum aktif

menggunakan SIAP *online* karena tidak mengerti dan belum memiliki admin dan operator.

Untuk prosedur penggunaan modul PPDB *online* prosedur dalam petunjuk teknis (juknis) pendaftaran modul PPDB *online* dalam layanan SIAP *online* diawali dengan kesepakatan Pihak PT.telkom dengan Dinas Pendidikan kota Malang yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan PPDB *online* kemudian Sistem akan dikonfigurasi atau disetting menyesuaikan dengan Juknis atau Aturan dan Prosedur resmi yang telah ditetapkan (jaminan *Rules by System*).Setelah adanya kesepakatan antara pihak PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan kota Malang maka PT.TELKOM akan mengumpulkan semua admin atau operator seluruh sekolah dan juga petugas Dinas Pendidikan untuk membentuk panitia dalam PPDB *online* dalam pemeriksaan berkas-berkas siswa. setelah kepanitiaan terbentuk maka PT.TELKOM selaku pengelola *database* modul PPDB *online* dalam layanan SIAP *online* memberikan sosialisasi dan juga berita acara siap oprasi (BASO) yang berisikan tentang kesepakatan kerjasama seluruh sekolah di kota Malang tingkat SMP dan SMA dalam pelaksanaan PPDB *online*.

Untuk prosedur penggunaan modul Padamu Negeri terdapat banyak tahap untuk dilakukan yang melibatkan banyak aktor yaitu admin dan juga pihak Dinas Pendidikan kota Malang dalam mevalidasi berkas-berkas untuk pendataan NPTK guru dalam modul padamu negeri. namun

dalam prosedur pendataan NUPTK guru ini menjadi cepat karena semua berkas dapat diunduh dari web <http://padamu.siap.web.id>. Fakta yang terjadi dalam prosedur pelaksanaan Padamu Negeri yang diawali secara resmi pada tanggal 3 juni sampai 30 september 2013 mengalami kemunduruan dari target karena adanya jumlah verifikasi dan validasi NUPTK guru, registrasi PTK, pengajuan NUPTK baru serta monitoring dan pelaporan EDS (evaluasi diri sekolah) sebagaimana dalam surat keputusan Kemendikbud, maka ada formulir lain untuk keperluan yang lain yaitu antara lain:

2. Prosedur untk PTK lama yang terdiri dari
 - a. VerVal PTK Lv 1 - Pengambilan & Penyerahan Formulir
 - b. VerVal PTK Lv 2 - Pengisian Formulir *Online*
3. Prosedur untuk PTK baru yang terdiri dari
 - a. Registrasi PTK Baru Lv 1
 - b. Registrasi PTK Baru Lv 2 - Pengisian Formulir *Online*
 - c. Pengajuan NUPTK Baru
4. Presedur untuk petugas admin atau operator yang ditunjuk BPSDMPK-PMP yang terdiri dari
 - a. Penerimaan formulir A02 / A03 / A04
 - b. Penerimaan formulir A01
 - c. Penerimaan formulir A05 / A06

- d. Penerimaan SURAT S03a / S03b (Surat Ajuan VerVal Lv.2 PTK)
 - e. Penerimaan PAKTA S07a / S07b / S07c (Pakta Integritas PTK)
 - f. Penerimaan SURAT S06a / S06b / S06c / S06d / S06e (Pengajuan NUPTK Baru)
 - g. Penerimaan Berkas Ajuan NUPTK Baru
5. Prosedur untuk mutasi dan Non PNS aktif yang terdiri dari
- a. Pengajuan Mutasi Sekolah Induk PTK (SM01)
 - b. Penerimaan Pengajuan Mutasi Sekolah Induk (SM02/SM03)
 - c. Pengajuan Penonaktifan PTK (SM04)
 - d. Pengajuan Non aktif PTK sertifikasi dosen
 - e. Pengajuan perubahan data rinci PTK

Dengan banyak formulir yang berbeda-beda dalam urusan untuk pendataan pada modul padamu negeri ini mampu mempermudah kemendikbud dalam menklasifikasikan data-data yang masuk secara otomatis karena terdapat formulir tersendiri untuk berbagai keperluan pendataan guru dan PTK. Dan dengan semua formulir tersedia dalam web <http://cari.padamu.siap.web.id/#!/alur>. yang juga menampilkan keseluruhan alur dari Padamu Negeri.

3. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* di kota Malang

Dalam rangka meyakinkan berjalannya kebijakan SIAP *online* di kota Malang maka dibutuhkan kerjasama antar aktor kebijakan. aktor kebijakan yang terlibat sebagai objek atau sasaran kebijakan adalah Lembaga Pendidikan kota Malang. Sedangkan aktor yang bertugas untuk implementor dari kebijakan SIAP *online* adalah PT.TELKOM. SIAP *online* memang tidak hanya diperuntukan untuk membantu pekerjaan di Dinas Pendidikan saja tetapi juga untuk Lembaga Pendidikan.

Berkaitan tentang evaluasi menurut Nugroho (2004, h. 183). Mengatakan bahwa sebuah kebijakan tidak lepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”, evaluasi dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauhmana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Begitupun yang diungkapkan oleh Grindle (1980) bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi tidak berjalan mulus, tergantung pada *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis

manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program dan (6) sumberdaya yang dikerahkan. Wibawa (1994:22).

a. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* terhadap Lembaga Pendidikan kota Malang

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan SIAP *online* di lembaga pendidikan kota Malang ini telah diatur oleh MOU Dinas Pendidikan Jawa Timur, dan juga surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan kota Malang yang mengatur bahwa setiap sekolah agar mempunyai admin atau operator untuk mengoperasikan SIAP *online* dan semua modul yang didalamnya. Demikian MOU dan surat edaran dari Dinas pendidikan kota Malang dibuat agar sebagai panduan dan dasar hukum dalam pelaksanaan SIAP *online*.

Dari hasil penelitian dan wawancara bahwa pengimplementasian kebijakan SIAP *online* di Lembaga Pendidikan kota Malang menunjukkan hasil yang kurang bagus. Banyak dari sekolah dari tingkat sekolah dasar yang belum menggunakan layanan SIAP *online* secara penuh. Terutama di sekolah tingkat dasar masih yang tidak mengerti kegunaan dari setiap modul yang ada dalam layanan SIAP *online* kerana pada sekolah tingkat dasar hanya banyak menggunakan modul padamu negeri dan juga pelaporan dana BOS untuk yang PPDB

online memang hanya digunakan untuk tingkat SMP dan SMA. Namun untuk tingkat SMP dan SMA sudah banyak yang mengikuti prosedur kebijakan SIAP *online* yaitu dengan mengikuti tahap-tahap penggunaan semua modul yang ada di dalam SIAP *online* dan juga memiliki admin atau operator yang bertanggungjawab untuk menjalankan SIAP *online* untuk masing-masing sekolah.

Jika melihat dari teori yang diungkapkan oleh Grindle dalam Wibawa (1994:23) evaluasi implementasi di Lembaga Pendidikan kota Malang bisa dilihat dari isi kebijakan dalam konteks implementasi yaitu (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, (3) kepatuhan dan daya tangkap. Wibawa (1994:23).

Maka strategi aktor yang terlibat dalam *team* implementor kebijakan SIAP *online* belum memiliki strategi yang bagus dan matang dalam perencanaan pengimplementasian kebijakan. sehingga aktor yang sebagai sasaran kebijakan tidak mampu menangkap rencana dan juga informasi mengenai produk kebijakan. dan juga strategi dari aktor sasaran kebijakan SIAP *online* juga belum memiliki strategi yang matang untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Karakteristik lembaga juga mempengaruhi berjalannya kebijakan. Dinas Pendidikan kota Malang yang telah mengeluarkan surat edaran dan perintah untuk seluruh sekolah di kota Malang untuk

mengikuti sosialisai prosedur pelaksanaan kebijakan SIAP *online* begitupun juga seluruh modul didalamnya dan juga penunjukan admin atau operator untuk masing-masing sekolah haruslah bisa berakibat tegas untuk semua sekolah di kota Malang namun dalam faktanya masih banyak Lembaga Pendidikan yang tidak memenuhi surat edaran yang dikelurkan dengan tidak memiliki admin atau operator sehingga tidak ada sumberdaya atau pegawai yang mampu menjalankan SIAP *online*. Maka pada segi kepatuhan dan daya tanggap terhadap kebijakan SIAP *online* juga kurang maksimal karena masih banyak dari Lembaga Pendidikan kota Malang yang pada awalnya menolak untuk menjalankan kebijakan ini karena dengan alasan tidak adanya koneksi internet dan akan menambah anggaran belanja sekolah. Padahal setiap sekolah pada anggaran dana BOS terdapat anggaran untuk pengadaan jaringan internet di sekolah sesuai dengan juknis Permendikbud nomor 76 tahun 2012 tentang rincian dana BOS yaitu , sekolah berhak untuk mengalokasikan dana untuk internet sebesar Rp. 250rb per bulan.

b. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* terhadap PT.TELKOM WILTEL Malang

Sebagai implementor dari kebijakan SIAP *online* maka PT.TELKOM WILTEL Malang memiliki tugas untuk memberikan informasi yang lengkap dalam pengimplementasian kebijakan SIAP *online* dikota Malang. PT.TELKOM WITEL Malang adalah aktor yang

memiliki informasi yang terlengkap tentang kebijakan SIAP *online* karena PT.TELKOM memegang MOU kerjasama antara kemendikbud yang kemudian diturunkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan PT.TELKOM dan juga juknis dari pelaksanaan juga yang membuat modul-modul dalam layanan SIAP *online* bersama dengan PT.TELKOM Surabaya.

Dalam MOU yang telah disepakati menjelaskan bahwa PT.TELKOM sebagai implementor dan yang mengatur agenda pelaksanaan kebijakan SIAP *online*. Fakta yang terjadi dan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa selama pelaksanaan kebijakan SIAP *online* di kota Malang PT.TELKOM merupakan aktor yang aktif dalam melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kota Malang dengan memberikan juknis agenda dalam pelaksanaan SIAP *online*. Dan juga yang banyak mengerahkan sumberdaya untuk menjalankan semua modul-modul SIAP *online* . mulai yaitu padamu negeri dan juga PPDB.

Jika melihat dari teori yang diungkapkan oleh Wibawa dalam Katz dalam Easton (1986:174) bahwa studi ini melihat adanya tiga dimensi analisis dalam suatu organisasi yakni tujuan, pelaksanaan tugas, dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Maka dari dimensi tujuan, kebijakan SIAP *online* ini memiliki tujuan yang dapat memberikan kemudahan dan juga kecepatan dalam proses administratif Lembaga Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan dalam masalah pendataan dan

lain-lain. Kemudian dalam dimensi pelaksanaan tugas hal ini PT.TELKOM WILTEL Malang sebagai implementor telah menjalankan tugasnya dengan menghubungkan Dinas Pendidikan kota Malang dengan Lembaga Pendidikan di seluruh kota Malang dengan baik karena PT.TELKOM memiliki *Team* dalam pengerjaanya. Dan dimensi yang terakhir yaitu kaitan organisasi dengan lingkungan. Kaitan PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan kota Malang dan juga Lembaga Pendidikan di kota Malang memiliki hubungan kerjasama yang baik dan membentuk lingkungan kerja yang baik bahkan menghubungkan Dinas Pendidikan kota Malang dengan seluruh sekolah lembaga pendidikan dikota Malang. Namun kerja dari PT.TELKOM dalam pelaksanaan kebijakan SIAP *online* ini memiliki kendala karena *time line* sosialisasi SIAP *online* dari bulan maret dan berakhir bulan mei 2013 tidak dapat dijalankan tepat waktu karena selain dari proses persiapan untuk menggumpulkan semua admin dan operator di seluruh Lembaga Pendidikan dikota Malang juga lambatnya respon dari Lembaga-Lembaga lain seperti seperti LPMP dan UPTD dalam membentuk sinergitas kerjasama dalam pelaksanaan SIAP *online*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam proses formulasi kebijakan SIAP *online* diawali dengan perumusan masalah kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan melihat kinerja dari Dinas Pendidikan dalam masalah administratif pendidikan yang masih belum dapat terakomodir dengan baik dan tidak terintegrasi dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Kemudian Kemendikbud bekerjasama dengan PT.TELKOM dalam membuat sebuah sistem baru untuk mengatasi masalah administratif pendidikan dengan melihat hasil produk PT.TELKOM terdahulu yaitu PSB *online* RTO. Sehingga kemudian Kemendikbud membuat formulasi kebijakan dengan PT.TELKOM yaitu kebijakan SIAP *online*. Kemudian kebijakan tersebut diturunkan ke daerah yaitu melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur.
2. Pada proses implementasi kebijakan SIAP *online* dalam hal kerjasama PT.TELKOM dengan Dinas Pendidikan kota Malang sudah sejak tahun 2003 yaitu SIAP *online* PSB *online* RTO. Namun ketika kebijakan SIAP *online* sudah disahkan oleh Kemendikbud pada tahun 2012 maka pada proses implementasinya SIAP *online* berubah menjadi layanan SIAP *online* dan dilengkapi dengan modul-modul tambahan didalamnya seperti PPDB *online*, padamu negeri dan juga manajemen dana BOS. Prosedur pelaksanaan dan

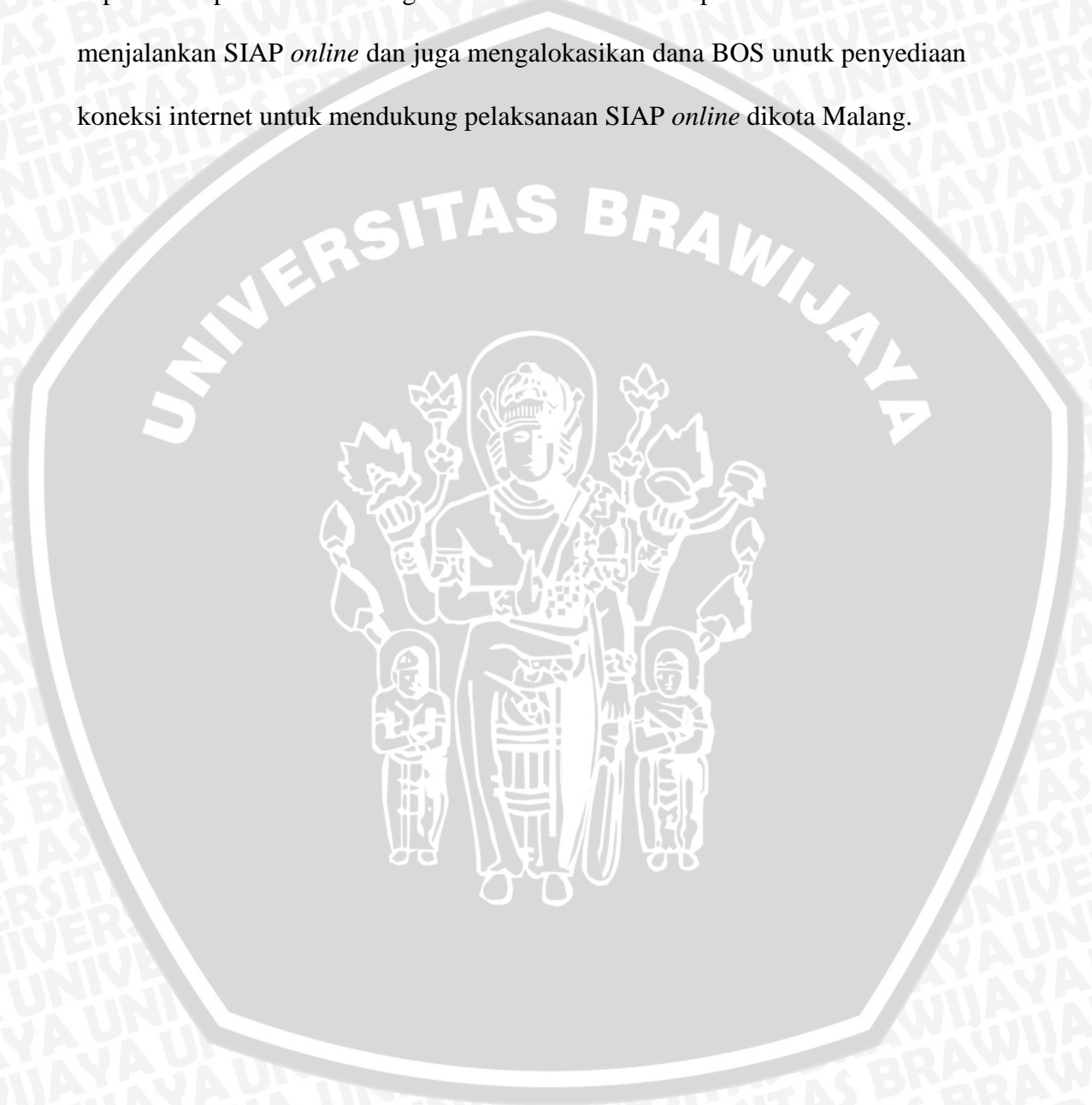
penggunaan kebijakan SIAP *online* juga memiliki cara yang berbeda dari setiap modulnya.

3. Evaluasi implementasi kebijakan SIAP *online* ini dapat dilihat dari dua aktor yaitu Lembaga Pendidikan sebagai sasaran kebijakan yang belum mematuhi prosedur pelaksanaan SIAP *online* dan tidak menggunakan bantuan dana BOS untuk pengadaan koneksi internet. Serta dari PT.TELKOM sebagai pelaksana kebijakan SIAP *online* yang tidak tepat dengan *timeline* karena memerlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain.

B. Saran

1. Pada tahap formulasi harusnya Kemendikbud berkoordinasi dengan Dirjen Pendidikan, agar Dirjen Pendidikan juga mengetahui bahwa kebijakan SIAP *online* ini sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data administratif pendidikan sehingga terciptanya koordinasi dan Dirjen Pendidikan tidak memiliki kebijakan yang lain.
2. Proses implementasi kebijakan harusnya tidak diserahkan penuh oleh pihak PT.TELKOM WILTEL Malang karena Dinas Pendidikan kota Malang akhirnya tidak mengetahui secara lengkap informasi SIAP *online* dan tidak memiliki *team* khusus penanganan SIAP *online*. Sehingga layanan *call centre* SIAP *online* dilakukan oleh PT.TELKOM.

3. Pada evaluasi kebijakan SIAP *online* Lembaga Pendidikan kota Malang seluruh tingkat mulai dari SD,SMP dan SMA harusnya mendukung dan mematuhi keputusan pemerintah dengan memiliki admin operator sendiri untuk menjalankan SIAP *online* dan juga mengalokasikan dana BOS untk penyediaan koneksi internet untuk mendukung pelaksanaan SIAP *online* dikota Malang.



GLOSARI : ISTILAH-ISTILAH YANG PERLU DIKLETAHUI

SIAP : Sistem Informasi Administrasi Pendidikan adalah layanan system informasi dan aplikasi pendidikan online yang dapat menghubungkan komunikasi orang tua, guru, siswa, sekolah dan dinas pendidikan secara terpadu dan akuntable yang dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Online : *Online* adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap operasi, dapat berkomunikasi atau dikontrol dengan komputer. Atau *Online* adalah suatu keadaan dimana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain dengan menggunakan suatu perangkat, sehingga bisa saling berkomunikasi.

TIK atau ICT : TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan *ICT* adalah *information and communication thecnologies*. Adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.

MOU : Adalah *Memorandum Of Understanding* yang memiliki arti adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

PPDB : Adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi penerimaan peserta didik baru. Mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara online berbasis waktu nyata.

NUPTK : Adalah singkatan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. merupakan kode identitas unik yang diberikan kepada seluruh Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di seluruh satuan pendidikan (Sekolah) di Indonesia.

NISN : Adalah singkatan dari Nomor Induk Siswa Nasional. NISN digunakan oleh seluruh siswa yang terdaftar baik siswa sekolah swasta maupun siswa sekolah negeri.

NPSN : Adalah singkatan dari Nomor Pokok Sekolah Nasional. digunakan sebagai kunci utama dalam database pendataan pendidikan menengah. NPSN diterbitkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), oleh karena itu semua sekolah jenjang pendidikan menengah wajib memiliki NPSN untuk melakukan pengisian data identitas sekolah.

Lampiran 1

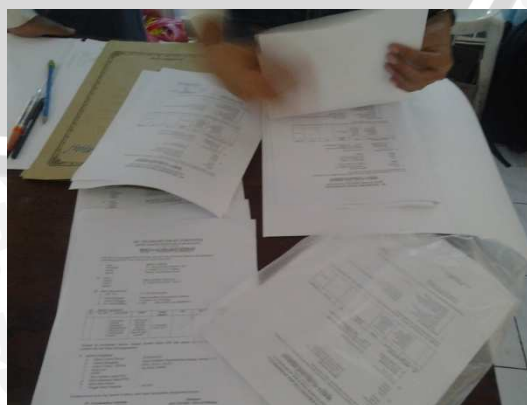
Dokumentasi



Proses Wawancara SIAP online



Proses Sosialisasi SIAP online di Diknas Pendidikan Kota Malang



Penyusunan Berkas Berita Acara Siap Operasi PPDB online

LAMPIRAN 2

Daftar panduan wawancara

1. Nama?
2. Jabatan?
3. Apakah definisi dari SIAP *Online*?
4. Apa fungsi dan kegunaan dari SIAP online?
5. Apa dan fungsi modul-modul dari SIAP online?
6. Bagaimanakah sejarah terbentuknya kebijakan SIAP online?
7. Bagaimanakah sejarah layanan SIAP online menjadi kebijakan yang diterapkan di Jawa timur?
8. Bagaimanakah sejarah layanan SIAP online menjadi kebijakan yang diterapkan di kota Malang?
9. Bagaimanakah sejarah kerjasama antara Dinas Pendidikan Jawa timur dengan PT.Telkom dalam pelaksanaan kebijakan SIAP online?
10. Adakah payung hukum yang mendasari kewajiban modul-modul dalam SIAP online harus digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan?
11. Siapakah yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan SIAP online di kota Malang menurut payung hukum kebijakan SIAP online?
12. Bagaimana fungsi dan tugas dari PT.Telkom Witel Malang dalam mengimplementasikan kebijakan SIAP online di kota Malang?
13. Bagaimanakah fungsi dan tugas dari Dinas Pendidikan Kota Malang dalam mengimplementasikan kebijakan SIAP online?
14. Bagaimanakah proses formulasi dari kebijakan SIAP online?
15. Siapakah aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan SIAP Online?
16. Bagaimanakah pengimplementasian kebijakan SIAP online di kota Malang?
17. Bagaimanakah prosedur pengimplementasian kebijakan SIAP online?
18. Bagaimanakah pengimplementasian kebijakan SIAP online di lembaga pendidikan kota Malang?
19. Bagaimanakah pengimplementasian kebijakan SIAP online di Dinas Pendidikan Kota Malang?
20. Bagaimanakah respon Dinas Pendidikan Kota Malang dan lembaga pendidikan di kota Malang sehubungan dengan pengimplementasian kebijakan SIAP online?
21. Adakah hambatan dalam pengimplementasian kebijakan SIAP online di kota Malang?
22. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT.Telkom dalam mengimplementasikan kebijakan SIAP online di kota Malang?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Komplek Kemdikbud, Gedung D Lt.17, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat - 10270
Telp. 021-57974164, Fax.021-57974163

Nomor : 10741/IJ/LLI/2013
Lampiran : -
Hal : Layanan PADAMU NEGERI program Pemetaan Mutu Pendidikan 2013

31 Mei 2013

Yth.
Kepala LPMP Seluruh Indonesia
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait penjaminan mutu pendidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) akan menyelenggarakan program pemetaan mutu pendidikan 2013.

Sehubungan dengan program tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program ini mengintegrasikan proses Layanan NUPTK dan Layanan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), yang dimulai tanggal 3 Juni sampai dengan 30 September 2013.
2. Kami telah menyediakan layanan transaksional PADAMU NEGERI untuk mendukung Layanan NUPTK dan EDS dimaksud yang dapat diakses melalui situs <http://padamu.kemdikbud.go.id>
3. Untuk dapat mengakses layanan transaksional tersebut, kami telah membuat akun login untuk setiap Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan untuk didistribusikan ke seluruh Sekolah di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Surat Akun Login dimaksud dapat diambil di LPMP Provinsi masing-masing.
4. Akun login Layanan PADAMU NEGERI digunakan untuk melakukan layanan transaksional, meliputi: Verifikasi dan Validasi NUPTK, Registrasi PTK, Pengajuan NUPTK Baru serta Monitoring dan Pelaporan EDS sebagaimana prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan. Informasi selengkapnya dapat diakses di <http://padamu.kemdikbud.go.id/#!/alur>
5. Mohon dukungan dari Saudara untuk kelancaran program ini, dan hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk rakor pemetaan mutu pendidikan yang akan kami selenggarakan pada bulan oktober 2013.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, disampaikan terima kasih.



Kepala,


Syawal Gultom
NIP. 19620203 198703 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Komplek Kemdikbud, Gedung D Lt. 17, Jl. Pintu 1 Senayan-Jakarta Pusat 10270
Telp. 021 -57974164, Fax 021 - 57974163

Nomor : 14743/J1/LL/2013
Lampiran : -
Hal : Tugas pelaksanaan Layanan untuk Program
Pemetaan Mutu Pendidikan 2013

29 Juli 2013

Yth.
Kepala LPMP seluruh Indonesia

Dalam rangka mensukseskan program Pemetaan Mutu Pendidikan periode 2013. Kami mengharapkan kepada seluruh LPMP untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memonitor, mengidentifikasi dan mengumpulkan data :
 - a. Akun sekolah yang tidak terpakai;
 - b. Sekolah yang belum memiliki akun;
 - c. Sekolah yang belum melakukan aktivasi akun aplikasi sistem;
2. Memastikan ketepatan data :
 - a. NPSN sesuai dengan NPSN yang dikeluarkan oleh PDSP;
 - b. Demografis sekolah (kecamatan, kabupaten / kota, dan provinsi);
 - c. Posisi lokasi sekolah di peta (saat ini banyak yang tidak merubah, ditandai dengan lokasinya yang masih menempel di kantor dinas);
3. Memonitor, mengidentifikasi dan mengumpulkan data bagi sekolah-sekolah yang mengalami kendala terkait ketersediaan infrastruktur koneksi Internet untuk akses program pemetaan mutu pendidikan 2013;
4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membantu memberikan solusi bagi sekolah-sekolah yang mengalami kendala dari sisi teknis maupun non teknis dalam rangka mendukung suksesnya Program Pemetaan Mutu Pendidikan 2013;
5. Melaksanakan proses pengajuan usulan berkas NUPTK baru sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Mohon untuk melaporkan progres dan hasil dari tugas-tugas tersebut ke BPSDMPK-PMP secara periodik hingga 30 September 2013 melalui email pmptkweb@gmail.com .

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Sekretaris

Dr. Abi Sujak, M.Sc
NIP. 19621011 198601 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala BPSDMPK-PMP;
2. Kepala Pusat PPMP

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abul Wahab, Solichin, 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anderson, James E., 2006, *Public Policy Making, An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Anderson, James E., 1994. *Public Policy Making – An Introduction* (second edition), Texas A & M University.
- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making. Second Edition*. New York : University of Houston.
- Asian Development Bank, 2009 “good practice in information and communication technology for education”, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, <http://www.oerafrica.org/ResourceDownload.aspx?id=37083>, 8 Oktober 2013.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Chandler, Ralph C.; Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara, California: ABC-CLIO
- Dunn, W. N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Publik Terjemahan Samodra Wibawa Dkk., Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Donovan Frances, Jackson Alunc, *Managing Human Service Organisations*, Prentice Hall, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1991
- Eston, David. 1965, *A Framework for Political Analysis*. Prentice Hall
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. USA : Princeton University Press.
- Gordon, B.Davis, 2002, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, PPM, Jakarta.
- Indrajit, Richardus E., 2002, *Electronic Government*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus.E dan Pranoto, Richardus. D . 2005. *Strategi Manajemen Pembelian dan Supply Chain*, Grasindo, Jakarta
- Isaac; Stephen dan William B. Michael. 1982 *Handbook in research and evaluation* : California: Edits Publisher

Islamy, M. Irfan, 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan Kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta.

Krishmaveni, J Meenakumari, (2011), "Transforming Higher Educational Institution Administration Through ICT", Journal. Volume 2, No.08, International Journal of Advanced Computer Science and Application, <http://thesai.org/Downloads/Volume2No8/Paper%2010Transforming%20Higher%20educational%20institution%20administration%20through%20ICT.pdf>, 22 Oktober 2013.

Keban, Y.T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. 2008. Yogyakarta: Gava Media.

Keban, Yemias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

LPPM, (1992) *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Terjemahan buku Gordon B. Davis, P.T. Pustaka Bina Pressindo, Jakarta

Makewa, Lazarus, Jackson Meremo, Elizabeth Role, & Jesse Role, (2013), "International Journal Of Education And Development Using Information And Communication Technology", Journal. Volume 9, University of Eastern Afrika, Baraton, Kenya, <http://ijedict.dec.uwi.edu/include/getdoc.php?id=2194&article=241&mode=pdf>, 21 Oktober 2013

Moleong, Lexy. 2009. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Henry, Nicholas. 2004. *Public Administration and Public Affairs*. Georgia Southern University: Pearson Prentice Hall.

Mazmanian Danie. Paul Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Foresman and Company.

Nugrogo, Riant, 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan sebagai The Fifth Estate*. Metode Penelitian Kebijakan. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.

Paul Medows, "Motivation for Change and Development Administration": *Concepts and Problems*, Syracuse University Press, New York 1963, pp. 98-99

Siagian, P. Sondang, 2001, *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi dan strateginya)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Siagian, Sondang. P. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Fajar Interpratama Offset, Jakarta

Voogt, J., Knezek, G (editor), (2008) *International Handbooks of Information Technology in Primary and Secondary Education Part One*, Volume 20, Springer, Netherlands.

Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, 1994. *Kebijakan Publik Proses Dan Analisis*, Jakarta: Intermedia

Wibawa, Samodra, dkk.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo, 2001. *analisis kebijakan publik*, jakarta: bina aksara

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing

Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Cetakan 1, Yogyakarta

